

**KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT PULAU KECIL (STUDI KASUS PADA PULAU GILI
KETAPANG KECAMATAN SUMBER ASIH KABUPATEN PROBOLINGGO)**

**LAPORAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

OLEH:

HARGE TRIO WIDODO

NIM. 0610840020



FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2010

**KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT PULAU KECIL (STUDI KASUS PADA PULAU GILI
KETAPANG KECAMATAN SUMBER ASIH KABUPATEN PROBOLINGGO)**

**LAPORAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perikanan
Pada Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya**

Oleh :

HARGE TRIO WIDODO

NIM. 0610840020



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2010

**KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT PULAU KECIL (STUDI KASUS PADA PULAU GILI
KETAPANG KECAMATAN SUMBER ASIH KABUPATEN PROBOLINGGO)**

Oleh :
HARGE TRIO WIDODO
NIM. 0610840020

Telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal 26 Juli 2010

dinyatakan telah memenuhi syarat

Dosen Penguji I

(Zainal Abidin, S.Pi)
NIP. 19770221 200212 1 008
Tanggal :

Dosen Penguji II

(Ir. Ismadi, MS)
NIP. 19490515 197802 1 001
Tanggal :

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

(Dr. Ir. Edi Susilo, MS)
NIP.19591205 198503 1 003
Tanggal :

Dosen Pembimbing II

(Drs. Abdullah Said, M.Si)
NIP. 19570911 198503 1 003
Tanggal :

Mengetahui,

Ketua Jurusan SEPK

(Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP)
NIP. 19610417 199003 1 001
Tanggal:

RINGKASAN

HARGE TRIO WIDODO. Skripsi tentang Ketimpangan Pembangunan dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pulau Kecil (Studi Kasus Pada Pulau Gili Ketapang Kecamatan Sumber Asih Kabupaten Probolinggo) (dibawah bimbingan **Dr. Ir. Edi Susilo, M.S** dan **Drs. Abdullah Said, M.Si**).

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago state*) terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau dengan luas laut sekitar 5,8 juta km² dan bentangan garis pantai sepanjang 81.000 km. Setiap pulau kecil atau gugus pulau-pulau kecil memiliki karakteristik dan tingkat kerentanan yang berbeda dibandingkan dengan pulau besar. Sehingga memerlukan tingkat perhatian dan penanganan yang berbeda pula antara pulau satu dengan lainnya. Sebagian besar dari pulau-pulau tersebut merupakan pulau-pulau kecil yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) yang sangat potensial untuk pembangunan ekonomi. Namun pembangunan nasional belum tersebar secara merata hingga kepulauan-pulau kecil di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Pulau-pulau kecil tersebut secara ekonomis mempunyai potensi yang sangat kaya akan lahan yang cukup luas, sumber laut, sumber daya tambang, dan pariwisata. Akibatnya tidak jarang masyarakat pulau-pulau kecil masih jauh tertinggal dari kemajuan bidang sosial, ekonomi, dan budaya dari daerah lain. Padahal jika berhasil dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan, pulau-pulau kecil ini bukan saja akan menjadi sumber pertumbuhan baru, melainkan sekaligus akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kelompok sosial dengan daerah lain.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari: (1) Potensi dan manfaat yang dapat dikembangkan dipesisir serta perairan pulau Gili Ketapang. (2) Kondisi sosial ekonomi masyarakat pulau Gili Ketapang. (3) Dampak pembangunan yang telah dilakukan terhadap masyarakat pulau Gili Ketapang. (4) Faktor pendukung dan penghambat pembangunan pulau Gili Ketapang. Sedangkan penelitian ini telah dilaksanakan pada pulau Gili ketapang, kecamatan Sumberasih di kabupaten Probolinggo pada bulan Maret-April 2010. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sedangkan teknik deskriptif yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*) mendalam dengan informan untuk mendapatkan informasi yang mendalam, dan observasi (pengamatan) langsung di lapang. Data yang diambil adalah data primer berupa hasil wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dari data tertulis yang didapat dari situs penelitian tersebut. Analisis data yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif mengenai dampak ketimpangan pembangunan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pulau Gili Ketapang.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa di wilayah pesisir dan lautan pulau gili ketapang terdapat potensi perikanan yang melimpah. Dalam hal ini adalah perikanan tangkap dan juga pengolahan hasil perikanan sebagai upaya diversifikasi produk perikanan agar harga jual produk meningkat. Selain itu juga potensi pariwisata yang masih belum dikembangkan oleh masyarakat maupun pihak pemerintah. Keadaan ekonomi masyarakat pulau Gili Ketapang

menggantungkan hidupnya pada perikanan tangkap dan pengolahan hasilnya. Umumnya berada pada tingkat menengah keatas, namun karena manajemen yang kurang baik sehingga mereka banyak yang memiliki hutang. Sedangkan kehidupan sosial masyarakat pulau Gili Ketapang sangat baik. Keekerabatan dan kerukunan sosial sangat baik antara warga satu dengan yang lainnya. Walaupun ada beberapa golongan tidak menjadi jurang pemisah. Selain itu masyarakat pulau Gili Ketapang juga sangat mementingkan gengsi diantara mereka.

Ketersediaan infrastruktur sudah mencukupi, namun masih sangat jauh jika dibandingkan dengan yang ada di pulau Jawa. Pembangunan yang telah dilakukan sudah mencakup pembangunan fisik dan juga pembangunan non fisik. Pembangunan tersebut diantaranya adalah pembangunan pendidikan, kesehatan, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Saluran Penyediaan Air Minum (SPAM), dermaga, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM), dan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Dan akses masyarakat terhadap pelayanan tersebut terbuka sangat lebar, sehingga semua masyarakat dapat mengaksesnya. Faktor pendukung dalam pembangunan pulau Gili ketapang berasal dari masyarakat sendiri, yaitu keinginan mereka untuk merubah daerahnya. Dan mulai terbukanya pemikiran mereka tentang pentingnya pembangunan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah rendahnya kulaitas SDM, sumberdaya yang terbatas jumlahnya, ketegantungan ekonomi pada kota Probolinggo.

Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Potensi pariwisata bahari Pulau Gili Ketapang meliputi potensi wisata alam pantai dengan pemandangan dan ombak yang indah, walaupun *akseibilitas* (daya jangkau yang mudah ditempuh) menuju kawasan pantai tersebut fasilitasnya masih sangat terbatas. Potensi yang juga masih besar adalah pengolahan hasil perikanan, melihat produksi ikan nelayan masyarakat pulau Gili Ketapang yang sangat besar. (2) Masih rendahnya kapasitas perencanaan pembangunan daerah khususnya di bidang pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil oleh pemerintah. Penataan ruang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau Gili Ketapang yang belum maksimal, penataan ruang yang belum dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah, konflik penataan ruang antar sektor, antar daerah atau *stakeholder* terkait lainnya, belum terkelolanya secara maksimal potensi sumber daya di wilayah pesisir, laut dan pulau Gili Ketapang sehingga mengakibatkan adanya kesenjangan yang tajam antar daerah, adanya kegiatan yang bersifat eksploitatif tanpa usaha mengeksplorasi yang mengakibatkan terganggunya lingkungan di wilayah pesisir, laut pulau Gili Ketapang. (3) Masyarakat pulau Gili Ketapang merupakan masyarakat yang agamis dan taat beribadah. Banyak dari mereka merupakan lulusan pondok pesantren. Rata-rata ekonomi masyarakat bisa dikatakan berada pada kondisi menengah keatas. Kehidupan sosial mereka sangat baik antara masyarakat satu dengan yang lainnya, solidaritas dan tenggang rasa mereka sangat tinggi. (4) Dampak pembangunan yang muncul yaitu mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah yang selama ini terjadi, sedangkan dampak negatifnya adalah mereka

belum siap dengan konsekuensi pembangunan yang harus mereka hadapi. (5) Faktor penghambat pembangunan yang paling utama adalah kualitas sumber daya manusia yang bisa dikatakan sangat rendah. Sehingga menyulitkan dalam mempercepat proses pembangunan.

Saran yang dapat saya berikan kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo dari penelitian ini adalah: (1) Pembangunan pariwisata dalam bentuk apapun diharapkan tidak merusak lingkungan serta tetap memperhatikan mengenai dampak lingkungan yang akan timbul sehingga perlu dipikirkan dan dikaji lebih dalam dengan riset lanjutan tentang valuasi ekonomi untuk membandingkan proyeksi manfaat pembangunan pariwisata dan keadaan saat ini, agar kerusakan lingkungan bisa di minimalisir. (2) Departemen Kelautan dan Perikanan Kabupaten Probolinggo selayaknya bekerjasama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo merancang rencana strategis terkait pengelolaan pulau kecil dan daerah pesisir. (3) Perlu upaya-upaya tindakan pencegahan yang harus segera dilakukan dengan mencari dan menentukan alternatif pemanfaatan dan pengelolaan dalam kerangka pemanfaatan yang berkelanjutan seperti melakukan valuasi ekonomi dan lingkungan. (4) Perlu lebih ditingkatkan kegiatan-kegiatan dalam upaya menumbuhkembangkan potensi masyarakat lokal, baik dalam pembentukan kelompok musyawarah antar nelayan ataupun pengembangan kelompok usaha bersama agar tercipta peran serta masyarakat lokal dalam pembangunan. (5) Pembangunan sumber daya manusia perlu mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan, karena manusia merupakan faktor utama dalam mempercepat proses pembangunan dengan meningkatkan fasilitas dan sarana pendidikan sebagai salah satu alat pembangunan SDM. (6) Setiap pemanfaatan (eksploitasi) sumberdaya alam harus dilakukan dengan metode yang tepat tanpa melupakan pelestarian sumberdaya alam yang ada seperti pengawasan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. (7) Pembangunan yang dilakukan di pulau Gili Ketapang harus melihat berbagai aspek, seperti sektor ekonomi, masyarakat, sosial, budaya, dan pemerintah desa, daerah maupun pusat. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antara satu dengan yang lainnya. Untuk mewujudkan keterpaduan tersebut maka dalam perencanaan pembangunan harus mengintegrasikan semua semua kepentingan pada sektor-sektor yang terlibat. Maka dari itu perlu ada musyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam perencanaan pembangunan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmad dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya skripsi ini dengan judul “Ketimpangan Pembangunan Dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pulau Kecil (Studi Kasus Pada Pulau Gili Ketapang Kecamatan Sumber Asih Kabupaten Probolinggo)”. Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang.

Dalam pelaksanaan dan penulisan laporan akhir skripsi ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, saran, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu, ibu, ibu, skripsi ini aku persembahkan untukmu. Terima kasih atas semua doa, restu dan semangat yang telah kau berikan padaku. Tak ada kata yang mampu mengungkapkan rasa banggaku padamu.
2. Bapak, Mas Wawan, Mbak Hepi, adikku Catur, Adel, Mbak Lia, terima kasih atas seluruh dukungan baik material dan spiritual.
3. Dr. Ir. Edi Susilo, MS, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan wejangan, motivasi, bimbingan dan pengarahan sejak penyusunan usulan penelitian sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
4. Drs. Abdullah Said, Msi, selaku dosen pembimbing II dengan kesabaran dan penuh keikhlasan telah membimbing penulis agar lebih teliti dan rajin dalam proses penyusunan skripsi.
5. Keluarga mas Yayan, Bapak Lurah Gili Ketapang, dan seluruh masyarakat Pulau Gili Ketapang yang telah meluangkan waktu

memberikan pengarahan dan bimbingan selama pelaksanaan penelitian skripsi ini.

6. Sahabat-sahabatku: Gita, Onta, Dwi, Iva, mas Fattah, Agus, Kiki, & Tante-tante kos (hug, emak, tante ndud) yang sangat baik telah memberikan aku semangat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman SEPK'06 dan penghuni Lab SEPK terima kasih atas segala doa, dukungan, dan bantuannya, I love you all.
8. Segenap pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan banyak masukan, saran serta kritik yang bersifat membangun.

Akhirnya penulis berharap semoga laporan skripsi ini dapat memeberikan manfaat dan informasi yang berguna bagi semua pihak.

Malang, Juli 2010

Penulis

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HARGE TRIO WIDODO

Nim : 0610840030

Judul Skripsi : Ketimpangan Pembangunan Dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pulau Kecil (Studi Kasus Pada Pulau Gili Ketapang Kecamatan Sumber Asih Kabupaten Probolinggo)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, 26 Juli 2010

Mahasiswa

Harge Trio Widodo

0610840020

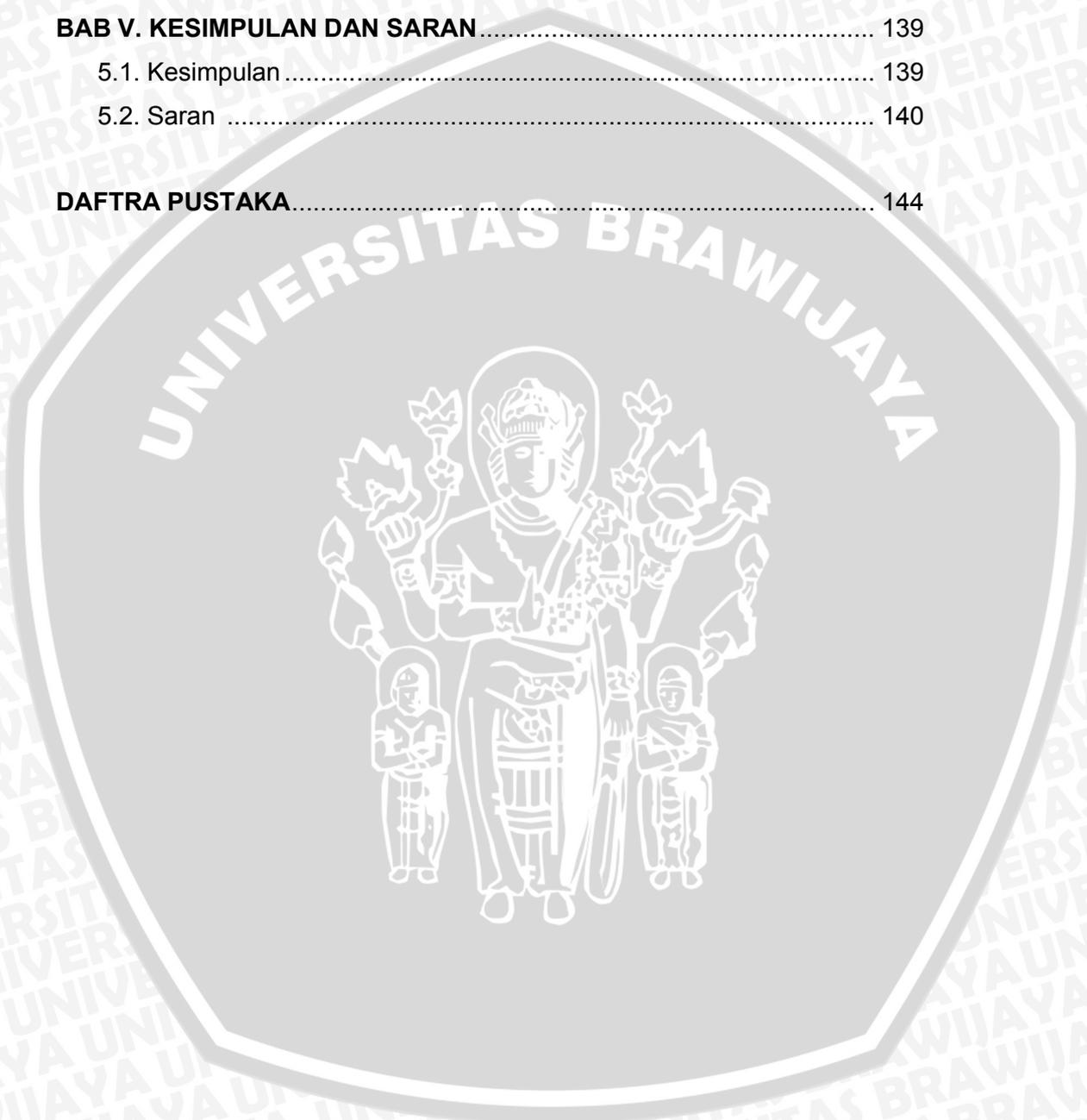
DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
RINGKASAN	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Kebijakan.....	9
2.2. Kebijakan Publik.....	11
2.3. Evaluasi Dampak Kebijakan.....	13
2.4. Analisis Kebijakan.....	16
2.5. Teori Pembangunan.....	19
2.6. Konsep Pembangunan.....	23
2.7. Indikator Pembangunan.....	23
2.8. Pembangunan Sosial Ekonomi.....	25
2.9. Pulau.....	27
2.10. Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut.....	29

BAB III. METODE PENELITIAN	32
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2. Fokus Penelitian	34
3.3. Lokasi Penelitian.....	35
3.4. Teknik Pengambilan Data.....	35
3.5. Instrumen Penelitian	36
3.6. Jenis dan Sumber Data.....	37
3.7. Analisis Data.....	37
3.8. Keabsahan Data	39
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Letak Geografis Kabupaten Probolinggo.....	42
2. Keadaan Masyarakat Kabupaten Probolinggo	45
3. Pembangunan di Kabupaten Probolinggo.....	47
a. Pembangunan Kesehatan.....	51
b. Pembangunan Ekonomi.....	52
c. Pembangunan Pendidikan.....	56
d. Kebijakan Perwilayahan	61
B. Gambaran Umum Situs Penelitian.....	63
1. Karakteristik Geografis Pulau Gili Ketapang.....	63
a. Keadaan Fisik	65
b. Kependudukan.....	69
c. Kebijakan Perwilayahan	74
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Gili Ketapang	74
3. Tantangan dan Permasalahan Pembangunan di Pulau Gili Ketapang.....	82
C. Penyajian Data Lapangan	
1. Potensi dan Manfaat Yang Dapat Dikembangkan di Wilayah Pesisir dan Laut Pulau Gili Ketapang	85
a. Potensi Perikanan	85
b. Potensi Pariwisata.....	87
2. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pulau Gili Ketapang.....	88

a. Perekonomian Masyarakat Pulau Gili Ketapang.....	88
b. Kehidupan Sosial Masyarakat Pulau Gili Ketapang	91
c. Bentuk Ketimpangan Pembangunan di Pulau Gili ketapang	93
3. Hasil Pembangunan di Pulau Gili Ketapang	96
a. Ketersediaan Infrastruktur	96
b. Sekolah di Pulau Gili Ketapang	97
c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gili Ketapang	99
d. Dermaga	100
e. Sistem Penyediaan Air Minum Gili Ketapang	101
f. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.....	102
g. Kesehatan.....	103
h. Kelompok Usaha Bersama Mina Makmur	104
i. Akses Terhadap Pelayanan Publik.....	105
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Pulau Gili Ketapang	106
a. Faktor Pendukung Pembangunan Pulau Gili Ketapang.....	106
b. Faktor Penghambat Pembangunan Pulau Gili Ketapang	106
D. Analisis Dan Interpretasi Data	108
1. Analisis Potensi dan Manfaat Yang Dapat Dikembangkan di Wilayah Pesisir dan Lautan Pulau Gili Ketapang	108
a. Potensi Perikanan	110
b. Potensi Pariwisata.....	111
2. Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pulau Gili Ketapang ..	114
a. Perekonomian Masyarakat Pulau Gili Ketapang.....	114
b. Kehidupan Sosial Masyarakat Pulau Gili Ketapang.....	115
c. Bentuk Ketimpangan Pembangunan Yang terjadi	118
3. Analisis Hasil Pembangunan di Pulau Gili Ketapang.....	119
a. Ketersediaan Infrastruktur	119
b. Pembangunan Pendidikan	119
c. Pembangunan PLTD	121
d. Pembangunan Dermaga	123
e. Pembangunan SPAM.....	124
f. PNPM Mandiri Perdesaan.....	126
g. Pembangunan Kesehatan	128
h. KUB Mina Bahari Makmur	123

i. Akses Terhadap Pelayanan Publik.....	131
4. Faktor pendukung dan Penghambat Pembangunan	131
a. Faktor Pendukung.....	131
b. Faktor Penghambat.....	135
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	139
5.1. Kesimpulan	139
5.2. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA.....	144



DAFTAR GAMBAR

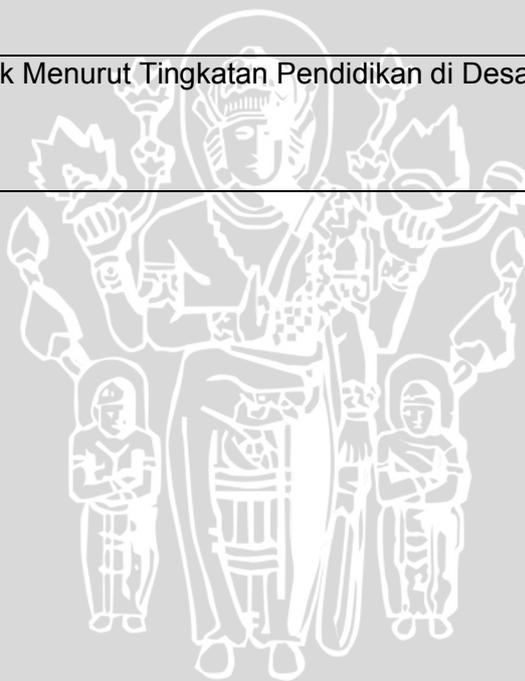
No.	Judul	Hal
1.	Metode Analisis Kebijakan William N. Dunn 1999	16
2.	Metode Analisis Kebijakan Weimer-Vining 1999	17
3.	Metode Analisis Kebijakan Patton dan Savicky	18
4.	Kerangka Berfikir	30
5.	Peta Kabupaten Probolinggo	44
6.	Gambar Pulau Gili Ketapang	66





DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal
1.	Jenis Pekerjaan Masyarakat Kabupaten Probolinggo	48
2.	Jumlah Lulusan, Daya Tampung dan Angka Putus Sekolah	59
3.	Perkembangan Jumlah TK dan SD di Kabupaten Probolinggo	61
4.	Perkembangan Jumlah SMP dan SMA di Kabupaten Probolinggo	62
5.	Bentuk Penggunaan Lahan di Desa Gili Ketapang	68
6.	Jumlah Penduduk Pulau Gili Ketapang Menurut Jenis Kelamin	71
7.	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Gili Ketapang	72
8.	Jumlah Penduduk Menurut Tingkatan Pendidikan di Desa Gili Ketapang	73



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago state*) terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau dengan luas laut sekitar 5,8 juta km² dan bentangan garis pantai sepanjang 81.000 km. Sebagian besar dari pulau-pulau tersebut merupakan pulau-pulau kecil yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) yang sangat potensial untuk pembangunan ekonomi. Namun pembangunan nasional belum tersebar secara merata hingga ke pulau-pulau kecil di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Pulau-pulau kecil tersebut secara ekonomis mempunyai potensi yang sangat kaya akan sumber laut, sumber daya tambang, dan pariwisata. Akibatnya tidak jarang masyarakat Pulau-Pulau kecil masih jauh tertinggal dari kemajuan dibidang sosial, ekonomi, dan budaya dari daerah lain. Padahal jika berhasil dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan, pulau-pulau kecil ini bukan saja akan menjadi sumber pertumbuhan baru, melainkan sekaligus akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kelompok sosial dengan daerah lain (Siregar, 2008).

Selama ini kawasan pulau-pulau kecil kurang mendapat sentuhan pembangunan yang berarti karena Pembangunan Nasional di waktu lampau lebih berorientasi ke darat. Walaupun terdapat kegiatan pembangunan, kegiatan tersebut lebih mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, sehingga kurang memperhatikan kelestarian lingkungan dan bahkan sering kali memarjinalkan masyarakat setempat. Di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa perairan Pulau-Pulau kecil yang memiliki potensi perikanan cukup tinggi cenderung menjadi tempat penangkapan ikan yang dilakukan baik oleh nelayan asing maupun nelayan lokal dengan cara tidak ramah lingkungan, seperti pemboman,

pembiusan, penggunaan racun, dan sebagainya. Selain itu, terdapat fakta bahwa Pulau-Pulau kecil yang terpencil sering dijadikan sebagai tempat penyelundupan, pembuangan limbah dan/atau penambangan pasir secara liar (Kepmen DKP no. 41 tahun 2000).

Pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan Pulau-Pulau kecil sangat penting dan strategis karena: (1) merupakan kawasan memiliki produktivitas hayati tinggi; (2) memiliki daerah yang indah dan nyaman untuk rekreasi dan pariwisata; (3) kepadatan penduduk dan intensitas pembangunan yang tinggi sehingga mengalami tekanan lingkungan yang tinggi dan rentan terhadap bencana alam; (4) sumber daya pesisir merupakan milik bersama (*common property*) sehingga berlaku rejim akses terbuka (*open access*), dengan pemanfaatan maksimal mungkin yang berdampak pada kehancuran ekosistem; (5) Pulau-Pulau kecil merupakan kawasan yang spesifik, rentan terhadap perubahan lingkungan ukuran terbatas, terpencil dan kurang mendapat perhatian pembangunan; (6) kemiskinan masyarakat pesisir akibat kesalahan pengelolaan sumber daya di mana sumber daya pesisir tidak dimiliki siapapun sehingga tidak seorangpun memikirkan kelanjutannya (www.kp3k.dkp.go.id, 2010).

Pemanfaatan secara optimal dan berkesinambungan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil hanya dapat terwujud jika pengelolaannya dilakukan secara terpadu, menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development principles*), dan pendekatan pembangunan secara hati-hati (*precaution approach*). Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K), mendapat mandat untuk mengatur kebijakan pengelolaan kelautan, pesisir dan Pulau-Pulau kecil di Indonesia dengan berusaha melibatkan seluruh *stakeholders* dalam dan luar negeri melalui *networking* yang harmonis. Oleh sebab itu pemahaman dan saling bekerja sama dengan *stakeholders* sangat penting. Hal ini memerlukan informasi yang jelas. Informasi berupa

strategi, kegiatan prioritas dan organisasi Ditjen KP3K sangat penting untuk diketahui *stakeholders*, sehingga peluang kerja sama dapat digali lebih mendalam (www.kp3k.dkp.go.id, 2010).

Esensi pembangunan adalah keseluruhan aktivitas yang berjalan simultan, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi guna mencapai tujuan ke arah perubahan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Seluruh aktivitas tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan, sehingga menjadi pedoman yang representatif dalam meningkatkan nilai tambah dalam upaya pencapaian perubahan tersebut. Pembangunan adalah karya terstruktur yang mempunyai implikasi luas terhadap kualitas hidup manusia. Hal ini karena konstruksi pembangunan terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia. Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, juga mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia (<http://www.depsos.go.id>, 2010).

Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antarwilayah. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses pada permodalan, lapangan kerja, informasi, teknologi pendukung, dan pemasaran hasil-hasil produksi di perdesaan. Banyak wilayah-wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis belum dikembangkan secara optimal. Jika sudah berkembang, wilayah-wilayah tersebut diharapkan dapat berperan sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah sekitarnya yang miskin sumber daya dan masih terbelakang (<http://www.bappenas.go.id>, 2010).

Desentralisasi merupakan pintu pertama menuju terciptanya *regulated and sustainable development*. Alasannya, desentralisasilah yang akan memberi

ruang gerak sedemikian leluasa bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut termasuk sumber daya di Pulau-Pulau kecil. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya merupakan bentuk nyata tanggung Jawab mereka terhadap masa depan sumber daya tersebut. Sehingga masyarakat tidak hanya akan berhenti hanya pada perencanaan dan pelaksanaan prinsip pengelolaan sumber daya secara lestari seiring dengan nilai-nilai tradisional yang mereka miliki, tetapi tanggung Jawab itu juga akan muncul dalam bentuk pengawasan dan pengendalian. Model pengawasan dari masyarakat ini akan lebih efektif dan efisien. Walaupun, model pengelolaan sumber daya yang berbasis masyarakat akan jauh lebih efektif karena sekaligus merupakan sarana penting untuk mengantisipasi berbagai tuntutan dan ancaman dari masyarakat internasional. Jadi, seluruh praktek pemanfaatan sumber daya harus benar-benar memperhatikan keberlanjutan (*sustainable*) (Solihin, 2005).

Setiap Pulau kecil atau gugus Pulau-Pulau kecil memiliki karakteristik dan tingkat kerentanan yang berbeda dibandingkan dengan Pulau besar. Sehingga memerlukan tingkat perhatian dan penanganan yang berbeda pula antara Pulau satu dengan lainnya. Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat penyebab ketimpangan dilihat dari beberapa aspek, salah satunya adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Satu hal yang penting dalam pemerataan pembangunan Pulau-Pulau terpencil bukan hanya tugas besar bagi pemerintah pusat maupun daerah saja namun juga tugas kita sebagai warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera. Tidak terkecuali mereka yang tinggal di Pulau-Pulau yang sangat jauh dari pusat pemerintahan atau bisa dikatakan terpencil, sehingga pembangunan sangat sedikit sekali menyentuh tempat tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Ketidakseimbangan dalam kebijakan pembangunan akhirnya mengakibatkan Pulau-Pulau terpencil belum bisa berbuat banyak untuk membangun karena ketidak berdayaan yang sangat ironis padahal bangsa-bangsa besar lainnya di dunia selalu dimulai dengan besarnya kekuatan maritim. Lebih dari itu, marginalisasi kelautan telah menciptakan kompleksitas permasalahan bangsa yang sangat akut, dari mulai keterpurukan ekonomi (*illegal fishing*), kerawanan politik (penyelundupan) hingga terancamnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai:

1. Potensi apa saja yang dimiliki di Pulau Gili Ketapang maupun dipesisir serta perairannya dan manfaat apa yang dapat diperoleh dari potensi tersebut untuk kesejahteraan masyarakat setempat?
2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Pulau Gili Ketapang?
3. Pembangunan apa saja yang telah dilakukan dan apa dampaknya terhadap masyarakat Pulau Gili Ketapang?
4. Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang ditemui dalam pembangunan pada Pulau Gili Ketapang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan:

1. Potensi dan manfaat yang dapat dikembangkan dipesisir serta perairan Pulau Gili Ketapang.
2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Pulau Gili Ketapang.
3. Dampak pembangunan yang telah dilakukan terhadap masyarakat Pulau Gili Ketapang.

4. Faktor pendukung dan penghambat pembangunan Pulau Gili Ketapang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:

a.) Bagi Akademisi:

1. Meningkatkan kepekaan terhadap kebijakan pemerintah dan mampu mengkaji dampak kebijakan tersebut nantinya.
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pembangunan dan ketimpangan pembangunan pada Pulau-Pulau kecil.
3. Sebagai acuan, pertimbangan atau perbandingan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ketimpangan pembangunan pada Pulau kecil.
4. Dapat dijadikan masukan dalam melakukan studi dampak ketimpangan pembangunan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Pulau kecil.

b.) Bagi Pemerintah:

1. Dengan diketahuinya kondisi sosial ekonomi masyarakat di Pulau Gili, maka akan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Gili ketapang.
2. Sebagai bahan pertimbangan atas langkah-langkah yang akan atau sedang diambil pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo untuk mempercepat proses pembangunan pada Pulau Gili Ketapang.
3. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan pembangunan pada Pulau Gili Ketapang.

c.) Bagi Masyarakat:

1. Dengan diketahuinya potensi Pulau tersebut, maka akan dapat bermanfaat untuk mengembangkan potensi daerah yang nantinya diharapkan mampu mengangkat perekonomian masyarakat Pulau Gili ketapang khususnya.

1.5. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis telah menyesuaikan dengan kaidah penulisan yang berlaku. Yang terbagi dalam lima sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tempat dan waktu penelitian, serta sistematika pembahasannya.

BAB II Tinjauan Pustaka, disajikan beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian, dibahas mengenai penggunaan metode yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, akan diuraikan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran yang dapat diberikan peneliti khususnya untuk pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Probolinggo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan

Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa, kebijaksanaan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, ionggar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijaksanaan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana (*United Nations*, 1975 dalam Wahab, 2008).

Kebijakan Negara adalah sebagai kebijaksanaan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah (Anderson dalam Wahab, 2008). Ciri-ciri kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan negara dalam sistem-sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.

4. Kebijakan negara mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijaksanaan negara mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu; sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah di mana campur tangan pemerintah justru diperlukan (Wahab, 2008).

Kebijakan sebagai tuntutan (*policy demands*) ialah tuntutan atau desakan yang ditujukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta ataupun kalangan pemerintahan sendiri, dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak berbuat sesuatu terhadap masalah tertentu. Tuntutan-tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkrit tertentu terhadap sesuatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

Kebijakan sebagai keputusan (*policy decisions*) ialah keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan keabsahan, kewenangan atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijaksanaan negara. Dalam hubungan ini termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), mengeluarkan perintah-perintah eksekutif (keputusan presiden), ketetapan-ketetapan, mencanangkan peraturan-peraturan administratif (semisal peraturan tentang disiplin pegawai negeri sipil), atau membuat penafsiran terhadap undang-undang.

Kebijakan sebagai pernyataan (*policy statement*) ialah pernyataan resmi atau ar-tikulasi (penjelasan) mengenai kebijaksanaan negara tertentu. Termasuk

dalam hal ini ialah Ketetapan-ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau dekrit Presiden, peraluran-peraturan administratif dan keputusan-keputusan peradilan, maupun pernyataan-pernyataan dan pidato-pidato para pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat dan tujuan pemerintah serta apa yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Keluaran kebijakan (*policy outputs*) adalah merupakan wujud kebijaksanaan negara yang paling dapat dilihat dan dirasakan karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijaksanaan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa keluaran-keluaran kebijaksanaan ini ialah menyangkut apa yang dikerjakan oleh pemerintah, yang dapat kita bedakan dari apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

Hasil akhir kebijakan (*policy out-comes*) adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat (Wahab, 2008).

2.2. Kebijakan Publik

Pada dasarnya, kebijakan publik menitikberatkan pada "publik dan masalah-masalahnya". Kebijakan publik membahas bagaimana isu-isu dan persoalan tersebut disusun (*constructed*), didefinisikan, serta bagaimana kesemua persoalan tersebut diletakkan dalam agenda kebijakan. Selain itu, kebijakan publik juga merupakan studi bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah atau kebijakan publik adalah studi tentang "apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut. Lebih spesifik lagi, kebijakan publik adalah studi tentang keputusan dan tindakan

pemerintah yang disusun untuk kepentingan publik. Jika keputusan dan tindakan pemerintah dalam kebijakannya tidak memenuhi rasa keadilan, masyarakat dapat menolaknya. Penolakan tersebut dapat dilakukan dengan pelbagai macam cara, termasuk dengan penolakan terhadap metodologi atau terhadap cara pandang yang digunakan pemerintah dalam mengambil kebijakan (Fermana, 2009).

Ada beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pekkaksanaannya.

Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Jika legislatif mengeluarkan suatu regulasi yang mengharuskan para pengusaha membayar tidak kurang dari upah minimum yang telah ditetapkan tetapi tidak ada yang dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut, maka akibatnya tidak terjadi perubahan dalam perilaku ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam contoh ini sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak diatur perundang-undangan. Ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu diimplementasikan.

Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas

dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

Terakhir, kelima, kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Anggota masyarakat dapat menerima sebagai sesuatu yang sah bahwa pajak haruslah dibayar, pengontrolan import harus dipatuhi, dan peraturan antimonopoli harus diikuti, bila tidak menginginkan adanya risiko didenda, hukuman penjara, atau sanksi legal lainnya yang dapat dijatuhkan. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan organisasi swasta (Agustino, 2006).

2.3. Evaluasi Dampak Kebijakan

Evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan proses pemerintahan. Ia bervariasi dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi. Patut ditekankan bahwa evaluasi ini mengambil banyak bentuk. Ia banyak terdapat di dalam maupun di luar tingkatan pemerintahan serta melibatkan orang-orang dengan keahlian, pengalaman serta bakat yang berbeda. Meskipun evaluasi ini dilakukan secara ilmiah hasilnya acapkali bersifat politis. Ia mungkin akan terjadi dalam beberapa menit seperti ketika seorang pejabat resmi diimbau untuk mengadakan penilaian serta bertindak sesuai dengan penilaian tersebut, ataupun bisa jadi evaluasi ini terjadi sebagai akibat studi dan riset yang seksama yang dikerjakan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun (Jones, 1991).

Menurut Lester dan Stewart (2000) dalam agustino (2006) evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk

mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Evaluasi diperlukan dalam rangka untuk melanjutkan, merubah, atau mengakhiri kebijakan yang ada.

Menurut Jones (1991), tujuan-tujuan evaluasi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. *Political evaluation* (evaluasi bersifat politis): Apakah program tersebut memberikan manfaat bagi seluruh negara bagian dan distrik-distrik kekongresan? Dapatkah hal tersebut ditafsirkan untuk membuka peluang bagi re-election (pemilihan kembali)? Untuk mendapatkan dukungan media? Untuk sumbangan kampanye?
2. *Organizational evaluation* (evaluasi yang sifatnya organisasi): Apakah program tersebut menimbulkan dukungan bagi badan-badan pelaksana? Apakah manfaat bagi badan-badan tersebut melebihi biaya yang dihabiskan? Apakah ia akan mengarah pada perluasan lebih lanjut dari badan badan tersebut?
3. *Substantive evaluation* (evaluasi yang sifatnya substantif atau nyata): Apakah program tersebut telah mencapai tujuan yang dicanangkan (menunit hukum ataupun seperti yang diutarakan dalam spesifikasi selanjutnya? Dampak apa yang dimiliki program tersebut terhadap permasalahan yang ditujunya?

Dengan mengidentifikasi tujuan-tujuan evaluasi yang berbeda-beda ini dapat dilihat bagaimana suatu program dinilai gagal oleh suatu perangkat kriteria, sementara itu di lain pihak dianggap berhasil oleh seperangkat kriteria lainnya. Dalam kenyataannya sangat mungkin apabila suatu program yang dinilai berhasil secara organisasional dan politis tidak dapat dievaluasi oleh kriteria yang nyata (substantif) dan kalaupun dapat, hasilnya diabaikan (Jones, 1991).

Menurut Agustino, (2006) dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi, ialah:

1. Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan melibatkan masyarakat. Pertama-tama harus didefinisikan siapa yang akan terkena pengaruh kebijakan; apakah orang miskin, pengusaha kecil, produsen minyak, anak sekolah, guru, atau siapa?. Kedua, perlu kiranya ditentukan dampak kebijakan yang dimaksud. Apakah memberikan pendapatan bagi kaum miskin, atau meningkatkan kesempatan bekerja mereka, atau untuk mengubah sikap dan perilaku mereka?. Jika kombinasi dari tujuan seperti itu diberikan, maka analisis menjadi lebih rumit karena prioritas harus diberikan pada pengaruh yang bermacam-macam. Lebih jauh lagi, harus dicatat pula bahwa kebijakan dapat mempunyai akibat yang diharapkan atau yang tidak diharapkan, atau bahkan keduanya. Suatu program kesejahteraan dapat pasti meningkatkan pendapatan dari kelompok yang diuntungkan, seperti yang diharapkan, tetapi apakah ada pengaruhnya pada kelompok lain? Atau apakah hal ini justru akan mengurangi keuntungan masyarakat lain?.
2. Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi dan kelompok lain; atau dapat disebut juga dengan eksternalitas atau *spillover effect*.
3. Kebijakan dapat mempunyai pengaruh dimasa mendatang seperti pengaruhnya pada kondisi yang ada saat ini. Pertanyaan yang sering muncul dalam konteks ini, ialah: Apakah kebijakan dibuat untuk situasi jangka menengah, jangka pendek, atau jangka panjang?.
4. Kebijakan dapat mempunyai dampak yang tidak langsung yang merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota diantaranya.

Pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi kebijakan tiga hal yang perlu diperhatikan: pertama, bahwa evaluasi kebijakan berusaha

untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut. Kedua, evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah publik, maka evaluasi harus menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan kebijakan tersebut benar-benar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Yang Seringkali terjadi dalam praktiknya ialah tujuan telah tercapai tetapi masalah tidak terselesaikan. Ketiga, evaluasi kebijakan berusaha juga untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi. Hasil-hasil dari penilaian evaluasi tersebut dijadikan bahan belajar bagi para pelaku kebijakan yang lain. Karena itu, oleh banyak *scholar*, fungsi kebijakan yang satu ini lebih bersifat produktif. Karena tidak lagi menekankan pada kritik terhadap kekurangan yang ada tapi lebih menjurus pada perumusan pembelajaran agar kelemahan/kekuarangan tidak terulang pada waktu dan tempat yang akan datang (Agustino, 2006).

2.4. Analisis Kebijakan

Menurut Dunn (1999) dalam Dwidjowijoto (2007), metode analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia, yaitu:

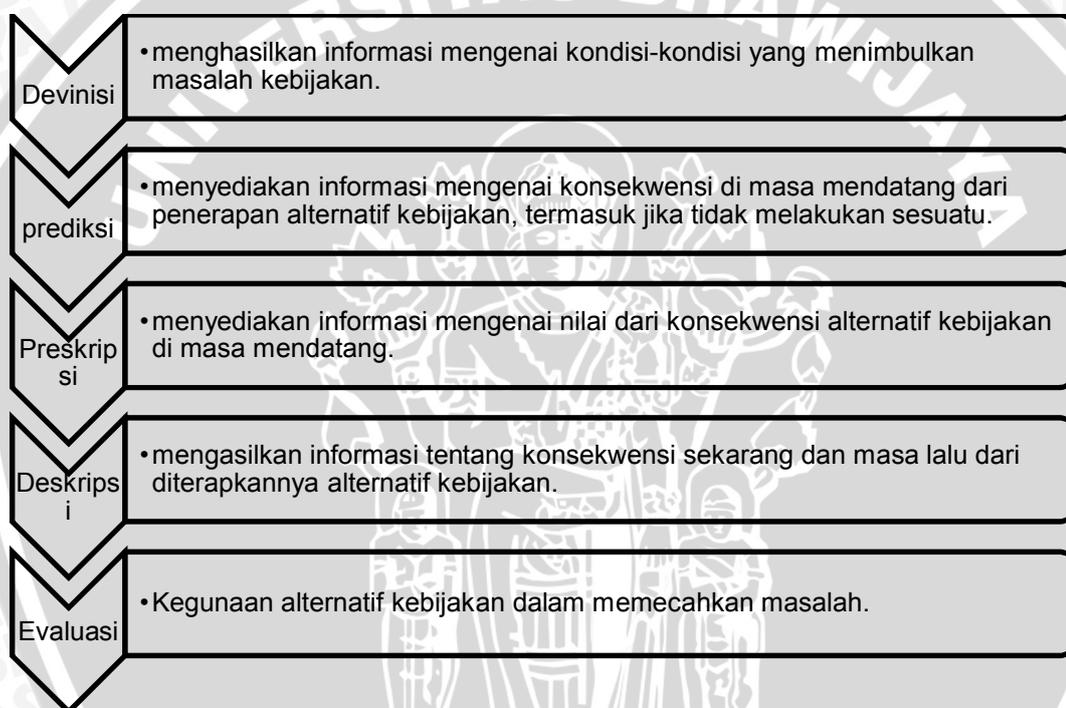
1. Definisi: Menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
2. Prediksi: Menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa datang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu.

3. Preskripsi: Menyediakan informasi mengenai nilai kon-sekuensi alternatif kebijakan di masa mendatang.
4. Deskripsi: Menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.
5. Evaluasi: Kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah.

Secara visual, prosesnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1

Metode Analisi Kebijakan William N. Dunn 1999

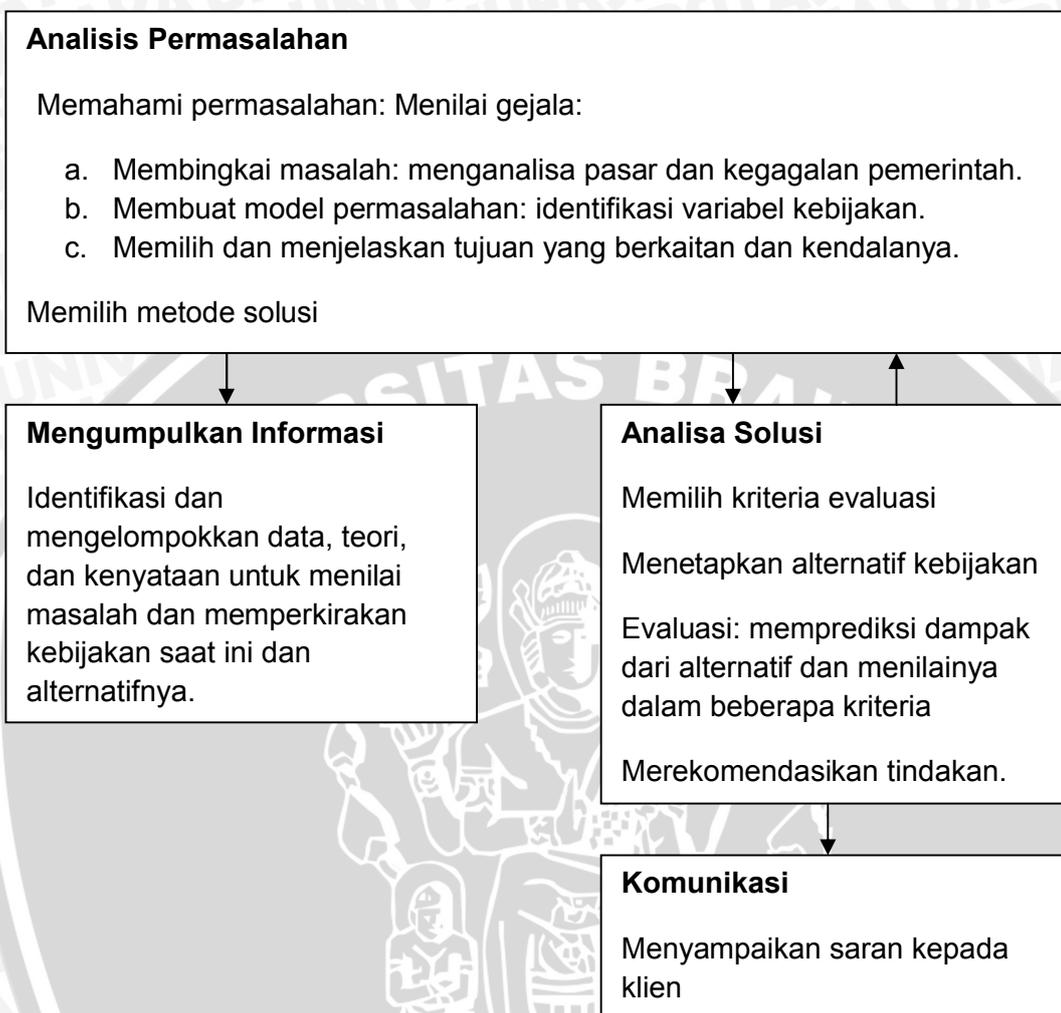


Sumber: Nugroho, Riant. 2007

Sedangkan menurut Weimar dan Vining (1999) dalam Dwidjowijoto (2007), menulis bahwa analisis kebijakan sebagai sebuah kegiatan yang mengandung tiga nilai, pragmatis (*client-oriented*), mengacu pada keputusan (kebijakan) publik, dan tujuannya melebihi kepentingan atau nilai-nilai klien, melainkan kepentingan atau nilai-nilai sosial. Proses kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2

Metode Analisi Kebijakan Weimer-Vining 1999



Sumber: Nugroho, Riant. 2007

Patton dan Savicky mengemukakan bahwa analisis kebijakan dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan. Analisis kebijakan pasca-kebijakan biasanya berbentuk deskriptif dan disebut *ex-post* (istilah Michael Carley), *post-hoc* (istilah Lineberry), atau *retrospective* (istilah William N. Dunn). Analisis kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan disebut *ex ante* (istilah Carley), *pre-hoc* (istilah Lineberry), *anticipatory* (istilah Teitz), atau *prospective* (istilah Dunn). Bentuk analisis ini dibagi menjadi dua, yaitu *prediktif* dan *preskriptif*. Analisis prediktif merujuk pada proyeksi kondisi masa mendatang sebagai hasil adopsi



kebijakan. Analisis preskripsi merujuk pada rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang bersifat umum dan tidak memberikan fokus tertentu disebut *advis*, sementara rekomendasi yang menekan pembuat kebijakan agar memilih suatu kebijakan disebut *advis persuasif* (Dwidjowijoto, 2007).

Patton dan Savicky mempromosikan enam langkah analisis kebijakan yang disebutnya *A Basic Policy Analysis Process* sebagai berikut:

Gambar 3

Metode Analisi Kebijakan Patton dan Savicky



Sumber: Nugroho, Riant. 2007

2.5. Teori Pembangunan

Menurut Siagian (1983) dalam suryono (2004), pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan demikian, ide pokok pembangunan menurut Siagian: pembangunan merupakan suatu proses;

pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan; pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; pembangunan mengarah kepada modernitas; modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Hal senada disampaikan oleh Tjokrowinoto (1987) dalam Suryono (2004) yang menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) sebagai berikut: Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*). Pembangunan memperoleh sifat dan konsep transendental, sebagai meta disciplinary phenomenon, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, *the ideology of developmentalism*.

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakekatnya, pembangunan itu harus mencerminkan terjadinya perubahan secara total suatu masyarakat atau penyesuaian system social secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok social yang ada didalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan

repository.ub.ac.id

yang serba lebih baik, baik secara material maupun spiritual (ovalhanif.wordpress.com, diakses pada 22 maret 2010).

Edward Weidner (dalam Suryono, 2004) menyebutkan adanya 8 (delapan) tipe pembangunan, yakni:

1. Tipe ideal (*ideal type*) dengan ciri perencanaan yang mampu mengendalikan pertumbuhan dan perubahan sistem;
2. Tipe menghasilkan dalam jangka pendek (*short run pay of*) dengan ciri perencanaan yang mampu mengendalikan pertumbuhan, tetapi tidak dalam perubahan sistem;
3. Tipe menghasilkan dalam jangka panjang (*long run pay of*) dengan ciri perencanaan yang mampu mengendalikan perubahan sistem, tetapi tidak dalam pertumbuhan;
4. Tipe kegagalan (*failure*) dengan ciri adanya perencanaan, tetapi tidak mampu mengendalikan baik pertumbuhan maupun perubahan sistem;
5. Tipe dorongan lingkungan (*environmental stimulus*) dengan ciri lebih mengutamakan perubahan sistem dan mengabaikan pentingnya perencanaan dan pertumbuhan;
6. Tipe pragmatis (*pragmatisme*) dengan ciri lebih mengutamakan adanya pertumbuhan dan perubahan sistem, tetapi mengabaikan pentingnya perencanaan;
7. Tipe krisis (*crisis*), dengan ciri lebih mengutamakan tingkat pertumbuhan dan mengabaikan pentingnya perencanaan dan perubahan sistem; dan,
8. Tipe masyarakat statis (*static society*), dengan ciri mengabaikan pentingnya semua aspek perencanaan, pertumbuhan, maupun perubahan sistem.

Sebagai langkah memenuhi kebutuhan dan tuntutan pembangunan dalam kerangka pengembangan dan pemerataan pembangunan wilayah nasional, maka dapat dirumuskan 3 tujuan pokok pembangunan yaitu:

1. Mengatasi kesenjangan wilayah dengan penguatan identitas lokal untuk persatuan dan kesatuan
2. Memacu pembangunan wilayah dan memantapkan pelayanan prasarana dan sarana untuk pemerataan ekonomi
3. Meningkatkan manajemen pembangunan untuk mewujudkan *good governance*. *Good governance* adalah tata kelola pemerintahan yang baik yang akan merealisasikan tujuan bangsa yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur material maupun spiritual seperti yang tercantum dalam UUD 1945 (Menteri Pemukiman, 2002).

Pengalaman menunjukkan bahwa di masa rezim yang lalu (orde baru), tingkat partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan porsinya sedikit dan hanya sekedar mobilisasi, karena sistem yang sentralistik dan *over concentration*. Keputusan yang diambil untuk pembangunan suatu wilayah, bersifat *top-down*. Akibatnya program-program pembangunan yang dilaksanakan umumnya siap pakai tanpa menunggu masukan dari bawah. Seandainya masyarakat dilibatkan secara aktif, karena merekalah yang mengetahui persis keadaan di wilayah tersebut, paling tidak dapat memperkecil kemungkinan-kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian (Djafar, 2004).

Ke depan, kehadiran masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan bangsa, tidak lagi sebagai penerima saja sesuai keinginan dari atas, Karena dengan cara-cara seperti itu, mengakibatkan *sense of belonging* dan *sense of responsibility* masyarakat sangat rendah dan mungkin tidak ada sama sekali. Untuk itu kesempatan yang sangat baik dalam era sekarang ini untuk memberikan peran seluas-luasnya kepada masyarakat guna ikut merencanakan dan menentukan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dalam pembangunan wilayahnya dengan prinsip *felt-need to real-need*. Seperti dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa masyarakat sebagai salah

satu unsur penting dalam pembangunan, maka kehadirannya bukanlah suatu hal yang luar biasa tetapi merupakan keharusan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan potensi wilayah, kebutuhan yang diperlukan, mereka lebih mengetahuinya (Djafar, 2004).

2.6. Konsep Pembangunan

Pembangunan (Emil Salim,1990) dalam Jaya, 2004 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Menurut KLH (1990) pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu : (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resources; (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.

Senada dengan konsep diatas, Sutamihardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (intergeneration equity) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable.
- b. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem

dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.

- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

2.7. Indikator Pembangunan

Salah satu tujuan pembangunan nasional menurut GBHN adalah untuk menaikkan kualitas hidup secara bertahap dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Negara secara bijaksana sebagai landasan pembangunan tahap selanjutnya (Pitono, 2010).

Indikator pembangunan dapat dilihat pada perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antarwilayah. Rendahnya pelayanan sosial dasar yang tersedia, seperti pendidikan, kesehatan dan air bersih juga terjadi aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan social seperti pasar dan tempat hiburan, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses pada permodalan, lapangan kerja, informasi, teknologi pendukung, dan pemasaran hasil-hasil produksi di perdesaan. Beberapa indicator pembangunan dapat ditandai dengan:

1. Kenaikan harapan hidup, yang berarti peningkatan kesehatan bangsa. Pembangunan pelayanan kesehatan yang makin merata dan makin luas

jangkauannya, sehingga masyarakat makin dekat akan aksesnya dengan fasilitas kesehatan. Hal ini ditandai dengan dibangunnya sentra-sentra pelayanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, puskesmas pembantu, dan juga bidan desa. Tingkat gizi yang rendah akan mempengaruhi produktivitas sehingga tingkat pendapatan akan rendah. Fasilitas kesehatan yang kurang menjangkau ke daerah terpencil di Indonesia menyebabkan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat. Fasilitas kesehatan yang lebih terjangkau oleh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan tingkat produktivitas sumber daya manusia. Penurunan biaya kesehatan disertai peningkatan mutu pelayanan kesehatan sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai salah satu hasil yang dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat miskin.

2. Pengentasan kemiskinan, yang berarti peningkatan pendapatan, perolehan, dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendidikan untuk mencerdaskan pendidikan bangsa dan peningkatan ketrampilan. Pembangunan pendidikan, yang ditandai dengan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam program pendidikan dasar maupun lanjut. Rendahnya tingkat pendidikan akan mengakibatkan rendahnya produktivitas dan berakibat pula pada rendahnya tingkat pendapatan, hal ini terus menjadi lingkaran setan. Kesenjangan tingkat pendidikan mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat pendapatan yang semakin besar. Kesenjangan ini juga akan mengakibatkan kerawanan sosial.
3. Peningkatan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan peningkatan ketrampilan. Pembangunan pendidikan, yang ditandai dengan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam program pendidikan dasar maupun lanjut. Rendahnya tingkat pendidikan akan mengakibatkan rendahnya produktivitas dan berakibat pula pada rendahnya tingkat pendapatan, hal ini

terus menjadi lingkaran setan. Kesenjangan tingkat pendidikan mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat pendapatan yang semakin besar. Kesenjangan ini juga akan mengakibatkan kerawanan sosial.

4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
5. Kesejahteraan masyarakat yang tercermin pula dari makin berkurangnya jumlah penduduk miskin.
6. Pemerataan perolehan hasil pembangunan untuk segenap lapisan masyarakat. Yang berarti akses pembangunan oleh masyarakat seperti akses jalan, komunikasi dan sarana umum lainnya (Pitono, 2010)

2.8. Pembangunan Sosial Ekonomi

Tujuan pembangunan sosial ekonomi antara lain adalah memerangi kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, menyediakan standar minimum pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, perumahan dan makanan seluruh masyarakat, memperluas kesempatan di bidang ekonomi dan sosial serta menempa persatuan bangsa (Munandar, 2000).

Pembangunan sebagai sebuah kebijakan merupakan bentuk gejala perubahan sosial yang terencana dan memiliki tujuan akhir yang pasti sama di seluruh negara di dunia ini. Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu kondisi yang ideal dan menjadi cita-cita seluruh bangsa dan masyarakatnya. Berbagai teori pembangunan telah banyak diulas oleh para ilmuwan sosial. Teori-teori pembangunan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yang berkembang secara tesis dan antitesis yang perkembangannya mengikuti wacana teori dan aksi secara berulang-ulang. Pada tahap pertama muncul teori modernisasi yang berada dalam kerangka teori evolusi. Teori ini muncul di Amerika Serikat yang mengaplikasikannya dalam program Marshal Plan. Karena ada ketidakpuasan terhadap pola pembangunan ini, maka kemudian lahir teori ketergantungan (dependency theory) yang memiliki

sisi pandang dari negara-negara dunia ketiga yang berada dalam posisi tergantung terhadap negara-negara maju. Terakhir, untuk cara pandang yang lebih sempurna, lahir teori sistem dunia (the world system theory), dimana dunia dipandang sebagai sebuah sistem yang sangat kuat yang mencakup seluruh negara di dunia, yaitu sistem kapitalisme (Munandar, 2000).

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (UU no. 11 tahun 2009).

Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai pendekatan atau kegiatan yang terorganisir dalam bidang pembangunan sosial. Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial biasanya merujuk pada arena atau field of practice tempat berkiprah berbagai profesi kemanusiaan, termasuk pekerja sosial, dokter, perawat, guru, psikolog, dan psikiater. Di negara-negara maju, social security), seperti kesejahteraan sosial sangat identik dengan jaminan sosial (public assistance dan social insurance, yang diselenggarakan negara terutama untuk disadvantaged groups) (Suharto, 2007).

Di Indonesia, kesejahteraan kaum yang kurang beruntung (sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia. Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu atau disiplin akademis yang mempelajari kebijakan sosial, pekerjaan sosial, dan program-program pelayanan sosial. Seperti halnya sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, politik, studi pembangunan, dan pekerjaan sosial, ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya. Pada masa awal perkembangannya, kesejahteraan sosial memiliki basis ilmu yang dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu sosial lain, terutama filsafat, sosiologi, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Belakangan ini, bidang studi kesejahteraan sosial telah sangat aktif menyelenggarakan berbagai proyek penelitian dan pengembangan keilmuannya yang semakin spesifik (Suharto, 2007)

2.9. Pulau

Pulau adalah massa daratan yang seluruhnya dikelilingi oleh air yang tetap terekspos sekalipun pada saat air pasang. Ukuran Pulau tersebut bervariasi mulai dari yang hanya beberapa meter persegi sampai jutaan kilometer persegi. Berdasarkan ukurannya, Pulau dapat dibedakan menjadi Pulau besar dan Pulau kecil. Batasan yang digunakan oleh Indonesia seperti tertuang dalam UU NO. 27 tahun 2007, Pulau kecil adalah Pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya. Dalam kaitannya dengan pembangunan Pulau-Pulau kecil, ada dua faktor yang menjadi penghambat, yaitu terkait dengan skala dan lokasi Pulau-Pulau kecil. Ukuran Pulau yang kecil dan pragmentasi dari gugus Pulau merupakan contoh keterbatasan dalam hal skala Pulau. Pulau-Pulau kecil memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya (darat) dan keterbatasan ruang. Hal ini menjadi hambatan fisik untuk

pembangunan infrastruktur di Pulau-Pulau kecil (Sistem informasi dan aplikasi kerentanan Pulau-Pulau kecil, DKP 2010).

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah diakui sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 2/3 wilayah kedaulatannya adalah wilayah laut dan memiliki luas 5,8 juta km² yang terdiri dari 3,1 juta km² wilayah teritorial dan 2,7 juta km² wilayah ZEEI serta memiliki 17.480 Pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km. Selain potensi fisik yang demikian besar, Indonesia di karuniai pula berbagai sumber daya hayati, non hayati dan kekayaan laut yang beraneka ragam. Sejak berlakunya konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982, maka diperlukan langkah-langkah penanganan yang menyeluruh dan terpadu dalam rangka lebih meningkatkan pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan laut dan pengelolaan wilayah laut nasional secara terpadu, serasi, efektif, dan efisien (Dewan Kelautan Indonesia, 2008).

2.10. Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan

Dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan di Indonesia dihadapkan pada kondisi yang bersifat mendua, atau berada di persimpangan jalan. Di satu pihak, ada beberapa kawasan pesisir yang telah dimanfaatkan (dikembangkan) dengan intensif. Sehingga, indikasi telah terlampauinya daya dukung atau kapasitas keberlanjutan (potensi lestari) dari ekosistem pesisir dan lautan, seperti pencemaran, tangkap lebih (*overfishing*), degradasi fisik habitat pesisir, dan abrasi pantai, telah muncul di kawasan-kawasan pesisir termaksud. Fenomena ini telah dan masih berlangsung, terutama di kawasan-kawasan pesisir yang padat penduduknya dan tinggi tingkat pembangunannya, seperti Selat Malaka, Pantai Utara Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan.

Ketimpangan pembangunan selain karena kondisi agroekologis Pulau Jawa dan Bali yang lebih subur dan nyaman untuk kegiatan usaha pertanian dan

pemukiman, juga terutama karena kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang sangat terkonsentrasi di kedua Pulau tersebut. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi serta investasi usaha jauh lebih pesat di kedua Pulau ini daripada di luar Jawa dan Bali.

Orientasi pembangunan semacam ini telah mengakibatkan tidak menarik bagi para investor, baik nasional maupun asing dan kegiatan pembangunanpun menjadi sangat rendah. Sementara itu, pengaruh pemusatan (*polarization effects*) di sepanjang pantai utara Jawa dan Bali, terutama di sekitar Jakarta dan Surabaya serta kota-kota besar lainnya, menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan dan mengancam kelestarian ekosistem pesisir.

Hal yang lebih ironis lagi adalah suatu kenyataan bahwa di samping telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran, pembangunan sumber daya kelautan masih menyisakan sebagian besar penduduk pesisir terlilit dalam kemiskinan. Padahal kenyataan membuktikan, bahwa kemiskinan seringkali memaksa manusia untuk mengeksploitasi sumber daya kelautan dengan cara-cara yang merusak kelestariannya, sekedar untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling dasar, yaitu pemenuhan pangan (Dahuri, 1996).

Hingga kini, pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia masih mengalami permasalahan yang sangat kompleks dan rumit. Kompleksitas permasalahan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tersebut dapat dilihat dari terus bermunculannya masalah-masalah tentang kelautan yang disebabkan oleh tidak adanya kebijakan kelautan yang terintegrasi dan menyeluruh. Artinya, pembangunan kelautan selama ini seolah-olah hanya menjadi tanggung Jawab salah satu departemen sehingga tidak ada koordinasi antar *stakeholder* kelautan dan perikanan lainnya.

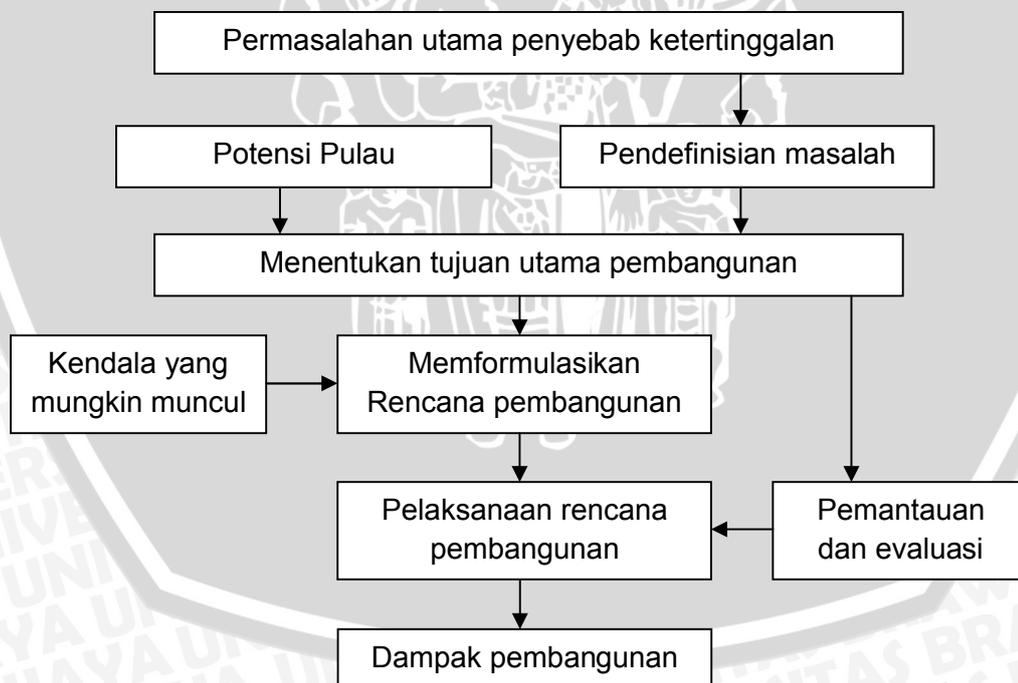
Kalau koordinasi antar instansi terkait dalam mengelola masalah kelautan dilakukan dengan baik, niscaya hasil sektor kelautan dan perikanan nasional

repository.ub.ac.id

dapat diraih secara maksimal. Keberadaan Departemen Kelautan dan Perikanan sendiri ternyata sampai saat ini belum begitu banyak memberikan suatu kontribusi yang nyata terhadap kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya terhadap kesejahteraan nelayan yang ada di Indonesia. Namun, kita pun tidak boleh mengingkari atas kerja keras departemen yang baru berumur sekitar empat tahun ini dalam menjadikan sector kelautan dan perikanan sebagai sector unggulan bangsa maritime ini (Solohin, 2005).

Dari berbagai permasalahan diatas, maka dapat ditarik satu kerangka berfikir dalam pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir dan lautan yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan berbagai aspek yang terkait didalamnya. Kerangka berfikir tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 4
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sistematis dan teliti, dengan tujuan mendapatkan pengetahuan baru atau mendapatkan susunan dan tafsiran yang baru dari pengetahuan yang telah ada, di mana sikap orang yang bertindak itu harus kritis dan prosedur yang digunakan harus lengkap (Daniel, 2002). Sedangkan menurut Sugito (1995), penelitian adalah usaha manusia secara sadar dan terencana dengan penahapan proses secara sistematis, untuk : (1) Memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan - pertanyaan praktis di lapangan (melalui teknologi baru), atau (2) Menambah khasanah ilmu pengetahuan, baik berupa penemuan teori baru atau penyempurnaan teori yang sudah ada.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Moleong 2004, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau, organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (1986) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Denzin dan Lincoln 1987 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan

latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini, para penulis masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen (Moleong, 2004)

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan berupa kata-kata dan bukan dalam angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan pengertian tentang individu dan kejadian dengan memperhitungkan konteks yang relevan. Sedangkan tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk memahami fenomena social melalui gambaran holistic dan memperbanyak pemahaman mendalam (Moleong, 2004).

Penelitian kualitatif itu berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari-dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan subjek penelitian (Moleong, 2004)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kebijakan atau sebuah keputusan yang pada umumnya untuk memecahkan masalah social. Seperti mengkaji tindakan yang dibuat oleh pemerintah dan dampak reaksi yang timbul

terhadap kebijakan tersebut dalam kenyataan di lapang. Dalam jenis deskriptif peneliti membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. sehingga tampak secara kasat mata, atau secara personal dapat ditangkap kerangka kerja, cara bertindak, dan tindakan mereka secara konkret. Dengan kata lain, dari pendekatan kualitatif ini dapat ditangkap atau diungkap aspek-aspek apa saja yang menyebabkan ketertinggalan pembangunan sehingga menyebabkan ketimpangan pembangunan, dalam hal ini adalah Pulau Gili Ketapang dengan wilayah Kecamatan Sumberasih lainnya di Kabupaten Probolinggo.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah masalah pokok yang ingin dikaji dan mencari jalan keluarnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi studi sesuai dengan tujuan awal penelitian agar hasil dari penelitian dapat terarah dan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Fokus penelitian yang ingin dikaji adalah:

1. Potensi daerah sekitar Pulau Gili Ketapang
 - Potensi perikanan
 - Prospek pariwisata
2. Keadaan sosial ekonomi masyarakat Pulau Gili.
 - Perekonomian masyarakat
 - Kehidupan sosial masyarakat
3. Pembangunan yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Probolinggo pada Pulau Gili, dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat dalam upaya pemerataan pembangunan.
 - Ketersediaan infrastruktur (pendidikan, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), dermaga, Saluran Pengadaan Air Minum (SPAM), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM),

kesehatan, Kelompok Usaha Bersama (KUB), komunikasi, dan transportasi)

- Akses terhadap pelayanan publik

4. Faktor pendukung dan penghambat pembangunan pada Pulau Gili.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi dilakukannya penelitian ini yaitu di Pulau Gili Ketapang, yang secara administratif masuk kedalam wilayah Kecamatan Sumber Asih Kabupaten Probolinggo. Dengan alasan karena melihat jauhnya ketimpangan pembangunan yang terjadi antara Pulau Gili ketapang dengan wilayah kecamatan Sumber asih lainnya. Seperti halnya akses terhadap pelayanan publik dalam hal adalah aliran listrik yang sering padam, pembangunan SPAM yang mundur dari jadwal. Pelayanan kesehatan yang belum memadai. Hal ini menarik untuk diteliti dalam kaitannya dengan program pemerintah dalam pemerataan pembangunan nasional. Pembangunan yang dimaksud disini tidak hanya pembangunan ekonomi saja, namun juga pembangunan fisik seperti jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, ibadah, serta prasarana penunjang lainnya. Dan satu yang sangat penting dalam pembangunan yaitu membangun sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaku pembangunan.

3.4. Teknik Pengambilan Data

Data adalah sesuatu yang dapat dianalisis. Jadi data tersebut tidak hanya berbentuk angka-angka, tetapi juga perilaku, sikap dan lain-lain. Tugas peneliti tidak hanya mengisi kuesioner berdasarkan Jawaban responden, tetapi juga melihat, mendengar dari hal-hal yang relevan dengan topik penelitian. Dapat pula dikatakan bahwa data adalah hasil pengamatan, manifestasi fakta, atau kejadian spesifik (Mantra, 2004).

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara (*interview*) mendalam dengan informan untuk mendapatkan informasi yang mendalam, dan observasi (pengamatan) langsung di lapang.

Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat tertentu serta pendirian mereka. Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan. Dalam wawancara alat yang digunakan adalah alat pemandu (*interview guide*). Metode ini dapat juga dikatakan sebagai wawancara semi struktural (survei semi struktural), karena alat bantu tidak lengkap seperti pada kuesioner. Panduan atau pertanyaan pada kuesioner tersusun sedemikian rupa menurut urutan dan penggolongan data yang diperlukan. Berbeda dengan percakapan, wawancara lebih didominasi oleh pewawancara. Artinya responden lebih banyak pasif, atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan (Daniel, 2002)

Menurut Narbuko (1997) observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari observasi.

3.5. Instrumen Penelitian

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Peneliti sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrumen atau alat penelitian di sini tepat karena peneliti menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian. Namun, instrumen penelitian di sini dimaksudkan sebagai alat pengumpul data seperti tes pada penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri yang menjadi instrument penelitian dan merupakan

instrumen yang paling dominan. Peneliti bekerja dan bertindak sedemikian rupa agar subjek merasa bebas menggunakan pikiran mereka mengenai topik yang ditawarkannya. Karena data harus digali secara mendalam dan rinci.

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2008).

3.6. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Menurut Indriantoro dan Supomo (1998), data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan pengamatan langsung (observasi), dan juga memberikan kuesioner kepada masyarakat. Sumber data primer antara lain dari wawancara langsung dengan penduduk setempat dan juga pemegang pemerintahan.

b. Data Sekunder

Menurut Indriantoro dan Supomo (1998) data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, misalnya dari Biro Pusat Statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Dalam pengumpulannya data sekunder ini dapat diperoleh dari instansi yang terkait seperti Kantor Kepala Desa untuk mengetahui letak desa, batas desa, mengetahui jumlah penduduk, potensi desa, fasilitas umum yang ada di desa tersebut, dan beberapa data lainnya, dari perpustakaan untuk mencari sumber beberapa literatur buku dan jurnal.

3.7. Analisa Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada di masyarakat (Mantra, 2004). Dusahakan untuk memberi suatu uraian yang deskriptif mengenai suatu kolektivitas dengan syarat bahwa representativitas harus terjamin. Tujuan utama dari penelitian yang deskriptif ialah melukiskan realitas social yang kompleks sedemikian rupa sehingga relevansi sosiologis/antropologis dapat tercapai. Klasifikasi yang dipakai bertujuan untuk menyederhanakan realitas sosial yang kompleks sehingga dapat "ditangkap" bagi suatu analisa yang lebih lanjut. Secara populer dapat dikatakan bahwa klasifikasi bertujuan untuk mencapai penertiban yang analitis dalam gejala-gejala sosial yang kompleks.

Pada hakekatnya mencoba untuk menempatkan realitas sosial yang diteliti ke dalam konsep-konsep yang telah dikembangkan oleh sosiolog dan antropolog, lagipula jika perlu kita menciptakan konsep-konsep yang baru kalau ternyata bahwa realitas sosial tertentu kurang tepat disifatkan oleh konsep-konsep yang telah ada. Jadi penelitian deskriptif memanfaatkan, maupun menciptakan, konsep-konsep ilmiah, sekaligus pula berfungsi dalam mengadakan suatu klasifikasi mengenai gejala-gejala sosial yang dipersoalkan (Vredenburg, 1978).

Setelah data dikumpulkan maka tahap berikut ialah mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat diadakan suatu analisa. Penelitian diadakan dengan satu tujuan pokok, yakni menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk mengungkap fenomena sosial atau alami tertentu. Untuk mencapai tujuan pokok ini peneliti merumuskan hipotesa, mengumpulkan data, memroses data, membuat analisa dan interpretasi. Setelah data dikumpulkan maka tahap berikut ialah mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat diadakan suatu analisa (Sugiyono, 2007).

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, Catalan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2007).

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori (Sugiyono, 2007).

Setelah data dianalisa dan informasi yang lebih sederhana diperoleh, hasil-hasilnya harus diinterpretasi untuk mencari makna dan implikasi yang lebih luas dari hasil-hasil penelitian. Interpretasi atau inferensi ini dilakukan dengan dua cara. Pertama interpretasi secara terbatas karena peneliti hanya melakukan interpretasi atas data dan hubungan yang ada dalam penelitiannya. Ini adalah interpretasi dalam pengertian sempit, tetapi yang paling sering dilakukan. Peneliti secara otomatis membuat interpretasi sewaktu menganalisa data. Disini analisa dan interpretasi sangat erat hubungannya karena keduanya dilakukan hampir secara bersamaan (Sugiyono, 2007).

Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yaitu menjelaskan dan menganalisis dampak sosial ekonomi ketimpangan pembangunan yang telah terjadi di Pulau Gili Ketapang. Dengan acuan standar pelayanan publik yang dikeluarkan pemerintah yaitu pelayanan kewarganegaraan, kesehatan,

pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk mewujudkan *Good Governance*.

3.8. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

Penerapan kriterium derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriterium ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kriterium keteralihan berbeda dengan validitas eksternal dari nonkualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu.

Kriterium kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengada-kan replikasi studi. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai. Persoalan yang amat sulit dicapai di sini ialah bagaimana mencari kondisi yang benar-benar sama. Kriterium kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antarsubjek. Di sini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan

beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang (Moleong, 2004).

Untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh diperlukan beberapa teknik, adapun tekniknya adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal itu dilakukan maka akan membatasi: membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks, dan juga akan membatasi kekeliruan (biases) peneliti, mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.
2. Keajegan Pengamatan, berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
3. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat

melakukannya dengan jalan: mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

4. pemeriksaan seJawat merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan yang sebaya, yang memiliki pengetahuan urnuni yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat me-review persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan. Jika hal itu dilakukan maka hasilnya adalah: menyediakan pandangan kritis, mengetes hipotesis kerja (temuan-teori substantif), membantu mengembangkan langkah berikutnya, melayani sebagai pembanding (Moleong, 2004).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur berada pada posisi lintang 112°50' – 113°30' Bujur Timur (BT) dan 7°40' – 8°10' Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah sekitar 169.616,65 Ha atau + 1.696,17 km² (1,07 % dari luas daratan dan lautan Propinsi Jawa Timur).

Wilayah Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember
- Sebelah Barat : Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang
- Sedangkan di sebelah Utara bagian tengah terdapat Daerah Otonom yaitu Kota Probolinggo. Secara rinci dapat dilihat pada gambar 1, tentang peta Kabupaten Probolinggo.

Dengan rincian sebagai berikut :

- Permukiman : 147,74 Km²
- Persawahan : 373,13 Km²
- Tegal : 513,80 Km²
- Perkebunan : 32,81 Km²
- Hutan : 426,46 Km²
- Tambak/Kolam : 13,99 Km²kehis
- Pulau Gili Ketapang : 0,60 Km²

cukup tinggi terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret dengan rata-rata curah hujan + 360 mm per hari hujan. Diantara dua musim tersebut terdapat musim pancaroba yang biasanya ditandai dengan tiupan angin kering yang cukup kencang yang berhembus dari arah Tenggara ke Barat Laut biasa disebut "Angin Gending".

Selain itu Kabupaten Probolinggo memiliki beberapa obyek wisata yaitu Gunung Bromo, Air Terjun Madakaripura, Pulau Gili Ketapang dengan taman lautnya, Pantai Bentar, Arum Jeram Sungai Pekalen, Ranu Segaran dan Sumber Air Panas serta Candi Jabung yang mencerminkan kejayaan masa lalu. Adapun pembagian wilayah administratif, secara yuridis formal dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, yang terdiri dari 24 wilayah Kecamatan, 325 Desa dan 5 Kelurahan, 1.642 Rukun Warga (RW) dan 5.864 Rukun Tetangga (RT).

Secara topografi Kabupaten Probolinggo mempunyai ciri fisik yang menggambarkan kondisi geografis, terdiri dari dataran rendah pada bagian utara, lereng-lereng gunung pada bagian tengah dan dataran tinggi pada bagian selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah yang berbeda. Bentuk permukaan daratan diklasifikasikan atas 3 (tiga) jenis, yaitu :

- Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0-100 M diatas permukaan air laut, daerah ini membentang di sepanjang pantai utara mulai dari Barat ke arah Timur kemudian membujur ke Selatan.
- Daerah perbukitan dengan ketinggian 100-1.000 M diatas permukaan air laut, daerah ini terletak di wilayah bagian Tengah sepanjang kaki Gunung Semeru dan Pegunungan Tengger serta pada bagian Utara sisi bagian Timur sekitar Gunung Lamongan.

- Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 M dari permukaan air laut, daerah ini terletak di sebelah barat daya yaitu sekitar Pegunungan Tengger dan disebelah Tenggara yaitu di sekitar Pegunungan Argopuro.

Untuk wilayah pegunungan terdiri dari Gunung Bromo, Widodaren, Gilap, Gambir, Jombang, Cemoro Lawang, Malang, Batuajar dan Argopuro. Sedangkan jumlah sungai yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo antara lain terdiri dari Sungai Pekalen, Pancarglagas, Krasak, Kertosuko, Rondoningo, Pendil, Gending, Banyubiru, Ronggojalu, Kedunggaleng dan Patalan. Sungai terpanjang adalah Rondoningo dengan panjang 95,2 Km, sedangkan sungai terpendek adalah Afour Bujel dengan panjang hanya 2 Km saja. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Probolinggo tersebut sangat dipengaruhi oleh iklim yang berlangsung tiap tahun.

2. Keadaan Masyarakat Kabupaten Probolinggo

Jumlah Penduduk Kabupaten Probolinggo berdasarkan penghitungan BPS pada tahun 2008 sebanyak 1.092.036 jiwa terdiri dari laki-laki 523.652 jiwa atau sekitar 47% dan perempuan 568.384 jiwa atau sekitar 53%, dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,01 %. Adapun tingkat kepadatan penduduk rata-rata 644 jiwa/Km² dengan tingkat kepadatan tertinggi di Kecamatan Sumberasih sebesar 1.907 jiwa/Km² dan tingkat kepadatan terendah sebesar 186 jiwa/Km² di Kecamatan Sumber. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam 95,40 %, Kristen/Protestan 1,46 %, Katolik 1,45 %, Budha 0.08 %, sedangkan masyarakat yang beragama Hindu 1,50 % tersebar di Kecamatan Sumber dan Sukapura.

Berdasarkan karakteristik daerah lebih dari 60 % mata pencaharian penduduk bekerja di sektor pertanian, sedangkan untuk daerah pantai seperti di Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan dan

Paiton sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan daerah pegunungan memungkinkan untuk pengembangan tenaga kerja pada sektor perkebunan dengan berbagai komoditinya. Dari perkembangan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tersebut, semakin lama peranannya cenderung menurun dan tergeser oleh sektor non pertanian seperti industri, perdagangan dan jasa yang cenderung meningkat.

Masyarakat kabupaten probolinggo terdiri dari beberapa suku yang mendiami daerah pegunungan dataran tinggi, dataran rendah, dan juga Pulau. Suku bangsa tersebut terdiri dari suku Jawa, suku Madura, dan suku Tengger. Mereka menggunakan berbagai bahasa berdasarkan komunitas mereka. Untuk mereka yang tinggal di daerah lereng gunung Bromo dan dataran tinggi di sekitarnya, yaitu suku Tengger menggunakan bahasa tengger yang hampir sama dengan bahasa suku Osing di Banyuwangi. Untuk mereka yang tinggal di dataran rendah menggunakan dua bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Madura. Karena didaerah ini telah membaaur antara masyarakat suku Jawa dan suku Madura. Sedangkan mereka yang tinggal di daerah Pulau Gili Ketapang menggunakan bahasa Madura. Karena hamper seluruh masyarakat Pulau ini adalah keturunan Madura.

Adapun persentase mata pencaharian penduduk Kabupaten Probolinggo, adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Jenis Pekerjaan Masyarakat Kabupaten Probolinggo

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Petani	504.520	46,2 %
2.	Buruh Tani	404.053	37,0 %
3.	Nelayan	8.736	0,8 %
4.	Petani Tambak	21.840	2,0 %
5.	Pedagang/Pengusaha	70.982	6,5 %
6.	Buruh Industri/Bangunan/Pertambangan	29.484	2,7 %
7.	PNS/ABRI	24.024	2,2 %
8.	Pengrajin	4.368	0,4 %
9.	Pensiunan	6.552	0,6 %
10.	Lain-lain	17.472	1,6 %
Jumlah		1.092.036	100 %

Sumber: www.probolinggokab.go.id

3. Pembangunan Di Kabupaten Probolinggo

Secara umum pencapaian pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Probolinggo, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat luas menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini antara lain tercermin dari besarnya kontribusi sektor pembangunan dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun Income Per Kapita. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan gambaran dari aktifitas perekonomian masyarakat di daerah yang juga digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan indikator PDRB Atas Dasar Harga Konstan pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 5 (lima) tahun menunjukkan peningkatan. Pada

tahun 2004 pertumbuhannya sebesar 4,45 % dan pada tahun 2005 menurun menjadi 4,43 %. Untuk selanjutnya pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,69 %. Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,97 %. Pada tahun 2008 PDRB Kabupaten Probolinggo diperkirakan mencapai 6 %. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi tersebut memberikan dampak terhadap nilai pendapatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa naiknya pertumbuhan ekonomi tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Probolinggo.

Tingginya tingkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu dimulai dari mantapnya pemahaman dari para aparat terkait tentang makna indikator-indikator dan variable-variabel pembangunan serta pengertian kebijaksanaan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, dimana kedua kebijaksanaan tersebut harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Pemahaman yang memadai tentang indikator pembangunan daerah ini akan mengakibatkan semakin terarahnya pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dan semakin tingginya respons masyarakat dalam menyukseskan dan mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian terutama dari pihak-pihak pengambilan keputusan.

Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Pembangunan tergantung dari suatu innerwill, proses emansipasi diri. Dan suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan hanya menjadi mungkin karena proses pendewasaan. Pada pokoknya suatu usaha perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan atau kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik dan lebih diinginkan. Artinya ada perubahan dari yang ada sekarang

dengan segala kekurangannya menjadi lebih baik, minimal ada “progress” dari kondisi yang sekarang ini.

Perubahan-perubahan dalam masyarakat yang bersifat menyeluruh tersebut, dapat dikembangkan secara sadar oleh pemerintah, yang sebaiknya pula mewakili kekuatan-kekuatan pembaharuan di dalam masyarakat. Hal ini sudah pasti sudah sesuai dengan paradigma yang diinginkan yaitu paradigma pembangunan yang partisipatif yang lebih mengarah kepada aspirasi dari akar rumput. Akan tetapi pada akhirnya supaya perubahan-perubahan itu mempunyai kemampuan berkembang yang dinamis, perlulah diperhatikan agar proses tersebut didukung dan dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pembaharuan dan pembangunan yang timbul dan bergerak di dalam masyarakat bangsa itu sendiri. Hal ini sangat penting, jangan sampai proyek pembangunan jalan di lokasi terpencil hanya pernah dilalui oleh mobil, yang bertugas mengantarkan material ke daerah tersebut, tanpa menjadi sarana transportasi yang memudahkan masyarakat menyalurkan hasil produksinya ke pasar.

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur social, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakekatnya, pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian system social secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada didalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba “lebih baik”, secara material maupun spiritual.

Beberapa indikator pembangunan dapat dilihat dari kenaikan harapan hidup, yang berarti peningkatan kesehatan. Pembangunan pelayanan kesehatan

yang makin merata dan makin luas jangkauannya, sehingga masyarakat makin dekat akan aksesnya dengan fasilitas kesehatan. Hal ini ditandai dengan dibangunnya sentra-sentra pelayanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, puskesmas pembantu, dan juga bidan desa. Tingkat gizi yang rendah akan mempengaruhi produktivitas sehingga tingkat pendapatan akan rendah. Fasilitas kesehatan yang lebih terjangkau oleh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan tingkat produktivitas sumber daya manusia. Penurunan biaya kesehatan disertai peningkatan mutu pelayanan kesehatan sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai salah satu hasil yang dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat miskin.

Pengentasan kemiskinan, yang berarti peningkatan pendapatan, perolehan, dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendidikan untuk mencerdaskan pendidikan bangsa dan peningkatan ketrampilan. Pembangunan pendidikan, yang ditandai dengan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam program pendidikan dasar maupun lanjut. Rendahnya tingkat pendidikan akan mengakibatkan rendahnya produktivitas dan berakibat pula pada rendahnya tingkat pendapatan, hal ini terus menjadi lingkaran setan. Kesenjangan tingkat pendidikan mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat pendapatan yang semakin besar. Kesenjangan ini juga akan mengakibatkan kerawanan sosial.

Peningkatan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan peningkatan ketrampilan. Pembangunan pendidikan, yang ditandai dengan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam program pendidikan dasar maupun lanjut. Rendahnya tingkat pendidikan akan mengakibatkan rendahnya produktivitas dan berakibat pula pada rendahnya tingkat pendapatan, hal ini terus menjadi lingkaran setan. Kesenjangan tingkat pendidikan mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat pendapatan yang semakin besar. Kesenjangan ini juga akan mengakibatkan kerawanan sosial. Pemerataan perolehan hasil

pembangunan untuk segenap lapisan masyarakat. Yang berarti akses pembangunan oleh masyarakat seperti akses jalan, komunikasi dan sarana umum lainnya.

a. Pembangunan Kesehatan

Derajat kesehatan suatu daerah dapat dilihat dari seberapa baik unsur kualitas hidup dan unsur mortalitas serta unsur-unsur yang mempengaruhinya seperti morbiditas dan status gizinya. Angka harapan hidup waktu lahir merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup (AHH) masyarakat. Sementara untuk mortalitas, ada lima indikator yang dijadikan ukuran yaitu, angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian anak balita (AKAB) per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian pneumonia pada balita per 1.000 balita, angka kematian diare pada balita per 1.000 balita dan angka kematian ibu melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, untuk morbiditas yang dipakai ukuran adalah angka kesakitan demam berdarah dengue (DBD) per 100.000 penduduk, angka kesakitan malaria per 1.000 penduduk, persentase kesembuhan TB Paru, persentase penderita HIV/AIDS terhadap penduduk beresiko dan angka acute flaccid paralysis (AFP) pada anak usia < 15 tahun per 100.000 anak. Sementara untuk status gizi menggunakan indikator persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), persentase anak balita dengan gizi baik, prevalensi anemia gizi, prevalensi gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY). Angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Probolinggo berangsur-angsur naik. Hasil survei indeks pembangunan manusia yang dikeluarkan UNDP dan BPS tahun 2005 menyebutkan, AHH Kabupaten Probolinggo tahun 1996 tercatat 58,8 tahun, tahun 2002 naik menjadi 60,15 tahun, tahun 2004 naik lagi menjadi 60,47 tahun dan tahun 2005 naik menjadi 61,08 tahun.

Menyongsong Indonesia Sehat 2010, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, telah menetapkan angka harapan hidup sebesar 70 tahun pada tahun 2010 mendatang. Penambahan usia harapan hidup waktu lahir menunjukkan telah terjadinya peningkatan kemampuan penduduk dalam memperbaiki kualitas hidup dan lingkungan. Peningkatan kualitas hidup akan sebanding dengan peningkatan status sosio-ekonomi keluarga. Sedangkan kualitas lingkungan, biasanya berkaitan dengan kesadaran masyarakat untuk hidup dalam lingkungan fisik yang lebih baik.

Disamping itu, angka harapan hidup berhubungan dengan angka kematian bayi. Semakin rendah angka kematian bayi maka angka harapan hidupnya semakin tinggi. Dengan demikian, menurunkan angka kematian bayi adalah sesuatu yang mutlak untuk meningkatkan angka harapan hidup. Bayi merupakan kelompok umur yang paling peka terhadap aspek-aspek kesehatan karena sistem pertahanan tubuh yang belum sempurna menyebabkan bayi mudah terkena penyakit terutama infeksi. Oleh karena itu angka kematian bayi digunakan sebagai indikator mengukur derajat kesehatan masyarakat dan perkembangan sosial masyarakat, karena di dalamnya tampak aspek gizi, kesehatan masyarakat dan keadaan lingkungan.

b. Pembangunan Ekonomi

Potensi perikanan tangkap dan budidaya perikanan, terutama air tawar di kab probolinggo cukup bagus. Namun hingga kini tak semua masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada. Padahal jika dikembangkan dengan serius potensi ini dapat menambah pendapatan masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo dalam pengembangan budidaya air tawar ini adalah pengembangan budidaya ikan lele, guna mewujudkan Mina Politan di Kabupaten Probolinggo di tahun 2010. Mina politan merupakan salah satu pengembangan budidaya ikan lele berbasis

kelompok, untuk saat ini baru dapat kita jumpai di Desa Triwungan, Kecamatan kota anyar. Ikan lele ini telah dikembangkan kelompok mina sejahtera desa setempat sejak maret 2009 lalu. Hingga kini anggotanya sudah berjumlah 22 orang dengan kolam sebanyak 50 buah.

Potensi di sektor perikanan dan kelautan Kab.Prob boleh dibilang berlimpah dan akan menjadi sumber pendapatan yang menggiurkan bila digarap maksimal, apalagi dilengkapi dengan sentuhan teknologi canggih. Kondisi ini didukung luasan tangkapan ikan di laut yang mencapai 120.000 km dengan panjang garis pantai 1.331 Km ditambah periaran nusantara dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Bagaimana Pemprop menggarap potensi sektor ini, sehingga menjadi potensi yang menggiurkan untuk dikelola untuk menghasilkan keuntungan. Data produksi penangkapan ikan di laut tahun 2006 menunjukkan angka sebesar 121.494 ton yang diambil dari hasil penangkapan di kawasan perairan Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu sama sama 30,6 ton persen, Tanah Laut (Tala) 30,4 persen, dan Kabupaten Banjar 5,7 persen, Batola 1,8 persen, dan Kota Banjarmasin 0,9 persen.

Peluang usaha yang baik untuk usaha penangkapan di laut adalah melalui armada penangkapan dengan kemampuan lebih dari 30 GT. Artinya penangkapan yang lebih jauh dapat dilakukan, dengan memanfaatkan sumber ikan lepas pantai dan ZEE. Selain itu juga dapat melebarkan diversifikasi alat tangkap ikan. Di sektor lain, pengembangan budidaya di laut di Kab.Prob diukur sepanjang 5 Km dari pantai adalah seluas sekitar 107 Ha. Lokasinya sekitar 5.705 dan saat ini telah dimanfaatkan untuk usaha biddaya rumput laut sebesar 4,5 Ha di tahun 2006. dengan jumlah produksi mencapai 316 ton. Ditambah dengan produksi kerapu mencapai 15,3 ton.

Peluang usaha budidaya rumput laut ini masih terbuka lebar. Mengingat lahan usaha masih luas. Namun kendala utamanya adalah pemasaran, hal ini

tidak lepas dari lokasi yang terisolir dan kondisi prasarana transportasi yang belum memadai bagi pengembangan ekonomi kawasan setempat. Sementara itu potensi ikan di air payau memiliki luas lahan tambak yang potensial di Kalimantan Selatan ini mencapai 84.998 ha. Tempatnya tersebar di pantai Tongas, Dringu, Pajarakan, Kraksaan dan kec. Paiton. Luasnya di Tongas 15.505 ha, Dringu 13.098 ha, Pajarakan 52.900 ha, Kraksaan 250 ha, dan Paiton 3.245 ha. Dari luas lahan tersebut, dimanfaatkan sebesar 10.322,8 ha. Dengan total produksi usaha budidaya tambak pada tahun 2006 sebanyak 2.500 ton. Produksi di kec. Tongas mencapai 29,9 persen, Tala 41,4 persen dan Batola 17,9 persen.

Sektor pertanian mendominasi kegiatan perekonomian. Beberapa subsektor pertanian yang potensial dikembangkan adalah pertanian tanaman pangan, sayur-sayuran, tanaman buah, tanaman perkebunan, dan usaha peternakan. Komoditi tanaman bahan pangan yang potensial dikembangkan adalah padi dan palawija. Panen padi dengan luas terbesar terdapat di Kecamatan Kraksaan, namun produktivitas padi tertinggi berada di Kecamatan Paiton. Secara umum produksi padi terkonsentrasi di Kecamatan Kraksaan, Gending, dan Maron. Tanaman jagung terdapat di Kecamatan Krucil dan Banyuwangi. Komoditi ubi kayu banyak berada di Kecamatan Tiris, Kuripan, dan Pakuniran.

Untuk jenis tanaman hortikultura, Probolinggo dikenal sebagai sentra tanaman bawang merah. Pengembangan klaster bawang merah dapat dilakukan di tiga kecamatan penghasil utama bawang merah yaitu Dringu, Tegalsiwalan, dan Gending. Jenis tanaman sayur-sayuran yang potensial adalah kentang dan kobis. Produksi kobis terkonsentrasi di Kecamatan Krucil dan Sukapura, dan kentang banyak dihasilkan di Kecamatan Sukapura dan Sumber. Tanaman buah-buahan yang berpotensi dikembangkan adalah alpukat, mangga, dan

pisang. Sentra komoditi alpukat di Kecamatan Tiris. Mangga banyak terdapat di Kecamatan Tongas, Maron, dan Gading. Produksi pisang terkonsentrasi di Kecamatan Krejengan, Maron, dan Krucil.

Tanaman perkebunan yang potensial dikembangkan menjadi komoditi andalan adalah kelapa, tembakau, dan tebu. Produksi kelapa banyak berada di Kecamatan Tiris, Gading, dan Banyuwang. Perkebunan tembakau banyak ada di Kecamatan Paiton, Krejengan, dan Besuk. Dan produksi tebu terkonsentrasi di Kecamatan Maron, Pajarakan, dan Gending. Di sektor perdagangan, data yang ada mencatat jumlah hotel di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2006 sebanyak 18 hotel, dengan 525 jumlah kamar dan terdapat 159 unit restoran/rumah makan. Hotel dan akomodasi terbanyak ada di Kecamatan Sukapura. Hal ini karena di wilayah ini berada obyek wisata terkenal dan primadona di Jawa Timur yaitu Gunung Bromo. Di Kecamatan Kraksaan sebagai ibukota kabupaten juga tersedia beberapa fasilitas akomodasi.

Di sektor industri, data yang ada mencatat pada tahun 2006 terdapat 15 industri besar dan 38 industri sedang di Kabupaten Probolinggo. Bidang usaha industri yang cukup menonjol di antaranya industri pangan, sandang dan kulit, kerajinan umum, kimia dan bahan bangunan, dan industri logam. Industri pangan terkonsentrasi di Kecamatan Tiris, Paiton, dan Pakuniran. Industri sandang dan kulit banyak terdapat di Kecamatan Pajarakan, Krejengan, dan Gading. Industri kerajinan umum banyak dihasilkan di Kecamatan Tiris, Sumberasih, Pakuniran. Industri kimia dan bahan bangunan terkonsentrasi di Kecamatan Leces dan Besuk. Sedangkan industri logam banyak terdapat di tiga kecamatan yaitu Gading, Banyuwang, dan Wonomerto.

Dengan potensi yang begitu banyak di berbagai bidang tersebut, mulai dari potensi perikanan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap, potensi pertanian yang sangat besar. Selain itu juga banyaknya investasi modal

yang ditanamkan pihak swasta dengan mendirikan industry di Kabupaten Probolinggo. Sehingga potensi tersebut diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja, yang banyak tersedia. Yang ahirnya mampu mengangkat pendapatan perkapita dan akan langsung berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.

c. Pembangunan Pendidikan

Pendidikan pada hakikatnya berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, secara hakiki, pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan, pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, di dalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, masyarakat, dan warga negara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Karena itu, manajemen sistem pembangunan pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secara terpadu, serta diarahkan pada peningkatan akses pelayanan yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat, dengan mengutamakan mutu, efektivitas dan efisiensi.

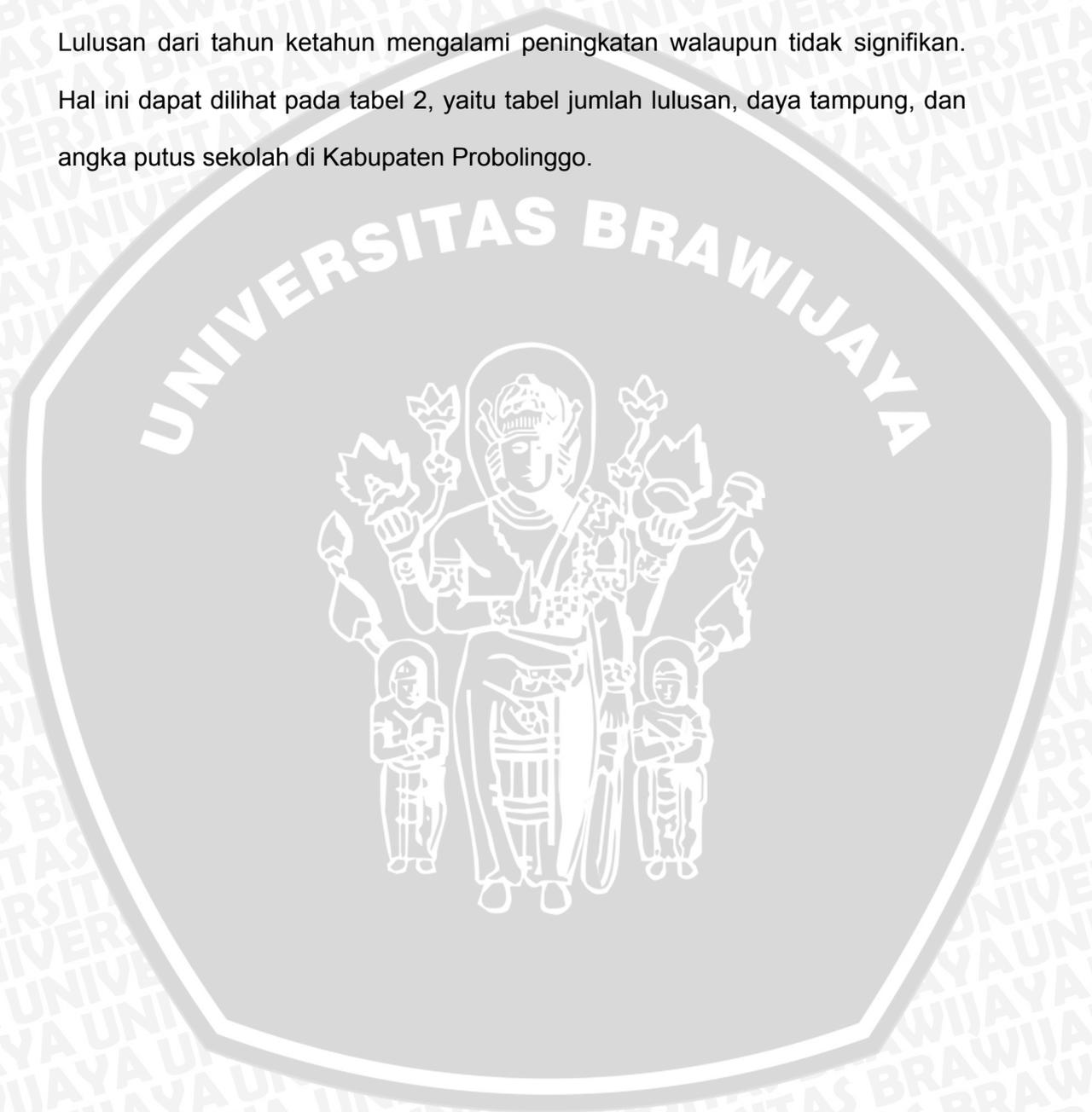
Kenyataan ini sudah lebih dari cukup untuk mendorong pakar dan praktisi pendidikan melakukan kajian sistematik untuk membenahi atau memperbaiki sistem pendidikan nasional. Agar keluaran sekolah mampu beradaptasi secara dinamis dengan perubahan dan tantangan itu, pemerintah melontarkan berbagai kebijakan tentang pendidikan yang memberikan ruang yang luas bagi sekolah dan masyarakatnya untuk menentukan program dan rencana pengembangan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Hal ini sejalan dengan gagasan desentralisasi pengelolaan pendidikan, maka fungsi-fungsi pengelolaan sekolah perlu diberdayakan secara maksimal agar dapat berjalan

secara efektif untuk menghasilkan mutu lulusan yang diharapkan oleh masyarakat dan bangsa.

Peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada perbaikan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang didukung oleh tenaga kependidikan yang kompeten, sarana dan prasarana yang standar, serta iklim dan suasana sekolah yang kondusif melalui. Peningkatan proses pembelajaran yang dapat memberikan kemampuan dasar (competency-based) dan berorientasi pada kecakapan hidup (life skills oriented), menerapkan konsep belajar tuntas (mastery learning), dan membangkitkan sikap kreatif, inovatif, demokratis dan mandiri bagi para siswa. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan (khususnya guru dan kepala sekolah) sesuai dengan kebutuhan mereka melalui pendidikan dan pelatihan.

Pemenuhan bahan, alat peraga, dan media pendidikan, termasuk fasilitas belajar lainnya yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Rehabilitasi sekolah-sekolah yang tidak layak pakai dan pemenuhan standar minimal pembiayaan pendidikan, agar sekolah dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara optimal. Peningkatan manajemen sekolah yang lebih profesional melalui pendekatan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sebagai upaya pemberian otonomi pedagogis kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik untuk meningkatkan prestasi siswa dan kinerja sekolah. Pembangunan sentra-sentra unggulan pendidikan di setiap kabupaten/kota, baik yang berorientasi unggulan lokal, nasional, atau internasional. Peningkatan penjaminan dan kontrol mutu pendidikan (standar nasional pendidikan, akreditasi sekolah) untuk menjamin tingkat kelayakan satuan pendidikan dalam memberikan program layanan pendidikan kepada masyarakat luas.

Pembangunan pendidikan di Kabupaten probolinggo dari tahun ke tahun mengalami penigkatan. Hal ini membuktikan bahwa terjadi peningkatan kualitas maupun kuantitas pendidikan di Kabupaten Probolinngo dari tingkatan terendah yaitu SD dan sederajat, SMP dan sederajat, serta SMA dan sederajat. Jumlah Lulusan dari tahun ketahun mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2, yaitu tabel jumlah lulusan, daya tampung, dan angka putus sekolah di Kabupaten Probolinggo.



Tabel 2

Jumlah Lulusan, Daya Tampung dan Angka Putus Sekolah

NO.	URAIAN	SATUAN	2006	2007	2008
1.	Lulusan SD	Orang	16.457	16.231	16.477
	Lulusan SD	Orang	12.394	12.282	12.466
	Lulusan MI	Orang	4.031	3.913	3.972
	Lulusan SLB	Orang	22	24	26
	Lulusan SDLB	Orang	10	12	13
2.	Lulusan SD yang diterima SMP	Orang	13.216	13.115	13.312
3.	Jumlah Droup Out (DO) Tingkat SD/MI	Orang	135	73	78
	Jumlah Droup Out (DO) SD	Orang	90	54	56
	Jumlah Droup Out (DO) MI	Orang	45	19	22
4.	Angka Transisi SD ke SMP	Prosen	80,31	80,08	80,81
5.	Jumlah Lulusan Tingkat SMP	Orang	8.443	4.980	5.055
	Lulusan SMP	Orang	5.001	2.970	3.015
	Lulusan MTs	Orang	3.442	2.010	2.040
6.	Lulusan SMTP yang diterima SMA	Orang	6.569	2.205	2.238
7.	Jumlah Droup Out (DO) SMP	Orang	10	16	17
8.	Angka Transisi SMTP ke SMA	Prosen	77,81	78,95	79,09

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo

Angka buta aksara di Kabupaten Probolinggo ternyata masih tinggi. Bahkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kabupaten menempati urutan keenam se Indonesia sebagai daerah dengan angka buta aksara tertinggi. Yakni, mencapai 147.170 orang. Kabupaten Probolinggo menempati urutan ke-enam

se-Indonesia yang penduduknya masih buta aksara. Dari data terakhir dinas, jumlah penduduk yang buta aksara di kabupaten cukup merata. Setiap kecamatan mempunyai penduduk yang masih buta aksara. Yang paling banyak adalah daerah-daerah di dataran tinggi. Untuk kategori usia 45 tahun ke atas, jumlah orang buta aksara terbanyak berasal dari Kecamatan Kotaanyar, sebanyak 5.606 orang. Disusul kecamatan Sukapura 2.962 orang dan Sumber 2.000 orang.

Untuk kategori umur 15 - 45 tahun, daerah yang paling banyak menyumbang penduduk buta aksara adalah kecamatan Kuripan. Yakni, 4.093 orang. Disusul Kecamatan Maron 2.675 orang. Namun khusus untuk buta aksara usia 14 tahun ke atas, sudah ada penanganan dari dinas. Mereka bahkan telah mendapat surat keterangan melek aksara 1 (sukma) atau tahap pertama pemberatasan buta aksara. Sertifikat sukma 1 tersebut diperoleh tahun 2007. Namun mereka belum bisa melanjutkan ke sukma 2, karena keterbatasan anggaran. Untuk penanganan buta aksara ini pemerintah pusat telah menyiapkan program keaksaraan fungsional (KF).

Perkembangna jumlah sekolah di Kabupaten probolinggo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari segi jumlah dan juga kualitas pendidikan. Hal ini dapat dilihat alam tabel 3 yang menunjukkan perkembangan jumlah TK dan SD, sedangkan tabel 4 menunjukkan perkembangan jumlah SMP dan SMA di Kabupaten Probolinggo dari tahun 2006, 2007 dan 2008.

Tabel 3

Perkembangan Jumlah TK dan SD di Kabupaten Probolinggo

NO.	URAIAN	SATUAN	2006	2007	2008
1.	- TK	Unit	356	340	340
	- TKLB	Unit	1	1	1
	- RA	Unit	288	294	298
	Jumlah Sekolah Setingkat TK	Unit	645	635	639
2.	- SD	Unit	618	631	632
	- SDLB	Unit	3	3	4
	- Kejar Paket A	Unit	20	10	15
	- MI	Unit	371	382	389
	- Ula	Unit	37	37	39
	Jumlah Sekolah Setingkat SD	Unit	1.049	1.063	1.079

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo



Tabel 4

Perkembangan Jumlah SMP dan SMA di Kabupaten Probolinggo

1.	- SMP	Unit	91	84	134
	- SMPLB	Unit	1	1	1
	- SMPT	Unit	21	21	21
	- SD – SMTP Satu Atap	Unit	9	9	10
	- Kejar Paket B	Unit	55	45	46
	- MTs	Unit	122	123	120
	- Wustho	Unit	49	49	49
	Jumlah Sekolah Setingkat SMP	Unit	348	332	381
2.	- SMTA	Unit	25	25	29
	- SMTALB	Unit	1	1	1
	- SMP-SMTA Satu Atap	Unit	4	4	4
	- SMK	Unit	4	6	14
	- SMK Kecil	Unit	4	4	4
	- Kejar Paket C	Unit	4	6	6
	- MA	Unit	47	44	53
	Jumlah Sekolah Setingkat SMA	Unit	89	90	111

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo

d. Kebijakan perwilayahan

Dalam pelaksanaan pembangunan, berdasarkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah perlu diupayakan sistem pengelolaan penyelenggaraan pembangunan yang efisien dan efektif, dalam rangka pengembangan wilayah. Salah satu yang dapat dijadikan pegangan dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah mencapai keseimbangan laju

pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah, pemerataan hasil pembangunan serta kelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan perwilayahan pembangunan di Kabupaten Probolinggo dibagi menjadi 2 (dua) Hierarkhi pusat pelayanan yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo, adalah sebagai berikut :

- Hierarkhi I Kabupaten Probolinggo adalah Kota Kraksaan, yang merupakan pusat Wilayah Pembangunan I. Adapun wilayah kecamatan yang termasuk dalam wilayah pembangunan ini adalah Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Krejengan dan Kecamatan Besuk. Fungsi pengembangan utama sebagai pemerintahan, perkotaan, pendidikan, perikanan dan jasa.
- Hierarkhi II adalah kota-kota lainnya yang menjadi pusat Wilayah Pembangunan II sampai Wilayah Pembangunan VI Kabupaten Probolinggo, yaitu :
 - Kota Paiton, yang merupakan yang Wilayah Pembangunan II. Wilayah kecamatan yang termasuk dalam wilayah pengembangan ini adalah Kecamatan Paiton, Kecamatan Kotaanyar dan Kecamatan Pakuniran. Fungsi pengembangan utama sebagai kawasan industri, sumber energi dan perikanan.
 - Kota Gading, yang merupakan yang Wilayah Pembangunan III. Wilayah kecamatan yang termasuk dalam wilayah pengembangan ini adalah Kecamatan Gading, Kecamatan Krucil dan Kecamatan Tiris. Fungsi pengembangan utama sebagai pusat pengembangan agropolitan, agrowisata dan kawasan lindung.
 - Kota Leces, yang merupakan yang Wilayah Pembangunan IV. Wilayah kecamatan yang termasuk dalam wilayah pembangunan ini

adalah Kecamatan Leces, Kecamatan Dringu, Kecamatan Gending, Kecamatan Maron, Kecamatan Banyuwangi dan Kecamatan Tegalsiwalan. Fungsi pengembangan utama sebagai penyangga perkotaan, industri dan perikanan.

➤ Kota Wonomerto, yang merupakan yang Wilayah Pembangunan V. Wilayah kecamatan yang termasuk dalam wilayah pembangunan ini adalah Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Bantaran, Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Sumber. Fungsi pengembangan utama sebagai pusat pengembangan kawasan pertambangan, perikanan dan pariwisata.

➤ Kota Tongas, yang merupakan yang Wilayah Pembangunan VI. Wilayah kecamatan yang termasuk dalam wilayah pembangunan ini adalah Kecamatan Lumbang, Kecamatan Sukapura dan Kecamatan Tongas. Fungsi pengembangan utama sebagai kawasan agropolitan, pariwisata dan industri (Bappedakab Probolinggo, 2010).

B. Gambaran Umum Situs Penelitian

1. Karakteristik Geografis Pulau Gili Ketapang

Pulau Gili ketapang merupakan Pulau karang yang terletak di sebelah utara wilayah Kabupaten Probolinggo pada koordinat $112^{\circ} 50'$ BT dan $70^{\circ} 40'$ LS - $8^{\circ} 10'$ LS, dengan kondisi daerah yang khas pesisir dan penduduk suku madura. Panjang Pulau Giliketapang $\pm 2,1$ km dengan lebar $\pm 0,6$ km sehingga luas keseluruhannya adalah 60 Ha. Apabila dilihat dari kepadatan pendudukan Pulau Giliketapang merupakan desa yang yang paling banyak dan padat penduduknya. Mayoritas penduduk desa Giliketapang bekerja di sektor perikanan baik sebagai nelayan maupun pengolah ikan sehingga desa ini menjadi sentra kegiatan perikanan terutama penangkapan.

Secara administratif, Desa Gili ketapang berada di utara Kota Probolinggo dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara : Selat Madura
- b. Selatan : Selat Madura
- c. Barat : Selat Madura
- d. Timur : Selat Madura

Pulau Gili Ketapang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Sumber Asih Kabupaten Probolinggo Propinsi Jawa Timur. Desa ini adalah sebuah desa Pulau, yang dipisahkan oleh Selat Madura. Jarak Desa Gili Ketapang dengan ibu kota kabupaten Probolinggo adalah 10 Km, sedangkan jarak dengan ibu kota Kecamatan Sumber Asih adalah 25 Km. Desa Gili ketapang dapat ditempuh dengan perjalanan laut dengan menggunakan perahu motor (orang-orang menyebutnya taxi) selama kurang lebih 40 menit dari pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo. Pusat pemerintahan desa Gili Ketapang berada di tengah-tengah Pulau Gili Ketapang yang letaknya berdekatan dengan rumah dinas sekretasis desa, puskesmas pembantu, bidan desa, taman kanak-kanak, dan SDN 3 Gili Ketapang. Dari aspek topografi, Pulau Gili ketapang terletak pada ketinggian 0 sampai dengan 5 meter diatas permukaan laut. Suhu rata-rata pada Pulau Gili ketapang berkisar antara 27°C - 30°C, beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musu hujan dan musim kemarau.

Secara topografi Pulau Gili Ketapang mempunyai ciri fisik yang menggambarkan kondisi geografis, merupakan sebuah Pulau yang terdiri dari batuan karang dan pasir putih. Melihat dari tekstur Pulau tersebut maka untuk tingkat kesuburan sangat rendah dalam artian bahwa kondisi Pulau Gili Ketapang hanya tanaman tertentu yang dapat tumbuh yang dapat menyesuaikan dirinya dengan kondisi lingkungan karang dan pasir putih. Berikut adalah gambar Peta Pulau Gili Ketapang.

Gambar 6
Peta Pulau Gili Ketapang



Sumber : www.probolinggokab.go.id

Karena Pulau Giliketapang terbentuk dari batuan karang sehingga perairan disekitar Pulau dipenuhi dengan beraneka ragam terumbu karang yang hidup. Akan tetapi dikarenakan adanya penangkapan yang tidak ramah lingkungan oleh para nelayan baik penangkapan dengan menggunakan bahan peledak maupun racun potasium dan sianida. Selain itu juga pengambilan batu karang yang dimanfaatkan warga sebagai bahan bangunan. Kondisi tersebut yang menyebabkan terumbu karang yang baik sekatang ini tidak lebih dari 40% nya saja.

a. Keadaan Fisik

Kondisi fisik Desa Gili Ketapang adalah sebagian tanah liat, karang dan sebagian lagi adalah pasir. Tanah pasir ini berada di bagian barat Pulau, yang pasirnya mengikuti arah tiupan angin. Apabila terjadi angin kencang yang datangnya dari selatan, maka ujung Pulau yang terdiri dari pasir akan bergerak kearah utara. Begitu pula sebaliknya, jika angin bertiup kencang dari sebelah utara maka pasir akan bergerak kearah selatan. Sehingga banyak anggapan bahwa Pulau ini seperti ular yang sedang berenang kearah timur, bagian timur

adalah kepalanya dan bagian barat adalah tampak ekornya. Padahal Pulau ini tidak bergerak sama-sekali. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Pulau ini dahulunya menyatu dengan kelurahan Pilang kota Probolinggo, yang karena terjadi gempa bumi maka Pulau ini secara perlahan-lahan terpisah dengan daerah tersebut.

Untuk memperoleh gambaran umum mengenai keadaan fisik di wilayah Desa Gili Ketapang, berikut ini diuraikan mengenai tata guna lahan, perumahan transportasi dan fasilitas umum. Panjang Pulau Gili Ketapang sendiri adalah 2155 m dan lebar 636 m. Penggunaan lahan yang dominan di Desa Gili Ketapang adalah untuk perumahan yang luas areal sebesar 52 Ha atau sekita 86,67% dari luas seluruh desa ini. Kemudian adalah penggunaan lahan untuk tanah kuburan yang mencakup 2 Ha atau sekitar 3,33% dari luas desa. Penggunaan berikutnya adalah tanah milik Negara yang digunakan untuk pelayanan umum seperti bangunan kantor kelurahan, balai desa, rumah dinas sekretaris desa, sekolah-sekolah seperti TK, SD, SMP. Selain itu juga beberapa fasilitas umum lainnya seperti PLTD Gili Ketapang, PDAM, dan pelabuhan sebesar 2 Ha atau 3,33%, dan untuk penggunaan lahan yang lainnya adalah 4 Ha atau sekitar 6,67%. Untuk lebih jelasnya mengenai luas masing-masing penggunaan lahan tersebut disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5

Bentuk Penggunaan Lahan di Desa Gili Ketapang

No	Bentuk penggunaan lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Pekarangan/Pemukiman	52	86,67
2.	Kuburan	2	3,33
3.	Tanah Negara	2	3,33
4.	Lain-lain	4	6,67
Jumlah		60	100

Sumber: profil desa Gili Ketapang 2009

Bila dilihat dari luas lahan yang dominan adalah untuk pemukiman yaitu seluas 52 Ha atau sekitar 86,67% dari luas Desa Gili Ketapang, maka dapat dikatakan bahwa Pulau Gili Ketapang sangat padat penduduknya. Rumah-rumah penduduk terbuat dari tembok, kayu dan beberapa juga terbuat dari bambu yang dianyam.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam pemasaran hasil perikanan dari Pulau Gili Ketapang ke Kota Probolinggo. Sarana transportasi yang baik, ongkos transportasi yang murah, mengakibatkan lalu lintas orang dan barang menjadi lancar dan cepat. Walaupun Desa Gili Ketapang merupakan Pulau yang terpisah dengan Kota Probolinggo, namun tidak terlalu sulit untuk dicapai, sebab sarana transportasi cukup memadai. Jalan-jalan yang menghubungkan antara pedusunan dapat dikatakan sebagian besar dapat dilalui kendaraan. Oleh karena itu masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam hal pengangkutan serta pemasaran hasil usaha pengolahan hasil perikanan ke tempat pemasaran yang ada di Kota Probolinggo. Sedangkan sarana transportasi yang digunakan masyarakat di Pulau Gili Ketapang umumnya adalah sepeda motor, becak motor, becak kayu, sepeda, pick up, dan gerobak.

Yang mana mereka hampir tidak pernah memperbaharui surat-surat kendaraan mereka, sehingga jika suatu waktu ada operasi kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian, mereka menyembunyikan kendaraan tersebut di kamar, dapur ataupun kamar mandi. Kondisi jalan di Pulau ini bisa dikatakan cukup memadai. Ada sebagian jalan yang telah dikeraskan dengan menggunakan semen dan juga paving/*betron press*, tidak ada jalan yang diaspal di Pulau Gili Ketapang.

Sarana fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat adalah balai desa, masjid, mushola, pos siskamling, pelabuhan, dan toko/warung. Balai desa selain dipergunakan sebagai kantor Kepala Desa, juga dipergunakan untuk kegiatan sosial, seperti PKK, arisan, LKMD, KB, dan kepemudaan tingkat desa. Masjid dan musholla dipergunakan sholat dan kegiatan keagamaan bagi masyarakat setempat seperti madrasah pada pagi dan sore hari.

Perumahan di Pulau Gili Ketapang sangat padat seperti layaknya perumahan pada kota-kota besar. Dengan lingkungan yang kurang begitu bersih seperti kampung nelayan pada umumnya di Indonesia. Pada bagian tengah Pulau dan Pulau bagian utara, sedangkan yang masih jarang penduduknya adalah Pulau bagian timur. Rumah-rumah berjajar dibibir pantai menghadap ke utara. Perumahan penduduk umumnya terbuat dari tembok yang sudah bagus, namun ada beberapa yang masih terbuat dari kayu dan bambu yang dianyam. Kondisi perumahan cukup baik, namun mereka kurang begitu memperhatikan tentang ventilasi udara rumah mereka. Karena perumahan penduduk dibangun saling berdekatan satu dengan yang lainnya. Hal ini menyebabkan udara tidak bebas keluar masuk, yang berakibat pada lembabnya udara di dalam rumah. Rata-rata penduduk Pulau Gili Ketapang sudah mempunyai tempat MCK sendiri dirumah mereka masing-masing, namun sayang masih banyak dari mereka yang masih buang air besar di laut.

b. Kependudukan

Komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik-karakteristik yang sama. Komposisi penduduk terdapat bermacam-macam pengelompokan, misalnya komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan, komposisi penduduk menurut mata pencaharian dan komposisi penduduk berdasarkan agama. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, banyak digunakan sebagai dasar menyusun beberapa jenis kebijaksanaan pemerintah. Misalnya kebijaksanaan untuk pembangunan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dan juga kebijaksanaan perencanaan pembangunan fisik. Berdasarkan data tahun 2009, jumlah penduduk desa Gili Ketapang adalah sebanyak 8154 jiwa. Dengan rincian sebagai berikut, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4028 jiwa dan jumlah penduduk perempuan adalah 4126 jiwa. Jumlah kepala keluarga berdasarkan data tersebut adalah sebanyak 2295 KK. Sehingga kepadatan penduduk di Pulau ini sangat tinggi, mengingat luas Pulau ini hanya 60 Ha yang di huni oleh 2295 KK. Dengan kata lain, kepadatan penduduk Pulau ini adalah 73 jiwa per 100 m². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6

Jumlah Penduduk Pulau Gili Ketapang Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	4028 jiwa	49,4 %
2.	Perempuan	4126 jiwa	50,6 %
Jumlah penduduk		8154 jiwa	100 %
Jumlah Kepala Keluarga		2294 KK	

Sumber: profil desa Gili Ketapang 2009

Komposisi penduduk menurut mata pencaharian menggambarkan aktivitas penduduk setempat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai nelayan, pengusaha, pengrajin, pegawai negeri atau swasta dan juga pedagang. Seperti telah diketahui bahwa penduduk menurut mata pencaharian dapat memberi gambaran mengenai peran berbagai usaha ekonomi penduduk. Data ini dapat digunakan untuk mengetahui kegiatan apa yang harus dikembangkan sesuai dengan kondisi setempat.

Sebagian besar penduduk desa Gili Ketapang bermata pencaharian sebagai buruh nelayan, yang mana mereka bekerja melaut menangkap ikan untuk juragan yang punya kapal. Jumlah buruh nelayan sangat banyak mencapai 1696 orang atau sekitar 58,56 %. Kemudian disusul oleh mereka yang bermata pencaharian sebagai nelayan yang mempunyai kapal, yaitu sebanyak 518 orang atau sekitar 17,89 % dari total jumlah angkatan kerja penduduk desa Gili Ketapang. Selanjutnya mereka yang bermata pencaharian sebagai pedagang dan penjual jasa menunjukkan persentase yang hampir sama yaitu sebanyak 17,4 % atau sebanyak 504 orang. Kemudian mereka yang bermata pencaharian sebagai tukang sebanyak 38 orang (1,31 %). Dan mereka yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 22 orang saja (0,77 %). Selanjutnya

adalah pensiunan TNI/POLRI dan PNS sebanyak 4 orang (0,14 %). Sedangkan mata pencaharian yang tergolong lain-lain adalah 144 orang (3,93 %). Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi penduduk Desa Gili Ketapang menurut matapencaharian mereka sehari-hari ditunjukkan pada tabel 7.

Tabel 7

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Gili Ketapang

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Buruh Nelayan	1696 Orang	58,56 %
2.	Nelayan	518 Orang	17,89 %
3.	Pedagang	504 Orang	17,4 %
4.	Tukang	38 Orang	1,31 %
5.	Pegawai Negeri Sipil	22 Orang	0,77 %
6.	Pensiunan TNI/POLRI	4 Orang	0,14 %
7.	Lain-lain	114 Orang	3,93 %
Jumlah		2896 Orang	100 %

Sumber: profil desa Gili Ketapang 2009

Walaupun ada masyarakat yang mempunyai matapencaharian di luar usaha nelayan, namun mereka itu mempunyai usaha dibidang perikanan sehingga secara tidak langsung mereka juga terlibat sebagai nelayan. Berarti dapat dikatakan usaha perikanan di tempat penelitian (desa Gili Ketapang) merupakan kegiatan yang dominan dalam mencukupi ke-butuhan hidup keluarga.

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kemajuan suatu wilayah dalam pembangunan, baik pembangunan pada tingkat pendidikan itu sendiri maupun pembangunan yang lain seperti dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas

dan mampu bersaing dengan masyarakat daerah lain. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan disajikan pada tabel 8.

Tabel 8

Jumlah Penduduk Menurut Tingkatan Pendidikan di Desa Gili Ketapang

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	PAUD	86 Orang	1,05 %
2.	TK	68 Orang	0,83 %
3.	SD/MI	2103 Orang	25,79 %
4.	SLTP/MTs	897 Orang	11 %
5.	SLTA/MA	132 Orang	1,62 %
6.	Perguruan Tinggi	22 Orang	0,27 %
7.	Tidak Tamat SD	1430 Orang	17,54 %
8.	Tidak Sekolah	3416 Orang	41,9 %
Jumlah		8154 Orang	100 %

Sumber: profil desa Gili Ketapang 2009

Berdasarkan data tingkat pendidikan di Desa Gili Ketapang pada tabel 4 diatas, tingkat pendidikan di Desa ini dapat dikatakan kurang, karena sebagian besar atau sebanyak 3416 jiwa (41,9 %) penduduk desa tersebut tidak bersekolah. Kemudian disusul dengan mereka yang hanya menamatkan pendidikan hanya sebatas sekolah dasar, dengan jumlah lulusan sebanyak 2103 orang atau dengan persentase sekitar 25,79 %. Berikutnya adalah penduduk yang tidak menamatkan pendidikan sekolah dasar sebesar 17,54 % atau sebanyak 1430 orang. Selanjutnya adalah penduduk yang telah menamatkan atau sedang melanjutkan pendidikan sampai jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat sebanyak 897 orang atau sekitar 11 %. Dan untuk mereka yang sedang atau telah melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah

menengah atas sebanyak 132 orang (1,62 %) dari total penduduk Pulau Gili Ketapang. Untuk jenjang pendidikan bawah seperti TK dan PAUD masing-masing sebanyak 68 dan 86 orang. Dan mereka yang sudah atau sedang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi hanya sebanyak 22 orang atau sekitar 0,27 %.

Mereka kebanyakan memutuskan untuk keluar dari pendidikan formal karena alasan ekonomi, pekerjaan dan atau ingin melanjutkan pendidikan agama di pondok yang tidak ada kurikulum pendidikan umumnya. Sehingga mereka hanya diajari ilmu agama saja tanpa diimbangi dengan ilmu yang lainnya. Oleh karena itu di Pulau Gili Ketapang ini masih banyak dari mereka yang tidak menguasai bahasa nasional, mereka hanya menguasai bahasa madura sebagai bahasa yang mereka gunakan sebagai komunikasi sehari-hari. Kondisi sarana pendidikan yang ada dapat dikatakan cukup baik. Terdapat 3 sekolah dasar negeri, 1 madrasah ibtidaiyah swasta dan 1 sekolah lanjutan tingkat pertama satu atap. Namun pendidikan non formal/madrasah sangat banyak ditemui. Ada 7 madrasah yang mempunyai bangunan permanen, dan puluhan lainnya menempati mushola-mushola dan 1 pondok pesantren.

Dalam kaitannya dengan agama dapat dikemukakan bahwa seluruh penduduk Desa Gili Ketapang beragama Islam, tidak ada yang menganut agama lain. Prasarana ibadah di Desa Gili Ketapang berupa masjid maupun langgar sangat mencukupi, karena hampir setiap rumah penduduk mempunyai mushola didepan rumah mereka masing-masing. Walaupun banyak dari mushola tersebut tidak dipergunakan. Berdasarkan catatan/data, jumlah masjid adalah sebanyak 2 buah dan langgar/mushola di desa Gili Ketapang 102 buah, yang kesemuanya dalam keadaan baik. Setiap hari Jumat warga Desa Gili Ketapang melaksanakan jamaah di masjid terdekat Selanjutnya, kegiatan yang bersifat keagamaan, seperti memperingati hari besar Islam, diadakan di mesjid atau di tempat yang

telah ditentukan. Bah-kan kegiatan yang sifatnya rutin, diadakan di tiap-tiap dusun/RT, yaitu kegiatan yasinan dan tahlilan.

c. Pemerintahan

Pulau Giliketapang merupakan sebuah desa Gili Ketapang yang termasuk dalam Kecamatan Sumberasih, sehingga pemerintahannya adalah Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang tugas kesehariannya dibantu oleh Sekretaris Desa Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Desa Giliketapang memiliki 8 Dusun yang tersebar dari barat sampai timur Pulau yaitu Dusun Pesisir, Dusun Mujahidin, Dusun Krajan, Dusun Baiturrohman, Dusun Mardian, Dusun Gozali, Dusun Suro dan Dusun Marwa.

d. Kebijakan Perwiayahan

Dalam pelaksanaan pembangunan di Pulau Giliketapang, berdasarkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuapten Probolinggo perlu diupayakan sistim pengelolaan penyelenggaraan pembangunan yang efisien dan efektif, dalam rangka pengembangan wilayah. Salah satu yang dapat dijadikan pegangan dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah mencapai keseimbangan laju pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah, pemerataan hasil pembangunan serta kelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan perwilayahan pembangunan di Pulau Giliketapang yang perlu diperhatikan adalah Sektor Perikanan, dan Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Gili Ketapang

Sejarah Pembangunan Desa Gili Ketapang

a. Bidang Pemerintahan

Dizaman pemerintahan orde baru, masyarakat Desa Gili Ketapang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah. Karena

kurangnya perhatian dan pemberdayaan tersebut keadaan Desa Gili Ketapang sangat memprihatinkan. Kurangnya transparansi pemeritahan, aliran keuangan dan berbagai hal menjadikan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa dirasa sangat kurang.

b. Bidang Politik

Masyarakat desa yang kurang begitu paham dengan dunia politik digiring oleh sekelompok golongan untuk memberontak dan menentang pemerintahan desa. Yang berujung pada pemeberontakan pasca pemilu tahun 1977 yang menewaskan 2 orang warga sipil, 1 perangkat desa Gili Ketapang dan 1 anggota hansip. Selain itu juga membakar rumah kepala desa pada waktu itu.

c. Bidang Ekonomi

Dalam masalah perekonomian, telah terjadi sistem yang salah, sehingga orang yang kaya menjadi tambah kaya dan yang miskin tetap dengan kondisinya. Padahal kekayaan alam yang diambil dari laut jumlahnya sangat besar.

d. Bidang Pendidikan

Anak-anak Desa Gili Ketapang yang seharusnya duduk dibangku sekolah untuk mengenyam pendidikan terpaksa harus membantu orang tuanya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dunia pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka. Tak heran jika masih banyak masyarakat yang tidak menguasai bahasa nasional.

Desa Gili ketapang Dimasa Kini

a. Bidang Pemerintahan

Dalam hal pemerintahan desa sudah mulai terjadi transparansi dalam berbagai bidang, seperti halnya masyarakat sudah diberdayakan dan dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan, peiaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan yang dilaksanakan di desa Gili Ketapang.

b. Bidang Politik

Keadaan politik di Desa Giliketapang sudah berangsur-angsur membaik, setiap warga masyarakat bisa menentukan pilihan/pandangan politiknya sesuai dengan keinginan mereka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bebas menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya.

c. Bidang Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di desa Giliketapang tidak terlepas dari kondisi ekonomi makro secara nasional. Dampak kebijakan ekonomi dan moneter yang diterapkan Pemerintah sejak terpuruknya perekonomian nasional di masa krisis ekonomi yang melanda negara-negara asia, hingga saat ini sudah tampak membuahkan hasil, meskipun masih jauh dan harapan. Kebijaksanaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan dan pemerataan hasil pembangunan untuk mencapai tingkat kemakmuran itu yang diharapkan. Kontribusi bidang perikanan semakin lama semakin tidak seimbang dengan naik turunnya bahan bakar minyak untuk operasional penangkapan perikanan, sehingga menimbulkan masalah pengangguran terselubung di masyarakat. diharapkan dengan pembangunan disegala bidang dapat menyerap tenaga kerja.

Sejalan dengan semakin membaiknya perekonomian nasional maka pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Giliketapang mengalami kemajuan walaupun kontribusinya dari tahun ketahun mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Desa Giliketapang telah mengalami pergeseran sejalan dengan aktifitas pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan disegala bidang serta berkelanjutan dan terus dilakukan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan menggali. membangun dan mengernbangkan potensi sumber daya yang tersedia.

d. Bidang Pendidikan

Di sektor pendidikan, untuk masyarakat desa Giliketapang sudah mulai terjadi kemajuan. Untuk bidang pendidikan Agama selain peningkatan mutu pendidikan dan kualitas pendidik juga disertai dan diimbangi dengan kegiatan ekstra kulikuler berupa kursus membaca kitab. Begitu juga di sektor pendidikan formal dimana masyarakat sangat mendukung program wajib belajar sembilan tahun. Selain itu juga sarana dan prasarana belajar bagi murid sedikit demi sedikit sudah mulai ada peningkatan walaupun masih belum memenuhi harapan.

Saat ini sarana dan prasarana pendidikan yang belum tercukupi atau masih kurang di desa Gili Ketapang, yaitu bangunan fisik sekolah mulai dari Paud, TK, SD dan SLTP. Namun demikian upaya dari pemerintah desa tetap berusaha untuk meminjamkan Rumah Dinas Kepala Desa untuk ditempati sarana Pendidikan Tingkat Kanak-kanak (TK). Selain itu juga untuk sarana sekolah SLTP Satu Atap masih butuh penambahan local, mengingat kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan putra putrinya semakin tinggi. Selain sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan, lebih dari itu tenaga pendidik juga perlu juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Agar para tenaga sukwan yang asli Desa Gili ketapang dapat diangkat menjadi PNS hal ini agar dapat menunjang peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengawas dan penilik serta peningkatan kualitas proses pembelajaran.

Informasi lain terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat

Tuntutan reformasi yang berkembang ditengah situasi krisis multi dimensi yang melanda Indonesia dewasa ini, telah mendorong berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk perubahan paradigma penyelenggraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam konteks global, situasi krisis multi dimensi di Indonesia dalam 5 tahun. Upaya

pemberdayaan masyarakat berarti memampukan dan memandirikan masyarakat, dari ini dapat dipahami bahwa pemberdayaan merupakan upaya memberi daya kepada yang lemah atau tidak berdaya agar bisa mendayagunakan dirinya. Dalam hal ini pembangunan yang diinginkan adalah pembangunan yang partisipatif, yaitu pembangunan yang ber misi dari rakyat oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat.

Berikut adalah beberapa penyebab kemiskinan yang terjadi di desa Gili Ketapang:

1. Kualitas sumber daya manusia yang rendah, baik dalam motivasi maupun penguasaan teknologi.
2. Kelembagaan yang belum mampu menjalankan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan.
3. Prasarana dan sarana yang belum merata dan belum sesuai kebutuhan pembangunan.
4. Minimnya modal usaha yang dimiliki masyarakat
5. Berkaitan dengan prosedur dan peraturan yang ada yang tidak kondusif bagi pengembangan kemandirian masyarakat.

Kelemahan-kelemahan yang bersifat internal dan eksternal mengakibatkan penduduk tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada, sehingga potensi dan peluang yang ada tidak mampu sepenuhnya dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, hanya segelintir orang saja yang mampu memanfaatkan potensi tersebut.

Peningkatan partisipasi masyarakat akan menumbuhkan potensi yang ada pada diri mereka, yang selama ini mungkin tersembunyi. Potensi itu seperti telur, apabila tidak ditetaskan maka akan membusuk dan mati. Dengan berperan serta dalam pembangunan, seseorang memiliki fungsi-fungsi tertentu yang harus dijalankan dan sekaligus mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. Ketika peran yang dimainkan kecil, maka fungsi atau tugas yang dijalankan juga sedikit.

dan tanggung jawab juga semakin ringan. Begitu peran yang dimainkan membesar, tugas dan tanggung jawabnya akan bertambah.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, ada banyak strategi yang bisa dipergunakan. Diantara strategi tersebut yang bisa ditempuh adalah :

- a. Menciptakan suasana dan iklim-iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat. Setiap manusia/masyarakat memiliki potensi untuk dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya. Perlu dorongan dan motivasi dan mombangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupnya untuk mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat molalui pemberian input berupa bantuan dana pembangunan, sarana dan prasarana fisik dan juga sarana sosial.

Memberdayakan mengandung arti melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang oleh karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat, dan bukan berarti mengisolasi atau menutup dari interaksi. Pemberdayaan masyarakat (secara individual) dalam rangka usaha meningkatkan swadaya masyarakat, partisipasi dan gotong royong masih mendapatkan perhatian dari masyarakat, namun demikian kiranya masih perlu ditingkatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maupun perangkat desa agar mau berpartisipasi didalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Gagasan Masyarakat Kedepan

Mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat. Meningkatkan

kemandirian masyarakat (su kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun dirinya berdasarkan aspirasi, kebutuhan, potensi dan kewenangan yang ada pada mereka, termasuk kelembagaannya). Mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

- Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
- Pengembangan, inspirasi dan partisipasi masyarakat
- Pengorganisasian dan pelembagaan masyarakat
- Berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat
- Pendekatan lintas, sektor dan program
- Mendayagunakan teknologi tepat guna ;

Berdasarkan hasil-hasil penjangkaran aspirasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang diprioritaskan untuk mengatasi permasalahan utama di desa Gili Ketapang sesuai pembedaan yaitu, Kesehatan, Pendidikan dan Ketahanan pangan.

1. Bidang kesehatan

- a. Peningkatan perlindungan terhadap kesehatan ibu dan anak
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
- c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat

2. Bidang pendidikan

- a. Peningkatan angka partisipasi sekolah
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan

- c. Peningkatan kualitas pembelajaran, pelayanan pendidikan, dan kebudayaan
 - d. Peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengawas, penilik, serta meningkatkan minat baca masyarakat
 - e. Penambahan lokal SMP satu atap
 - f. Pembangunan Gedung sekolah TK
3. Bidang perikanan
- a. Peningkatan produktivitas perikanan
 - b. Peningkatan pelayanan pada masyarakat perikanan
 - c. Peningkatan usaha perikanan yang mandiri
 - d. Pendirian dermaga alternatif, yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan transportasi yang tertib, aman, dan terjangkau oleh masyarakat
 - e. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain bidang prioritas tersebut diatas, yang menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dalam rangka menajjahterakan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan

- a. Peningkatan kualitas aparat pemerintah desa
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa
- c. Peningkatan fungsi manajemen pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- d. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Peningkatan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan peningkatan pendapatan desa

2. Bidang sosial

- a. Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Peningkatan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial
- c. Peningkatan kesejahteraan perempuan
- d. Peningkatan perlindungan perempuan
- e. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan swadaya masyarakat yang mampu menumbuhkan nilai sosial budaya dan menggali potensi sumberdaya local
- f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kontrol sosial
- g. Peningkatan swadaya msyarakat dalam usaha ekonomi desa
- h. Peningkatan bantuan intensif guru madrasah dan guru ngaji
- i. Peningkatan pembangunan mushola

3. Bidang pemukiman

- a. Peningkatan prasarana dan sarana dasar publik melalui pembangunan jalan lingkungan, air bersih, dan penerangan (listrik).

3. Tantangan Dan Permasalahan Pembangunan Di Gili Ketapang

Tantangan dan permasalahan yang ada di Pulau Gili ketapang yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Gili ketapang adalah :

- Penguatan Modal Kelompok Penangkapan Ikan

Selama ini masyarakat Pulau Giliketapang masih sangat kekurangan pada modal usaha pengadaan perahu/kapal serta alat tangkap ikan sehingga 70% modal dilakukan dengan cara meminjam. Dimana mereka meminjam dana kepada pada juragan atau pengepul hasil tangkapan untuk membuat perahu dan

alat tangkap sehingga mereka sangat ketergantungan sehingga dalam menjual hasil tangkapannya berupa ikan mereka harus menjualnya kepada juragan tersebut dengan harga di bawah harga dipasaran.

b. Sarana Dermaga Perikanan di selatan Pulau

Selama ini kegiatan bongkar muat barang dan penumpang serta pendaratan hasil tangkapan nelayan berada pada satu dermaga yang berada di bagian utara Pulau. Untuk kelancaran kegiatan pendaratan hasil tangkapan nelayan dibutuhkan dermaga baru yang rencananya akan dibuat di selatan pulau. Selama ini dermaga di utara Pulau apabila angin timur maupun angin barat yang mengakibatkan ombak laut besar sangat mengganggu bongkar muat barang dan penumpang serta pendaratan hasil tangkapan ikan.

Sehingga hacapannya adalah dengan adanya pembangunan dermaga di selatan Pulau Giliketapang khusus sebagai tempat pendaratan hasil tangkapan nelayan serta tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan. Nelayan Pulau Giliketapang memiliki perahu dengan alat tangkap Purse Seine sebanyak 70 unit, cantrang/payang alit sebanyak 27 unit, serta perahu kecil dengan alat tangkap pancing atau jaring gillnet monofilament sebanyak 1.600 unit.

c. Sarana Infrastruktur berupa jalan

Ada beberapa poros jalan desa yang belum dilakukan pengerasan jalan sehingga dapat mengganggu aktivitas pengangkutan barang serta transportasi penduduk yang akan melakukan kegiatan ke dermaga maupun ke pusat desa. Harapannya adalah adanya pembangunan jalan desa yang menghubungkan beberapa tempat yang nantinya dapat memperlancar sarana transportasi.

d. Pengutan Modal Kelompok Pengolah hasil Perikanan

Di Pulau Giliketapang ada beberapa Kelompok Usaha Bersama yang tumbuh dan berkembang, salah satunya adalah Kelompok Mina Bahari Makmur yang telah beberapa kali memenangkan perlombaan tingkat Propinsi. Beberapa produk yang dihasilkan oleh kelompok pengolah hasil perikanan adalah jenggelek (bloso) kering manis, terasi, pemindangan, kerupuk ikan dll. Namun akibat kekurangan modal usaha sehingga mereka sulit untuk berkembang dengan baik. Disamping itu belum adanya promosi dalam hal pemasaran yang menyebabkan kurang meluasnya pemasaran hasil produksi pengolahan hasil perikanan tersebut.

e. Penghijauan Pulau Gili ketapang

Kondisi Pulau Gili ketapang apabila dilihat dari kehijauan dan kebersihannya sangatlah kurang, oteh karena itu perlu adanya penghijauan yang dilakukan di sekitar bibir pantai yang nantinya dapat menjadikan Pulau Giliketapang lebih hijau dan bermanfaat sebagai tempat berlindung dan menahan resapan air.

f. Rehabilitasi Terumbu Karang

Semakin berkurangnya terumbu karang akibat aktivitas manusia, baik akibat penangkapan yang tidak ramah lingkungan oleh para nelayan baik penangkapan dengan menggunakan bahan peledak maupun racun potasium dan sianida. Selain itu juga pengambilan batu karang yang dimanfaatkan warga sebagai bahan bangunan. Kondisi tersebut yang menyebabkan terumbu karang yang baik sekatang ini tidak tebih dari 40% nya, sehingga perlu kiranya diadakan rehabilitasi terumbu karang yang ada baik dengan pembuatan terumbu buatan maupun transplantasi terumbu karang yang ada.

C. Penyajian Data Lapang

1. Potensi Dan Manfaat Yang Dapat Dikembangkan Di Wilayah Pesisir Dan Lautan Pulau Gili Ketapang

Pada awalnya Pulau Gili Ketapang dipandang sebagai kawasan yang relatif tertinggal dan mempunyai daya tarik investasi yang rendah ketika masyarakat setempat lebih tertutup untuk mengeksplorasi potensi yang dimiliki Pulau Gili Ketapang. Namun saat ini menjadi sangat potensial dan cocok dijadikan daerah investasi yang menjanjikan setelah masyarakat Pulau ini lebih terbuka dengan pembaharuan. Potensi sumberdaya alam dan lingkungan merupakan salah satu modal dasar pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Potensi yang paling menonjol di desa Gili Ketapang adalah hasil tangkapan ikan nelayan dan juga potensi pariwisata.

a. Potensi Perikanan

Kegiatan penangkapan di laut dipengaruhi oleh keadaan musim yaitu musim barat dan musim timur. Musim timur dipengaruhi oleh kondisi angin yang berhembus dari benua Australia ke wilayah Indonesia, yang menyebabkan wilayah Indonesia mengalami musim kemarau, angin di laut lemah, gelombang laut relatif lemah dan tidak terjadi hujan. Musim timur sangat mendukung kegiatan para nelayan Indonesia dalam penangkapan. Musim timur terjadi pada bulan April sampai bulan September. Sedangkan untuk musim barat, angin menghembus dari benua Asia yang mengandung uap air, maka terjadilah musim hujan di wilayah Indonesia dengan disertai arus yang cukup kuat, angin dan gelombang laut yang cukup kuat pula.

Pada musim barat menyebabkan terjadinya migrasi pada ikan dan mengurangi penangkapan ikan oleh nelayan atau disebut dengan musim paceklik. Musim barat terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Dengan adanya pengaruh musim yang demikian tersebut maka akan

mempengaruhi proses penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan. Pada musim timur para nelayan di Pulau Gili Ketapang melakukan penangkapan dan pada musim barat para kebanyakan nelayan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan. Atau melakukan penangkapan ikan tapi tidak seramai pada musim angin timur. Selain itu musim ikan dipengaruhi oleh terang atau tidaknya cahaya bulan, jika bulan berada pada tanggal 8 sampai dengan 22, maka bisa dipastikan tangkapan ikan akan sepi karena cahaya bulan terang benderang, sehingga ikan jarang muncul ke permukaan. Seperti yang dikatakan H. Abdurrahman, beliau adalah salah satu juragan kapal yang ada di Pulau Gili Ketapang, memiliki 2 kapal *purse seine* yang panjangnya mencapai 16,5 dan 18 meter. Dan merupakan kapal *purse seine* terbesar yang ada di Pulau Gili Ketapang.

”Musim ikan terjadi pada musim angin timur, angin relatif lebih tenang jika dibandingkan dengan musim angin barat. Dan ikan yang didapat juga lebih banyak jika dibandingkan dengan musim angin barat. Namun pada musim angin timurpun tidak selalu mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak, karena ikan tidak muncul ke permukaan jika bulan bersinar terang. Untuk meniyasati hal tersebut, para nelayan memasang rumpon di tengah laut, ataupun mereka menangkap ikan pada sing hari. Sehingga mereka tetap mendapatkan ikan, walaupun hasilnya tidak terlalu banyak.” (Wawancara: Sabtu, 24 April 2010, Pukul 08.00 WIB)

Potensi perikanan yaitu hasil tangkapan ikan nelayan berupa ikan dengan berbagai jenis, ikan, udang, cumi dan kepiting. Semua hasil tangkapan tersebut dijual di TPI yang ada di pelabuhan Tanjung tembaga Kota Probolinggo. Selain hasil perikanan tangkap, di Pulau Gili Ketapang juga tumbuh usaha pengolahan ikan dengan berbagai jenis hasil. Seperti industri rumah tangga kerupuk ikan yang dikelola para istri-istri nelayan dengan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Probolinggo melalui program Kelompok Usaha Bersama. Selain industri rumah tangga kerupuk ikan, juga ada pembuatan tepung ikan, pengeringan ikan, dan petis. Semua usaha tersebut tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Bahari Makmur.

b. Potensi Pariwisata

Potensi lain yang terdapat di Pulau Gili ketapang adalah potensi pariwisata. Dibagian barat Pulau Gili Ketapang ini membentang pantai pasir putih yang sangat indah. Lautnya yang bening nampak kebiru-biruan ketika terkena sinar matahari. Ombak di bagian Pulau ini juga relatif lebih tenang jika dibandingkan dengan Pulau disisi sebelah utara. Jika cuaca sedang baik dan cerah, maka Kota Probolinggo akan sangat terlihat dengan jelas. Selain itu dapat juga dikembangkan untuk wisata bahari seperti memancing, berenang, dan snorkeling. Potensi ini akan mampu menarik wisatawan, karena letaknya yang tidak begitu jauh dari Kota Probolinggo.

Meski kurang dikembangkan sebagai wisata, Pulau ini tetap menarik perhatian orang. Keberadaan Gua Kucing yang dikeramatkan menjadi salah satu alasan bagi pengunjung untuk datang. Menurut cerita yang berkembang tempat ini sebenarnya merupakan petilasan Syech Ishak, dia adalah Penyebar Agama Islam, yang pernah singgah dalam perjalanan dari Gresik menuju Blambangan, Banyuwangi. Goa ini dinamakan Goa kucing, konon karena di gua ini pernah disinggahi syech Ishap ini hidup bersama ribuan kucing. Konon juga salah satu kucing ada yang bertuliskan arab di kepalanya. Ketika tokoh tersebut meninggalkan Pulau ini, populasi kucing ikut berkurang. Anehnya setiap malam Jumat Legi suara “meong” terdengar disela-sela gua, namun setelah didekati, suara itu menghilang. Potensi pariwisata Pulau Gili Ketapang tersebut kurang dikembangkan dengan baik, sesuai dengan yang dikatakan H. Husni, salah satu warga masyarakat Pulau Gili Ketapang. Yang rumahnya berada tidak jauh dari Madrasah Ibtidaiyah yang ada letaknya berada di tengah Pulau sebelah barat.

”Goa Kucing yang berada di timur Pulau sangat terkenal di beberapa daerah luar Pulau Gili Ketapang, banyak peziarah yang datang ke Goa Kucing tersebut. Utamanya pada malam jumat legi, disana diadakan pengajian dan masyarakat datang dengan membawa berbagai makanan. Mereka berdoa bersama semalam suntuk di goa tersebut. Selain wisata

religi, juga terdapat pantai yang indah di barat Pulau ini, namun sayang tidak ada fasilitas penunjangnya, sehingga tidak banyak dikenal orang.” (Wawancara: Minggu, 25 April 2010, Pukul 15.00 WIB).

2. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Gili Ketapang

Ditinjau dari aspek sosial ekonomi, desa Gili Ketapang merupakan salah satu daerah dengan masyarakat nelayan penangkap ikan dengan hasil terbanyak setelah paiton. Tidak ada hasil ekonomis lain yang dapat dihasilkan dari Pulau Gili Ketapang selain dari perikanan dan olahannya.

a. Perekonomian Masyarakat Pulau Gili Ketapang

Seperti halnya daerah lain di Kabupaten Probolinggo bahwa kondisi ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan, yang dapat dilihat pada kebutuhan pokoknya. Bahwa kebutuhan pokok yang paling mendasar bagi masyarakat adalah kebutuhan perumahan, makanan, dan kebutuhan akan pakaian. Di Pulau Gili Ketapang pada umumnya yang bekerja adalah kepala rumah tangga. Tiap kepala keluarga menanggung 3 - 4 orang. Jika dilihat dari pendapatan perkapita sudah cukup untuk keperluan makan. Akan tetapi dalam kehidupannya, manusia tidak hanya terpenuhi kebutuhan pangan, namun juga dipikirkan kebutuhan pokok lainnya, seperti rumah dan pakaian. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan pokok selain pangan, anggota keluarga membantu mencari nafkah untuk keperluan keluarganya. Untuk melihat lebih jauh tentang kondisi ekonomi tersebut perlu pula diketahui pendapatannya.

Kehidupan ekonomi di Pulau Gili Ketapang banyak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya jumlah tangkapan ikan nelayan. Karena satu-satunya sumber penghidupan mayoritas masyarakat di desa Gili Ketapang adalah ikan. Tak ada sumber lain selain ikan, karena luas Pulau ini sangat kecil dan banyaknya penduduk yang mendiami pulau ini. Pulau Gili Ketapang identik dengan ikan segar, karena hampir semua ikan yang ada di TPI yang ada di Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo berasal dari tangkapan nelayan Desa Gili

Ketapang. Produk perikanan mendominasi perekonomian penduduk di Pulau Gili Ketapang. Mereka berprofesi sebagai buruh nelayan, nelayan, ABK, Juru Mudi, majikan kapal, pengolah ikan, maupun tengkulak ikan. Sehingga jika sedang tidak musim ikan, perekonomian masyarakat penduduk Pulau ini sedikit goyah. Mengingat sumber penghasilan mereka adalah dari laut. Seperti yang dikatakan H. Suparyono, selaku kepala desa.

“masyarakat Pulau ini hampir seluruhnya atau sekitar 95% adalah nelayan, atau bekerja dari hasil laut. Karena tidak banyak yang bisa dilakukan di Pulau sekecil ini. Laut menjadi tumpuan hidup hampir seluruh warga saya secara turun temurun. Laut adalah hidup bagi masyarakat Gili Ketapang.”

(Wawancara: Selasa, 27 April 2010, Pukul 13.00 WIB)

Salah hal yang menjadi ukuran ekonomi dan kebanggaan penduduk adalah rumah atau tempat tinggal, sebab rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok yang penting. Konstruksi rumah pada umumnya adalah tembok. Rumah di Desa Gili Ketapang kebanyakan terbuat dari yang terbuat dari semen, batu bata dan pasir. Dilihat dari kesehatan rumah di daerah ini belum memenuhi persyaratan kesehatan. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa penataan bangunan yang masih asal-asalan sehingga ventilasi kurang bagus, namun kebanyakan dari mereka sudah menggunakan semen, tegel, dan keramik untuk lantai mereka.

Selanjutnya, rumah di daerah Gili Ketapang tidak mempunyai pekarangan/halaman yang luas dan jarak rumah satu dengan lainnya sangat berdekatan dan berhimpit-himpitan. Di lingkungan perumahan tidak banyak tanah kosong. Selain itu dalam pekarangan terdapat kolam yang dimanfaatkan untuk menampung air hujan yang mereka gunakan untuk mencuci dan mandi bagi mereka yang tidak berlangganan air dari PDAM. Batas pekarangan satu dengan yang lain kebanyakan diberi pagar, berupa pagar bambu ataupun pagar tanaman.

Kebutuhan pokok yang lain adalah makan, dan makanan pokok mereka adalah nasi yang mereka peroleh dari pasar yang ada di Kota Probolinggo. Karena di Pulau ini tidak ada lahan untuk bercocok tanam dan juga terbatasnya jumlah air tawar yang ada. Pada umumnya penduduk makan tiga kali sehari, tetapi ada yang hanya makan dua kali sehari. Hal ini karena merupakan kebiasaan. Sesuai dengan kemampuannya dalam hal makan, menggunakan ikan atau mie instan. Mereka sangat gemar mengonsumsi mie instan, sehingga tak heran jika mereka membeli mie dalam jumlah besar.

Penduduk desa Gili Ketapang sangat jarang mengonsumsi sayur-mayur dalam menu mereka sehari-hari, karena semua sayur-mayur diperoleh dari pasar yang ada di Kota Probolinggo. Namun ada juga sayur mentah yang dijual di warung-warung di Pulau Gili Ketapang, antara lain daun ketela, daun kangkung, terong, dan sebagainya. Kebanyakan ibu-ibu di Pulau Gili Ketapang tidak masak di pagi hari, mereka lebih suka membeli untuk makan pagi mereka. Mereka akan memulai aktivitas dapur sekitar pukul 8 atau 9 pagi, meskipun mereka tidak ada pekerjaan di pagi hari. Sehingga budaya sarapan belum membudaya.

Meskipun umumnya penduduk Desa Gili Ketapang kurang memperhatikan kebutuhan pakaian, tetapi dalam hal pakaian tidak mengalami kekurangan. Kebanyakan masyarakat membeli pakaian setahun sekali menjelang lebaran. Pakaian sehari-hari yang biasa digunakan oleh seorang laki-laki dewasa di Pulau Gili Ketapang adalah kain sarung. Terkadang mereka menggunakan kaos atau kemeja untuk atasan, namun mereka lebih sering terlihat bertelanjang dada dari pada berpakaian. Ini mereka gunakan pada semua kegiatan, seperti untuk melaut, ngobrol santai, makan, ke masjid dan hampir semua kegiatan yang mereka lakukan. Bahkan untuk menonton pertunjukan gambus atau orkes dangdut, mereka menggunakan sarung. Sedangkan pakaian yang lazim digunakan oleh seorang perempuan di Pulau ini

adalah kain arung atau kain selendang. tidak jauh berbeda dengan laki-laki, kaum perempuan juga menggunakan bawahan kain selendang/sarung untuk hampir semua kegiatan sehari-hari mereka. Tak heran jika mereka memiliki banyak persediaan kain selendang atau sarung.

b. Kehidupan Sosial Masyarakat Pulau Gili Ketapang

Sedangkan yang menjadi ukuran tingkat status sosial bagi penduduk di desa Gili Ketapang adalah Haji. Mereka berlomba-lomba untuk mendaftarkan diri melaksanakan ibadah haji. Sehingga tidak heran jika hampir semua masyarakat disini telah melaksanakan ibadah haji. Sampai ada 2 tukang becak di Pulau ini yang telah menunaikan ibadah haji. Karena setelah menunaikan ibadah haji, panggilan mereka di masyarakat akan berubah, jika laki-laki akan dipanggil abah, dan yang perempuan dipanggil umi. Inilah yang menjadi gengsi soail tersendiri dikalangan masyarakat desa Gili Ketapang. Kuota haji terbesar dari tahun ke tahun untuk Kabupaten Probolinggo dipegang oleh desa Gili Ketapang, sampai ada dari mereka yang mendaftar ke Kota Probolinggo karena kuota Kabupaten telah penuh.

Di dalam masyarakat, keluarga merupakan pusat kehidupan yang paling penting. Selain merupakan kelompok yang akrab, keluarga juga merupakan sumber bahan bagi lembaga dan merupakan tempat interaksi sosial, kegiatan sosial dan budaya. Suatu keluarga inti terdiri dari seorang suami, seorang istri, dan anak-anak mereka yang belum kawin. Di desa Gili Ketapang kebanyakan dalam satu keluarga umumnya terdiri di atas tiga orang anggota kelaurga.

Interaksi sosial dan budaya di Desa Gili Ketapang dapat terjadi antara orang tua dengan anak. Misalnya orang tua menyuruh anak untuk membantu pekerjaan rumah atau mengolah ikan. Selain itu dapat terjadi pada saat mereka nonton TV bersama di malam hari. Bahasa yang digunakan dalam interaksi itu adalah bahasa madura. Interaksi juga terjadi dengan tetangga, ini terjadi pada

saat melaksanakan kegiatan sosial budaya. Misalnya saat pengajian, yasinan, tahlilan, saat mempunyai hajat, dan lain sebagainya. Selain itu interaksi sosial terjadi dengan masyarakat luar. Misalnya pada saat melaksanakan kegiatan sosial budaya dan ekonomi. Misalnya pada saat menjual hasil tangkapan dilaut atau hasil olahan ikan seperti ikan kering kerupuk dan tepung ikan.

Selanjutnya, tingkat kerukunan masyarakat Desa Gili Ketapang cukup tinggi, sebab dalam hidupnya, baik pada saat suka maupun duka ada sikap yang saling tolong menolong. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga masyarakat saling membutuhkan warga masyarakat yang lain. Saling tolong menolong itu, menyebabkan ada tingkat kerukunan diantara warga desa. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin terjadi kesulitan dalam hal keuangan, tenaga kerja, maka mereka dapat minta tolong/bantuan dari tetangga maupun kerabat dan juga dari orang luar. Pada saat tetangga dalam keadaan susah maupun gembira dan riang hati, mereka selalu tolong-menolong. Pada saat tetangga susah, tetangga lain juga ikut merasakan, demikian halnya pada saat riang gembira. Sebagai contoh, pada saat ada pendatang yang salah satu anggota keluarganya meninggal, banyak warga yang saling membantu. Seperti memberikan bantuan keuangan dan tempat tinggal tanpa dipungut biaya sepeserpun. Hal ini persis seperti yang pernah dialami oleh ibu Indah, salah satu warga pendatang di Pulau Gili Ketapang. Ibu Indah merupakan warga asli Banyuwangi yang kemudian tinggal di Pulau Gili Ketapang beserta suami dan satu putrinya. Beliau sudah tinggal di Pulau Gili Ketapang kurang lebih sudah 10 tahun terakhir.

“Orang-orang Gili sangat baik, rasa kesetiakawanan dan tenggang rasanya sangat tinggi. Dulu ketika anak kedua saya meninggal, dan saya sedang berada dalam masa sulit. Masyarakat Gili dengan ikhlas membantu saya, mulai dari biaya rumah sakit, biaya kirim doa dan yasinan bagi almarhum dicukupi oleh tetangga sekitar. Mungkin mereka kasihan melihat keadaan saya, tidak punya apa-apa, suami yang hanya seorang tukang becak dan musibah yang sedang saya alami. Jika saya tidak ditolong oleh orang-orang Gili, mungkin nasib saya tidak akan seperti sekarang ini. Rumah yang saya tinggali inipun juga rumah orang

Gili, yang dipinjamkan ke saya tanpa harus membayar uang sewa setiap bulannya.” (Wawancara: Senin, 26 April 2010, Pukul 19.00 WIB)

Corak dari hubungan diantara tetangga di Desa Gili Ketapang melalui berbagai kegiatan sosial, diantaranya memperbaiki jaring, pengajian, yasian, tahlilan, dan kegiatan keagamaan lainnya. Dengan berbagai macam kegiatan sosial ini, maka diantara tetangga satu dengan yang lain akan tercipta hubungan yang lebih akrab.

Dalam kaitannya dengan kepercayaan, dapat dikatakan bahwa umumnya masyarakat Desa Gili Ketapang, percaya adanya tempat yang dianggap keramat. Hal ini terutama mereka yang termasuk kalangan orang tua masih ada kepercayaan semacam itu. Hal ini dapat dilihat bahwa dikalangan orang tua masih melakukan adat atau tradisi yang dulu dilakukan oleh nenek moyangnya. Adat itu misalnya mengunjungi goa kucing setiap malam jumal legi. Mereka berdoa dan membacakan puji-pujian kepada TUHAN dan juga membawa berbagai makanan.

c. Bentuk Ketimpangan Pembangunan di Pulau Gili Ketapang

Ketimpangan antar wilayah merupakan salah satu permasalahan yang pasti timbul dalam pembangunan. Ketimpangan antar wilayah menjadi signifikan ketika wilayah dalam satu dan yang lain terdiri atas beragam potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis atau politik. Keberagaman ini selain dapat menjadi sebuah keunggulan, juga sangat berpotensi menggoncang stabilitas sosial dan politik nasional. Salah satu jalan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah wilayah ialah menyelenggarakan pembangunan. Namun, pembangunan tidak serta merta dapat mengurangi ketimpangan wilayah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengedepankan kembali konsep pemerataan dalam pembangunan.

Ketimpangan pembangunan antara wilayah yang terjadi dapat dilihat dari berbagai aspek. Secara umum, hal ini merujuk pada perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi. Untuk menguranginya, upaya percepatan pembangunan di wilayah relative tertinggal sudah dilakukan, namun hasilnya belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu ketimpangan menjadi masalah yang penting dan harus diatasi.

Masyarakat yang berada di wilayah kecil pada umumnya masih belum banyak tersentuh oleh program-program pembangunan sehingga akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik masih sangat terbatas serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari pemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah tertinggal, termasuk yang masih dihuni oleh komunitas adat terpencil antara lain: terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relative lebih maju, kebanyakan wilayah pulau kecil miskin sumber daya, khususnya sumber daya alam dan manusia, belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal oleh pemerintah daerah karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung, belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah ini.

Ketertinggalan yang sangat terlihat di Pulau Gili Ketapang adalah pada sektor pendidikan, energi dan kualitas sumber daya manusia. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari kurangnya jumlah lokal kelas yang dimiliki sekolah untuk menampung peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan. Sangat tidak heran jika dalam satu kelas terdapat hingga lebih dari 40 siswa. Hal ini jelas akan mengurangi konsentrasi siswa dalam menangkap apa yang disampaikan pengajar. Karena tempat belajar tidak memadai dan kurang nyaman. Juga pada

alat bantu peraga pendidikan yang tersedia seperti buku dan alat bantu lainnya. Selain pada fasilitas penunjang fisik, juga kurangnya tenaga pendidik yang mengajar para siswa dan siswi. Rata-rata pengajar di sekolah yang ada di Pulau Gili Ketapang merupakan penduduk luar pulau, yaitu dari Kota dan Kabupaten Probolinggo. Mereka setiap hari datang ke pulau Gili Ketapang untuk mengajar dan pulang di siang harinya. Kurangnya putra daerah yang berkualitas menyebabkan terjadinya hal tersebut. Rata-rata masyarakat lebih condong ke pendidikan agama dari pada ke pendidikan formal.

Ketimpangan yang lain adalah dari ketersediaan energi yang ada, energi disini adalah aliran listrik dari PLN yang hanya melayani masyarakat selama 6,5 jam per harinya. Yaitu mulai dari jam 17.30 WIB hingga jam 24.00 WIB. Dengan harga listrik yang relative mahal untuk ukuran masyarakat di pulau jawa pada umumnya. Kondisi ini tidak bisa dipungkiri karena listrik di pulau ini dihasilkan dari PLTD yang dihasilkan dari genset yang berbahan bakar solar. Dengan mahalnya harga solar saat ini pihak PLN tidak bisa menyamakan harga dengan yang ada di pulau jawa. Kondisi seperti ini telah dirasakan warga masyarakat pulau Gili Ketapang kurang lebih 10 tahun terakhir. Sebelumnya tidak ada fasilitas listrik dari PLN.

Kualitas sumber daya manusia juga perlu mendapat perhatian. Karena pembangunan tidak hanya pada pembangunan fisik belaka. Tetapi juga harus membangun sumber daya manusianya agar nanti dapat bersaing secara sehat dengan daerah lain dan tidak tertinggal lagi. Rendahnya peserta didik yang melanjutkan hingga ke jenjang atas, adalah masalah yang perlu dihadapi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Padahal jika dilihat dari segi ekonomi, masyarakat pulau Gili Ketapang tidak banyak berbeda jauh keadaan ekonominya dengan

masyarakat Kabupaten Probolinggo pada umumnya. Selain itu, juga karena kondisi sosial masyarakatnya yang lebih condong ke pendidikan agama dan mengesampingkan pendidikan formal. Padahal sudah ada pendidikan agama yang dipadu dengan pendidikan formal. Namun selama ini masyarakat pulau Gili Ketapang masih kurang begitu tertarik dengan pendidikan yang seperti itu. Walaupun sudah ada warga masyarakat pulau Gili Ketapang yang menyekolahkan anaknya di pondok pesantren yang dipadu dengan pendidikan formal.

Ketimpangan pembangunan ini harus segera diatasi oleh semua pihak, tidak hanya oleh pemerintah daerah kabupaten Probolinggo. Tetapi oleh semua pihak yang terkait, agar tidak semakin jauh ketimpangan yang terjadi. Mengingat perkembangan zaman tidak bisa kita hindari.

3. Hasil Pembangunan Di Pulau Gili Ketapang

a. Ketersediaan Infrastruktur

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian halnya dengan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Gili Ketapang. Dari tahun ke tahun perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di desa ini semakin meningkat. Beberapa hal yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan membangun infrastruktur di berbagai bidang. Seperti pengembangan sarana pendidikan sebagai salah satu aspek pembangunan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yaitu dengan mulai dibangunnya sekolah dari PAUD sampai dengan SMP satu atap Gili Ketapang. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Gili Ketapang yang telah beroperasi sejak 10 tahun terakhir. PLTD tersebut dikelola

PLN Kabupaten Probolinggo. Dermaga pelabuhan uncut untuk memperlancar arus transportasi manusia, barang dan jasa.

Kemudian juga dibangunnya Saluran Pengadaan Air Minum (SPAM) Gili Ketapang oleh dinas Pekerjaan Umum untuk mengatasi krisis air bersih yang dialami warga desa Gili Ketapang. Selain pembangunan fisik, telah dilakukan pula pendirian Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Bahari Makmur di Desa Gili Ketapang untuk memberdayakan perempuan nelayan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian bersama. Selain pembangunan tersebut, di Pulau Gili Ketapang pernah juga dibangun saluran telepon oleh pihak Telkom Kabupaten Probolinggo dengan mendirikan *tower* di tengah Pulau Gili Ketapang, namun saat ini telah ditinggalkan oleh masyarakat setempat. Karena telekon rumah dianggap tidak efektif dan efisien, mereka lebih suka menggunakan telepon seluler.

b. Sekolah di Pulau Gili Ketapang

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa (atau "murid") di bawah pengawasan guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal, yang umumnya wajib. Dalam sistem ini, siswa kemajuan melalui serangkaian sekolah. Nama-nama untuk sekolah-sekolah ini bervariasi menurut negara (dibahas pada bagian Daerah di bawah), tetapi umumnya termasuk sekolah dasar untuk anak-anak muda dan sekolah menengah untuk remaja yang telah menyelesaikan pendidikan dasar. Ada juga sekolah non-pemerintah, yang disebut sekolah swasta. Sekolah swasta mungkin untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ketika pemerintah tidak bisa memberi sekolah khusus bagi mereka; keagamaan, seperti sekolah Islam dan sekolah agama yang lain.(www.wikipedia.com).

Di desa Gili Ketapang terdapat 2 PAUD (*Play Group*), 4 (empat) sekolah negeri, yaitu SDN 1, 2, 3 Gili Ketapang dan SMP satu atap Gili Ketapang, 1 MI,

dan 1 Pondok pesantren. SDN 1 Gili Ketapang terletak di utara Pulau, yang tidak begitu banyak memiliki banyak murid. Karena letaknya yang kurang begitu strategis. Kemudian SDN 2 Gili Ketapang terletak di tengah Pulau bagian barat Gili ketapang yang memiliki banyak murid, 1 kelas bisa mencapai 50 murid. SD ketiga yaitu SDN 3 Gili Gili Ketapang, terletak di tengah Pulau bagian timur. Memiliki murid yang tidak kalah banyak dengan SDN 2 Gili Ketapang. Sekolah ini adalah sekolah yang paling baik kualitas pendidikannya menurut penduduk sekitar. Kemudian MI Mambaul Ulum, terletak di Pulau bagian barat, dengan status akreditasi C.

Tenaga pendidik untuk sekolah negeri di desa Gili Ketapang sebagian besar berasal dari luar desa ini mereka berasal dari Kota Probolinggo. Sedangkan untuk sekolah swasta seperti MI mambaul Ulum tenaga pendidikannya berasal dari warga masyarakat setempat. Walaupun tingkatan pendidikan mereka sangat tidak mencukupi untuk mengajar sekolah seperti MI, karena rata-rata pendidikan mereka hanya sampai SMP dan SMA. Sampai saat ini untuk SMP satu atap Gili Ketapang, tenaga pendidikannya banyak diambil dari tenaga pendidik SD yang ada di Gili Ketapang, karena sekolah ini kekurangan tenaga pendidik.

Rata-rata masyarakat Gili Ketapang setelah menamatkan pendidikan dari SD/MI, mereka melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren di luar desa Gili Ketapang. Walaupun ada sebagian dari mereka yang melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren yang ada kurikulum pendidikan nasionalnya. Namun banyak dari mereka yang kurang menganggap penting pendidikan formal. Mereka lebih menekankan pada pendidikan agama. Hanya sebagian kecil dari penduduk desa ini yang menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke jenjang perguruan tinggi. Seperti yang dikatakan oleh pegawai tata usaha SMPN Satu Atap Gili Ketapang,

yang telah bekerja di SMP tersebut selama kurang lebih 2 tahun terakhir mengatakan:

“Anak-anak di Gili ini rata-rata hanya lulus SD, kemudian mereka melanjutkan ke Pondok Pesantren. Yang tidak ada kurikulum pendidikan sekolahnya. Sehingga mereka hanya mendapat pendidikan agama saja tanpa ada pendidikan sekolahnya. Ini berlangsung sudah lama, naming akhir-akhir ini mereka mulai sadar tentang pentingnya pendidikan, tidak seperti awal dibukanya SMP ini. Dulu, sekolah kebingungan mencari anak didik, sehingga harus berkeliling kampung untuk mencari siswa dan itu bukan pekerjaan mudah. Karena orang-orang gili waktu itu acuh dengan dunia pendidikan. Padahal semua biaya pendidikan telah dibebaskan dan murid hanya dibebankan biaya buku penunjang seperti LKS. Lain halnya dengan keadaan SMP saat ini, sekolah kesulitan menampung siswa, karena kekurangan lokal kelas yang dimiliki.”
(Wawancara: Sabtu, 24 April 2010, pukul 11.30 WIB)

c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gili Ketapang

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Pulau Gili Ketapang sudah beroperasi sejak 10 tahun terakhir. Pembangkit listrik ini menyediakan listrik untuk masyarakat Gili Ketapang. Listrik di Pulau Gili Ketapang tidak dipasang meteran seperti pada umumnya pelanggan PLN di Pulau Jawa. Mereka hanya memasang saklar *on-off* di tiap-tiap rumah pelanggan. Sehingga tariff listrik di pulau rata untuk setiap pelanggan, yaitu sebesar Rp. 71.800 untuk daya 200 VA.

Sebelum ada PLTD di Pulau Gili Ketapang, masyarakat menggunakan lampu minyak untuk penerangan. Selain itu mereka juga menggunakan lampu petromaks, atau menggunakan lampu dari tenaga aki. Sedangkan untuk mereka yang mempunyai uang lebih menggunakan genset/diesel sebagai penerangan mereka. Dan ada juga yang patungan membeli diesel untuk dipakai bersama-sama. Setelah ada PLTD, masyarakat lambat laun mulai meninggalkan lampu minyak dan petromaks sebagai penerangan rumah mereka. Namun masih ada beberapa rumah yang menggunakan lampu minyak, petromaks dan diesel untuk penerangan rumah mereka. Karena pelayanan PLTD di Pulau ini hanya 6,5 jam. Listrik mengalir dari pukul 17.30 sampai dengan 24.00.

Konsumsi listrik masyarakat paling banyak hanya untuk penerangan dan hiburan seperti TV dan radio pada malam hari. Waktu siang hari, hampir tidak ada kegiatan masyarakat yang menggunakan listrik. karena tidak semua orang mempunyai disel sendiri. Sehingga alat-alat elektronik yang dimiliki penduduk tidak termanfaatkan. Seperti yang disampaikan salah satu pegawai PLTD gili ketapang:

“Aliran listrik di Pulau Gili Ketapang dimulai sekitar 10 tahun lalu, sebelumnya mereka menggunakan diesel dan lampu minyak. Listrik dinyalakan mulai dari pukul 17.30 dan berakhir sampai jam 24.00 setiap harinya. Listrik rata-rata digunakan sebagai penerangan, TV, Radio dan untuk mengisi ulang aki.”

(Wawancara: Selasa, 27 April 2010, Pukul 11.00 WIB)

d. Dermaga

Dermaga dipergunakan masyarakat untuk sarana berlabuh kapal-kapal pengangkut logistik keperluan masyarakat Gili Ketapang seperti sembako dan BBM yang didapat dari pasar yang ada di Kota Probolinggo. Dermaga ini juga digunakan untuk berlabuh kapal yang menyeberangkan masyarakat yang ingin pergi ke Kota Probolinggo. Selain dari itu, dermaga juga digunakan untuk mendaratkan hasil laut mereka sebelum dijual di pasar yang ada di pelabuhan tanjung tembaga Kota Probolinggo. Keberadaan dermaga di Pulau Gili Ketapang sangat penting bagi masyarakat setempat. Sehingga tidak heran jika dermaga ini selalu sibuk setiap harinya dengan lalu lalang sepeda motor dan juga becak motor. Tak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika dermaga ini rusak atau tidak dapat digunakan lagi.

Dermaga ini terletak di tengah Pulau bagian utara, dengan panjang kurang lebih 100 meter dan panjang 2 meter. Kelemahan dermaga ini adalah jika saat terjadi angin, ombak menjadi sangat besar. Sehingga transportasi barang, jasa, dan manusia terhambat sampai ombak sedikit reda. Dan jika ombak tak kunjung reda, maka masyarakat akan mengalihkan pendaratan di Pulau bagian

barat, atau di Pulau bagian selatan karena ombak tidak terlalu besar. Sehingga bisa dikatan dermaga adalah salah satu sarana yang vital bagi masyarakat di Pulau Gili Ketapang.

e. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Gili Ketapang

Sistem Penyediaan Air Minum yang dinikmati warga desa Gili Ketapang bersumber dari Ronggojalu, Kecamatan Tegalsiwalan, pipa air bersih ke Giliketapang disambung pada jaringan pipa terpasang PDAM di Desa Kedungdalem, Kecamatan Dringu. Selanjutnya melalui pipa di daratan sekitar 2,1 Km, pipa transmisi disambung lagi sejauh 890 m hingga pantai Desa Dringu. Air kemudian dialirkan melalui pipa bawah laut sepanjang 7 kilometer menuju Giliketapang. Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Pulau karang yang berjarak 5 Km dari Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo itu, pemerintah mengeluarkan dana Rp 18,7 miliar. Dana itu merupakan patungan, Rp 14,7 miliar dari APBN dan Rp 4 miliar dari APBD Kab. Probolinggo. Proyek ini bisa sampai terwujud juga karena bantuan dari Adjie massaid, selaku wakil rakyat darah pemilihan Probilinggo dan sekitarnya. Beliau membawa usulan SPAM ini di meja dewan DPRD pusat untuk dibahas dan kemudian dapat disetujui. Sebelum air bersih melalui pipa bawah laut mengalir ke Giliketapang, warga Pulau tersebut membeli air bersih dari Probolinggo. Air bersih diangkut sejumlah perahu sehingga harganya relatif mahal.

Proyek SPAM ini sudah mulai beroperasi sejak bulan Januari tahun 2010 kemarin, sehingga masyarakat tidak perlu lagi membeli air dari Kota Probolinggo untuk keperluan sehari-hari. Tarif air PDAM di desa Gili ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo dipatok Rp 7.500/meter kubik. Tarif air Rp 7.500 itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif air PDAM di Kota Probolinggo yang 1.300/meter kubik. Sisi lain, PDAM menetapkan pemakaian minimal air 5 meter kubik/bulan bagi pelanggan di Giliketapang. Sehingga jika

mereka hanya memakai air sebanyak 3 atau 4 meter kubik saja, tarifnya kan tetap Rp. 37.500. Seperti yang dikatakan oleh ibu Sundari, selaku pegawai teknis PDAM, beliau merupakan warga asli Pulau Gili Ketapang yang direkrut oleh PDAM Kabupaten Probolinggo untuk mengurus pembayaran jasa air PDAM.

“Air PDAM ini bisa berhasil karena bantuan dari Adjie Massaid, karena beliau adalah anggota DPR yang daerah pilihannya di Probolinggo dan sekitarnya. Masyarakat awalnya keberatan dengan tarif yang mahal, disbanding dengan harga air eceran. Kemudian pihak PDAM menurunkannya hingga seperti harga saat ini. Mereka juga keberatan dengan minimal biaya pemakaian yang harus 5 M³ setiap bulannya.”
(Wawancara: Jumat, 30 April 2010, Pukul 19.30 WIB)

f. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

Tujuan umum pembentukan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan oleh pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengeolaan pembangunan. Sedangkan tujuan khususnya meliputi: meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal. Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat. Melembagakan pengelolaan dana bergulir. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa dalam pengelolaan pembangunan. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan.

Program PNPM Mandiri Pedesaan yang telah berjalan di desa Gili Ketapang dimanfaatkan masyarakat untuk membangun fasilitas sekolah, yaitu pembangunan gedung TK Gili Ketapang. Untuk pembangunan gedung TK

menelan biaya sebesar Rp. 149 juta. Dan pengerasan jalan berupa rabat jalan desa yang menelan biaya Rp. 92.201.200 dengan panjang 370 meter dan lebar 2 meter. Selain itu juga digulirkan dana untuk membantu permodalan usaha perempuan nelayan yang terbagi dalam 3 kelompok usaha. Yaitu kelompok Gita dharma, kelompok Gili antika, dan kelompok yang ketiga yaitu Nusa indah. Setiap kelompok tersebut secara berurutan mendapatkan dana sebesar Rp. 5 juta, Rp. 5,4 juta dan kelompok ketiga mendapatkan Rp. 5,5 juta. Keputusan usulan penggunaan dana PNPM mandiri pedesaan tersebut sebelumnya telah dimusyawarahkan untuk mencari kata mufakat ditingkat desa dan kemudian dibawa ke tingkat kecamatan. Seperti yang dikatakan Ibu Sundari, beliau adalah sekretaris PNPM mandiri pedesaan di desa Gili Ketapang.

“Musyawarah untuk menentukan alokasi dana dilakukan di balai desa, dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pengurus PNPM mandiri desa Gili Ketapang. Mereka merumuskan alokasi penggunaan dana untuk pembangunan apa saja dengan pertimbangan kebutuhan yang mendesak di Pulau Gili Ketapang. Sedangkan pemberian dana untuk pengembangan usaha dilakukan dengan pertimbangan kelancaran pengembalian dana, jika dirasa mereka yang mendaftar akan membelot saat membayar, maka tidak diberikan dana tersebut.” (Wawancara: Minggu, 2 Mei 2010, Pukul 09.00 WIB)

g. Kesehatan

Pelayanan kesehatan di Pulau Gili Ketapang dilayana oleh seorang mantra kesehatan (perawat kesehatan) dan seorang bidan desa. Mantri desa melayani keluhan kesehatan ringan masyarakat setempat. Jam kerja mantra desa mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang, selanjutnya mantri membuka praktek pribadi di rumah dinas yang berada di lingkungan bangunan kelurahan. Praktek pribadi mantri ini melayani masyarakat 24 jam, sewaktu-waktu ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan. Namun sayang pelayanan kesehatan yang diberikan oleh mantri desa kurang optimal, karena mantri desa hanya melayani masyarakat dari hari senin sampai dengan hari kamis saja. Karena mantri desa pulang ke rumah yang ada di Kota Probolinggo.

Selanjutnya jika masyarakat mengalami keluhan kesehatan harus menunggu sampai hari senin atau mereka menyeberang ke Kota Probolinggo untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Mayangan atau di R.S. Kota Probolinggo.

Sedangkan bidan desa juga demikian, pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang begitu optimal. Bidan desa sering pulang ke rumah yang ada di Probolinggo, karena bidan desa tinggal sendirian di rumah dinas yang ada di Pulau Gili Ketapang. Jam pelayanan kesehatan bidan desa, sama halnya dengan jam pelayanan mantri desa. Yaitu dari jam 8 samai dengan jam 2 siang, dari hari senin sampai dengan hari kamis. Bidan bertugas membantu pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi perempuan. Seperti pelayanan persalinan dan konsultasi KB. Seperti yang disampaikan bapak Dani, selaku mantri desa yang bertugas di Desa Gili Ketapang.

“Pelayanan kesehatan Puskemas pembantu dimulai pukul 8 sampai dengan jam 2 siang. Setelah itu saya buka praktek pribadi di sini (rumah dinas mantri desa). Begitu juga dengan bidan, pelayanannya sama. Bidan juga membuka praktek sendiri setelah jam kantor usai. Orang-orang yang dengan keluhan ringan yang bisa kita tangani. Jika keluhannya berat, kami tidak bisa memberikan tindakan lebih lanjut. Karena keterbatasan peralatan, obat-obatan dan juga tenaga. Sehingga dirujuk ke Puskesmas Mayangan atau Rumah Sakit Kota Probolinggo.”
(Wawancara: Senin, 3 Mei 2010, Pukul 19.00 WIB)

h. Kelompok Usaha Bersama Mina Makmur

Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Makmur yang ada di desa Gili Ketapang didirikan sejak tanggal 3 januari tahun 2005. KUB Mina Makmur ini di prakarsai oleh bapak Rofi'l, yang berawal dari keinginan beliau untuk membentuk paguyuban nelayan. Dan ganyungpun bersambut, pihak pemerintah dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) memberikan bantuan dana sebagai modal awal pembentukan KUB tersebut. Misi utama pembentukan KUB ini adalah untuk menggali dan melestarikan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang nantinya diharapkan dapat berkembang secara optimal sesuai

dengan potensi yang mereka miliki. Munumbuhkan semangat kemandirian, kegotongroyongan kedisiplinan, dan sportifitas dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian bersama untuk kesejahteraan bersama. Selain misi tersebut diatas, tujuan pembentukan KUB ini adalah untuk memberdayakan perempuan nelayan yang tidak memiliki pekerjaan. KUB diharapkan mampu menampung kreatifitas mereka dan secara tidak langsung mampu menaikkan taraf hidup ekonomi mereka. Kondisi ini diharapkan mampu mengatasi keadaan ekonomi mereka disaat sedang tidak musim ikan.

Bidang usaha yang dibentuk di KUB ini adalah pelayanan jasa simpan pinjam untuk kebutuhan penangkapan ikan dan pengolahan hasil perikanan. Penerapan teknologi penangkapan ikan dan pengolahan hasil perikanan serta pengendalian sampai ke pemasaran. Sesuai dengan yang dikatakan bapak H. Rofi'l Zasli, selaku ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) "Mina Bahari Makmur":

"KUB ini dibentuk dari keinginan masyarakat untuk membuat suatu kelompok usaha pengolahan hasil perikanan, dan kemudian saya mengajukan bantuan ke Pemerintah (Departemen Kelautan dan Perikanan) Kabupaten probolinggo yang ada di Dringu. Dan kemudian diberikan bantuan dana unutm menjalankan usaha pengolahan hasil perikanan. Dan hasilnya alhamdulillah dapat dinikmati masyarakat"
(Wawancara: Sabtu, 1 Mei 2010, Pukul 10.00 WIB)

i. Akses Terhadap Pelayanan Publik

Semua masyarakat Pulau Gili Ketapang dapat mengakses dan menikmati semua fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo mulai dari listrik PLTD Gili Ketapang, walaupun hanya mengalir 6,5 jam per hari. Kemudian air bersih dengan dibangunnya SPAM Gili Ketapang yang telah mengalir di rumah-rumah warga, walau harga air per meter kubiknya sangat mahal jika dibandingkan dengan harga air PDAM yang ada di Kabupaten atau Kota Probolinggo saat ini. Kemudian di bidang pendidikan juga demikian, dengan program pemerintah sekolah gratis yang dibiayai program BOS (Bantuan

Operasional Sekolah). Sehingga anak-anak Pulau Gili Ketapang dapat bersekolah dengan tidak dipungut biaya. Program BOS ini dinikmati oleh murid di sekolah dasar negeri maupun swasta dan sekolah menengah pertama satu atap yang ada di Pulau Gili ketapang. Akses terhadap fasilitas publik tersebut terbuka lebar bagi semua masyarakat Pulau Gili Ketapang. Selain pelayanan tersebut diatas juga dalam pelayanan pemerintahan desa, masyarakat sudah mampu mengaksesnya dengan dilayani para pamong, sekdes, dan kepala desa.

4. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pembangunan Pulau Gili Ketapang

a. Faktor Pendukung Pembangunan Pulau Gili Ketapang

1. Internal

- Keinginan masyarakat untuk berubah kearah yang lebih baik. Kedudukan masyarakat dalam hal ini mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Untuk itulah peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan, pembangunan dan merawat hasil pembangunan. Peran masyarakat menempati urutan pertama, karena jika masyarakat Pulau Gili Ketapang tidak ingin berubah, sebesar apapun usaha yang dilakukan pemerintah tidak akan mendapatkan hasil sesuai dengan rencana awa.
- Mulai terbukanya pemikiran masyarakat tentang pentingnya pembangunan bagi Pulau Gili Ketapang.

Pemikiran masyarakat tentang pentingnya pembangunan sudah mulai terbuka. Mereka sadar jika pembangunan mutlak diperlukan untuk mengatasi ketertinggalan dalam beberapa bidang. Sehingga mereka menyambut baik setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah

Kabupaten Probolinggo, walaupun masih ada sedikit masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan tersebut.

2. Eksternal

- Potensi wisata bahari yang sangat terbuka lebar, sehingga memungkinkan untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan pemasukan desa dan mengangkat perekonomian masyarakat.

Potensi yang ada harus dikembangkan, namun juga harus dengan kerjasama masyarakat setempat, selaku orang yang paling dekat. Jika potensi ini dikembangkan dengan baik, maka akan memberikan hasil yang baik bagi masyarakat Pulau Gili Ketapang.

- Ketersediaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di Pulau Gili ketapang, seperti air, tanah, dan ekosistem pesisir pada akhirnya akan menentukan daya dukung suatu sistem Pulau kecil dalam menopang kehidupan manusia penghuni dengan segenap aktivitasnya.
- Produktivitas sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di setiap unit ruang di dalam Pulau Gili Ketapang dan yang terdapat di sekitar Pulau (seperti ekosistem terumbu karang dan perairan pesisir) saling terkait satu sama lain secara sangat erat, karena terumbu karang adalah tempat ikan beruaya. Mengingat lebih dari 75% masyarakat desa Gili Ketapang menggantungkan hidupnya di sektor perikanan.

b. Faktor Penghambat Pembangunan Pulau Gili Ketapang

1. Internal

- Sumberdaya manusia yang kurang berkualitas yang menyebabkan kurangnya tenaga ahli dalam perumusan dan pengusulan pembangunan. Mengingat kesadaran untuk mengenyam pendidikan masyarakat Pulau Gili Ketapang sangat rendah.



- Budaya lokal masyarakat desa Gili Ketapang yang beberapa bertentangan dengan kegiatan pembangunan.

2. Eksternal

- Ketergantungan ekonomi masyarakat Pulau Gili Ketapang dengan keadaan ekonomi di Kota Probolinggo. Karena semua kebutuhan hidup masyarakat Pulau Gili Ketapang berasal dari pasar yang ada di Kota Probolinggo, sehingga secara langsung atau tidak langsung terjadi ketergantungan pasar.
- Ukuran Pulau Gili ketapang yang kecil, menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana menjadi mahal. Sumberdaya manusia yang handalpun menjadi kendala yang serius.
- Keterbatasan transportasi
- Keterbatasan Sumber Alam

D. Analisis Dan Interpretasi Data

1. Analisis potensi dan manfaat yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir dan lautan Pulau gili ketapang

Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu memerlukan informasi tentang potensi pembangunan yang dapat dikembangkan di suatu wilayah pesisir dan lautan serta permasalahan yang ada dan kemungkinan akan muncul. Pengetahuan ini sangat penting, karena pengelolaan sumber daya pesisir secara terpadu membutuhkan kerjasama dari pihak pemerintah sebagai pembuat keputusan/kebijakan dan masyarakat setempat sebagai bagian yang paling dekat hubungannya dengan pesisir tersebut. Harus ada timbal balik yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat, karena tujuan dari pengelolaan dan pembangunan sumber daya pesisir adalah

untuk kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan

Potensi pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan secara garis besar terdiri dari dua kelompok yaitu, pertama yakni sumber daya yang dapat pulih, dan yang kedua adalah sumber daya yang tidak dapat pulih. Seberapa besar pemanfaatan yang telah digali dari kedua kelompok sumber daya tersebut tergantung dari masyarakat dan kebijakan yang ada. Padahal jika pemanfaatannya dapat dioptimalkan dan manajemen yang baik, maka akan sangat menguntungkan untuk peningkatan produk domestik bruto dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat Pulau Gili Ketapang, saat ini sudah lebih terbuka dengan pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah. Dahulu masyarakat Pulau ini kurang bisa menerima dengan pembaharuan, sehingga optimalisasi sumber daya pesisir yang dimiliki Pulau ini menjadi terhambat. Tak heran jika Pulau Gili Ketapang masih perawan sampai saat ini, karena masih belum banyak dilakukan pembangunan dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam. Dalam hal ini kaitannya dengan eksploitasi dan eksplorasi potensi Pulau Gili Ketapang dibidang pariwisata. Padahal, jika potensi tersebut dikembangkan, akan sangat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Pulau Gili Ketapang.

Dikebanyakan desa Pulau dan desa pesisir pada umumnya, desa Gili Ketapang juga megalami permasalahan yang hampir sama. Permasalahan tersebut yaitu krisis energi, air, kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Dengan mencermati permasalahan desa Pulau, maka bingkai kemandirian desa dapat diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar desa Pulau. Strategi

operasional pembangunan desa pesisir dalam membentuk bingkai kemandirian desa melalui sejumlah proses. Proses identifikasi potensi lokal, yaitu identifikasi kekuatan modal manusia, modal alam, dan modal sosial.

Kemudian analisis kebutuhan masyarakat Pulau. Perencanaan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif untuk merumuskan sejumlah program pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan pengelolaan sumberdaya alam, agar sumber daya yang ada dapat dikelola secara maksimal tanpa melupakan kelestariannya. Menyusun penataan ruang desa secara partisipatif sesuai dengan arah dari renstra. Pengembangan kapasitas organisasi sosial dan organisasi pemerintahan desa. Masyarakat desa perlu membentuk organisasi pengelola sumberdaya yang ada di Pulau Gili Ketapang sebagai salah satu bentuk implementasi praktek pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat. Langkah-langkah awal yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alamnya. Selanjutnya adalah bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya tersebut agar mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

a. Potensi Perikanan

Pulau Gili Ketapang membentang di utara Kota Probolinggo sepanjang \pm 2,1 Km yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang cocok untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan antara lain penangkapan ikan dan pengolahan hasil perikanan. Perairan di sekitar Pulau Gili Ketapang terletak di selat Madura sehingga mempunyai posisi yang strategis. Perairan ini mencakup wilayah yang cukup luas sehingga mempunyai potensi perikanan tangkap yang besar. Potensi perikanan ini perlu dikelola dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan lestari.

Berdasarkan pada potensi sumber daya perikanan yang ada, maka pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Probolinggo mengusahakan

potensi kelautan dan perikanan menjadi berbagai kegiatan ekonomi yang perlu dipacu melalui peningkatan investasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup agar mampu memberikan sumbangan yang lebih besar pada upaya pembangunan Kabupaten Probolinggo pada umumnya dan Pembangunan desa Gili Ketapang pada khususnya.

b. Potensi Pariwisata

Potensi pariwisata yang ada di Pulau Gili Ketapang adalah potensi perairan di barat Pulau, berupa pantai dengan pasir putih dan ombak yang tenang. Walaupun pantai ini bisa dikatakan sempit, namun pemandangannya sangat indah. Hanya perlu sedikit ditambah dengan fasilitas penunjang. Pembangunan pariwisata perlu dikembangkan dengan mempersiapkan penduduk dengan sosialisasi.

Ada beberapa faktor yang mendukung pengembangan pariwisata di Pulau Gili Ketapang seperti aspek sumberdaya alam dan kondisi infrastruktur. Aspek Sumberdaya Alam. Pengembangan pariwisata suatu daerah sangat tergantung dari potensi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Dapat atau tidak memberi kontribusi terhadap pembangunan daerahnya. Pulau Gili Ketapang dikelilingi oleh selat Madura dengan pantainya landai dan pasir putih dengan ombak yang tidak terlalu besar. Potensi sumberdaya alam yang ada di Pulau Gili Ketapang adalah pantai yang berada di sebelah barat Pulau. Pantai tersebut sangat indah dan masih perawan. Belum ada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Probolinggo dengan Pulau Gili Ketapang.

Kondisi Infrastruktur, untuk mendukung terciptanya kenyamanan dan keamanan pariwisata adalah memiliki kondisi infrastruktur yang sangat baik. Keamanan pariwisata merupakan suatu proses yang pada akhirnya menuju pada

kenyamanan pariwisata. Kehidupan pariwisata akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh jalan yang baik untuk menghubungkan berbagai unsur-unsur pendukung pariwisata seperti, aksesibilitas. Untuk mencapai Pulau Gili Ketapang terdapat sarana transportasi laut berupa perahu taxi dari pelabuhan tanjung tembaga Kota Probolinggo. Di pelabuhan tanjung tembaga disediakan tempat parkir. Sarana ini sangat diperlukan pada suatu daerah tujuan wisata karena ini merupakan kebutuhan wisatawan yang bertempat tinggal jauh dari lokasi tujuan wisata. Sarana komunikasi di Pulau Gili Ketapang terdiri dari sambungan telepon, jaringan HP, surat kabar dan televisi. Surat kabar yang masuk ke Pulau Gili Ketapang adalah Radar Bromo, siaran televisi dapat diterima dengan baik, namun hanya pada malam hari saja.

Dalam hal kebijakan pemerintah, pelaksanaan pembangunan pariwisata perlu diterapkan melalui kebijakan dan program yang terencana dan terarah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Provinsi Jawa Timur. Pembangunan pariwisata terus diarahkan untuk dapat memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Pengembangan pariwisata di daerah kunjungan wisata diusahakan agar tetap menjaga keseimbangan dan keserasian dalam memanfaatkan kekayaan alam dan budaya. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan wisata dengan mendorong pertumbuhan usaha kepariwisataan, meningkatkan mutu produk wisata, menyederhanakan dan memudahkan perizinan.

Pengembangan pariwisata di Pulau Gili Ketapang dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan setiap potensi yang ada. Menggali potensi yang baru dan mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia. Pengembangan ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dan dikoordinasi dari pemerintah setempat dan warga Pulau Gili Ketapang. Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang merumuskan pola dan



rencana pembangunan, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD) yang mengkoordinasi penanam modal terutama dari pihak swasta, serta Dinas Pariwisata yang merupakan lembaga perencanaan pengembangan pariwisata dan melaksanakan program - program yang telah direncanakan bersama-sama dengan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Pulau Gili Ketapang, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan faktor penghambat yang mungkin akan terjadi dalam pengembangan wisata di Pulau Gili Ketapang adalah sampah dan kondisi sumber daya manusia. Sampah menjadi ancaman bagi pengembangan wisata bahari di Pulau Gili Ketapang. Hal ini dikarenakan masyarakat setempat yang selalu membuang sampah domestik ke laut. Mereka tidak membuat tempat sampah khusus yang digali di sekitar pekarangan mereka atau tempat sampah pusat bagi seluruh Pulau, hal ini membuat kondisi Pulau menjadi sangat kotor. Ditambah dengan banyaknya kambing yang berkeliaran di jalan dan kotorannya yang berserakan di jalan. Keadaan ini tidak bisa diubah begitu saja, karena sempitnya Pulau Gili Ketapang dan jumlah penduduk yang makin banyak. Pemahaman mereka tentang pentingnya kebersihan lingkungan juga kurang. Hal ini berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang sangat rendah.

Selain itu adalah aspek sumber daya manusia. Salah satu pendorong akan suksesnya pembangunan adalah tersedianya sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut. Sebagian besar penduduk di Desa Gili Ketapang bekerja di sektor perikanan tangkap sebagai nelayan. Kualitas sumberdaya manusia di Desa Gili Ketapang bias dikatakan kurang. Karena tingkat pendidikan penduduk sangat rendah, hanya sebatas lulusan SD. Selain itu juga pemikiran masyarakat yang masih kolot, kurang bisa menerima perbedaan dan pembaharuan yang terus terjadi. Hal ini akan menjado ancaman

yang serius bagi pengembangan potensi pariwisata yang ada di Pulau Gili Ketapang.

2. Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pulau Gili Ketapang

a. Perekonomian Masyarakat Pulau Gili Ketapang

Melihat kondisi ekonomi masyarakat Pulau Gili Ketapang saat ini bisa dikatakan berada di kondisi mengengah keatas. Bila dibandingkan dengan masyarakat pertanian, kondisi ekonomi mereka jauh lebih baik dan lebih mapan. Namun, seperti keadaan umum masyarakat nelayan dan pesisir di Indonesai, kondisi manajemen keuangan mereka sangat buruk, hal ini pin juga terjadi di masyarakat Pulau Gili Ketapang. Kondisi ini mungkin berkaitan dengan tingkat pendidikan yang mereka dapatkan. Karena masyarakat di Pulau ini kurang begitu menganggap penting pendidikan sekolah formal. Mereka lebih menitik beratkan pada pendidikan agama bagi putra putri mereka.

Kehidupan ekonomi masyarakat Pulau Gili Ketapang sangat dipengaruhi oleh banyak sedikitnya jumlah tangkapan ikan nelayan. Karena satu-satunya sumber penghidupan masyarakat di desa Gili Ketapang adalah ikan dan hasil olahan ikan seperti kerupuk, ikan kering, trasi, petis, ikan pindang, tepung ikan dan teri. Tidak ada sumber ekonomi lain selain ikan, karena luas Pulau Gili Ketapang ini sangat kecil dan banyaknya penduduk yang mendiami Pulau ini. Pulau Gili Ketapang identik dengan ikan segar, karena hampir semua ikan yang ada di TPI yang ada di Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo berasal dari tangkapan nelayan Desa Gili Ketapang. Sehingga sector perikanan memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian di Pulau Gili ketapang.

Jika mereka mendapatkan hasil tangkapan yang banyak, maka otomatis mereka akan membelanjakan uang mereka lebih banyak, tanpa menyisakan sedikitpun untuk ditabung. Dan jika kondisi ikan sedang sepi atau sedang tidak

musim ikan mereka akan menghutang ke juragan kapal. Kondisi yang seperti ini menyebabkan mereka terbelit hutang pada salah satu juragan, kapal yang akhirnya membuat ikatan yang sulit untuk dipisahkan diantara mereka. Ikatan yang tidak tertulis ini di sisi lain dapat dikatakan merugikan, namun di sisi lain juga membantu perekonomian keluarga nelayan.

b. Kehidupan Sosial Masyarakat Pulau Gili Ketapang

Melihat kesejahteraan nelayan, tidak bisa dipandang dalam satu sudut pandang. Pandangan terhadap pengertian kesejahteraan tidak selalu sama, misalnya pandangan kesejahteraan menurut nelayan, buruh nelayan, guru, pedagang dan sebagainya. Bagi orang-orang awam, kesejahteraan seseorang atau masyarakat diukur dengan jumlah serta nilai harta kekayaan yang dimiliki atau yang dikuasa. Makin banyak jumlahnya dan makin tinggi nilainya harta kekayaan tersebut maka makin tinggi taraf kesejahteraan hidupnya. Karena itu, mereka bekerja membanting tulang untuk mengumpulkan harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Kebutuhan hidup itu bermacam-macam, akan tetapi apabila digolongkan hanya ada tiga, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer berupa barang-barang pangan, sandang dan papan yang pertama-tama dituntut. Kemudian barang-barang dapat ditanggihkan penggunaannya disebut kebutuhan sekunder, misalnya berupa barang-barang kenikmatan kemewahan dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah kebutuhan yang bisa ditunda lebih lama pemenuhannya. Pandangan yang berbeda dari pandangan tersebut yang dianut masyarakat umum, terutama yang hidup di daerah pedesaan.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat pesisir dan nelayan adalah sama. Masalah tersebut adalah kemiskinan. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan

untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Namun rata-rata masyarakat di Pulau Gili Ketapang tidak bisa dikatakan miskin. Karena mereka telah mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka. Mereka mampu membeli berbagai kebutuhan sekunder seperti perhiasan dan berbagai barang lainnya. Selain itu mereka juga telah beranjak ke kebutuhan tersier yaitu menunaikan ibadah haji dengan biaya puluhan juta rupiah. Kemiskinan di Pulau ini bisa dikatakan kemiskinan musiman, jika sedang musim ikan, mereka kaya dan jika sedang tidak musim ikan mereka miskin.

Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu dihadapkan pada berbagai masalah sosial. Masalah sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri karena masalah sosial merupakan hasil dari hubungan-hubungannya dengan sesama manusia. Di Pulau Gili Ketapang bisa dikatakan tidak ada masalah sosial yang timbul diantara mereka. Kondisi kehidupan sosial yang seperti ini akibat hampir tidak adanya perbedaan diantara mereka. Masyarakat Pulau Gili Ketapang menganut agama yang sama, aliran kepercayaan yang sama dan beberapa kesamaan lainnya. Hal ini membuat mereka menjadi etnosentisme. Yang berakibat pada tidak bisanya mereka menerima perbedaan yang masuk di tengah-tengah mereka. Mereka menganggap hanya merekalah yang paling benar diantara yang lainnya. Hal ini sangat bertentangan dengan azas "Bhineka Tunggal Ika" yang dianut bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia ini lahir dengan berbagai perbedaan yang membuat keunikan tersendiri. Perbedaan tersebut selayaknya dipandang bukan sebagai pemecah persatuan, namun dipandang sebagai bagian yang mempererat persatuan.

Kondisi ini telah berjalan sangat lama dan turun menurun, sehingga membuat pemikiran mereka menjadi kolot. Mereka tidak bisa menolerir perbedaan, tidak bisa menghargai kemajemukan. Padahal diluar Pulau Gili

Ketapang banyak ditemui perbedaan yang menghasilkan suatu kolaborasi yang sangat indah. Masyarakat Gili Ketapang yang seperti saat ini, kemungkinan disebabkan karena mereka jarang bepergian keluar daerah. Sehingga pemikiran mereka masih belum terbuka dengan hal-hal baru dan perbedaan yang terjadi di masyarakat.

Masyarakat Pulau Gili Ketapang secara keseluruhan membedakan berbagai kedudukan sosial menurut suatu skala tinggi rendah kedudukan yang mengakibatkan adanya sejumlah lapisan sosial yang meliputi seluruh masyarakat. Lapisan sosial terdiri dari sejumlah kedudukan resmi atau tidak resmi, yang dianggap sama tinggi atau sama rendah tingkatannya. Orang yang dianggap menempati kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan tertentu dianggap mempunyai gengsi yang lebih dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan. Dan yang lebih tinggi diperlakukan sesuai dengan kedudukannya.

Lapisan sosial yang terjadi di Pulau Gili Ketapang dapat dikelompokkan dalam berbagai golongan lapisan. Lapisan sosial yang didasari dari ukuran kekayaan, barang siapa yang mempunyai kekayaan paling banyak, maka dia akan menduduki lapisan paling atas dan akan di hormati masyarakat sekitar. Kemudian yang paling berpengaruh menjadikan lapisan sosial di Pulau Gili Ketapang adalah status Haji atau Hajjah yang disandang mereka. Status Haji atau Hajjah bukan lagi menjadi suatu kebutuhan ibadah saja, namun lebih pada untuk memenuhi gengsi sosial yang akan ditimbulkan setelah mereka melaksanakan ibadah tersebut. Mereka akan lebih menghormati seseorang yang telah menunaikan ibadah haji, dan panggilan mereka juga akan berubah, untuk laki-laki dipanggil *Abah*, dan bagi perempuan di panggil *Umi*.

Kelembagaan masyarakat yang tumbuh di masyarakat Desa Gili Ketapang dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu; (1) Kelembagaan formal yang proses pembentukannya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;

serta (2) Kelembagaan non formal yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat setempat. Beberapa kelembagaan formal yang terdapat di Desa Gili Ketapang adalah LKMD, PKK, Posyandu, dan lain sebagainya. Adapun kelembagaan non formal yang terdapat di lingkungan masyarakat, adalah; kelompok pengajian (majlis taklim) yang tumbuh di setiap lingkungan, kelompok yasin, kelompok arisan ibu-ibu, kelompok nelayan, kelompok pedagang pasar. Dinamika sosial masyarakat dan tingkat keterbukaan masyarakat terhadap media massa dan sumber informasi telah mendorong tumbuhnya kesadaran sebagian kelompok masyarakat untuk membentuk wadah bagi berlangsungnya proses belajar dan mengembangkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki, sekaligus berperan dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas perekonomian, kegiatan sosial serta proses penyadaran dan pendidikan lingkungan.

c. Bentuk Ketimpangan Pembangunan yang terjadi

Ketimpangan pembangunan yang terjadi di Pulau Gili Ketapang salah satunya dari bidang pendidikan. Di Pulau Gili Ketapang keadaan sarana pendidikan bisa dikatakan kurang layak. Disanan masih kekurangan jumlah local kelas, tenaga pengajar maupun fasilitas penunjang lainnya. Akibatnya, sumberdaya manusia yang dihasilkanpun juga tidak bisa semaksimal mungkin. Hal ini menjadi penting, karena pembangunan sumber daya manusia juga penting. Sebagai salah satu usaha untuk menambah *soft skill* sumber daya manusia di Pulau Gili Ketapang. Jika sumber daya manusia sudah unggul, maka, proses pembangunan selanjutnya tidak akan sesulit jika keadaan sumberdaya manusia yang masih rendah. Selama ini ketimpangan yang terjadi bukan merupakan salah siapa-siapa, bukan pemerintah maupun jalan pikir masyarakat pulau Gili Ketapang. Dan bukan saat yang tepat untuk mencari siapa yang salah, namun lebih kepada bagaimana arah kebijakan lanjutan yang nantinya harus

ditempuh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Dengan melihat kondisi tersebut, pasti akan diketahui apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan untuk mengatasinya. Dengan menganalisis masalah yang ada perlu di rumuskan tujuan utama penanggulangan ketimpangan pembangunan yang telah terjadi selama ini.

Kemudian diperkirakan hambatan-hambatan apa saja yang akan terjadi dalam perumusan suatu kebijakan. Dalam masalah pendidikan perlu diperbaiki jumlah lokal kelas yang ada sehingga para peserta didik bisa nyaman dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru mereka. Namun dalam masalah penyediaan energy masih harus lebih panjang lagi pembahasannya mengingat hal ini juga melibatkan banyak sekali aspek dan biaya. Kemudian dalam pembangunan sumber daya manusia yaitu dengan melakukan pelatihan *soft skill* bagi masyarakat. Agar mereka mampu bersaing dimasa mendatang.

Selanjutnya, selain masalah pendidikan yaitu masalah pelayanan kesehatan di Pulau Gili Ketapang. Pelayanan kesehatan hanya dilayani oleh 2 orang tenaga medis, 1 bidan dan 1 tenaga perawat kesehatan. Selain itu, setiap minggu mereka harus kembali ke Kota Probolinggo untuk menjenguk keluarga mereka. Sehingga tidak ada pelayan kesehatan yang menggantikan mereka di Pulau Gili Ketapang. Untuk itu, diperlukan tenaga medis tambahan yang bisa menggantikan keberadaan mereka jika mereka pergi ke Kota Probolinggo. Seperti halnya mengangkat penduduk asli Pulau Gili Ketapang yang mempunyai kecakapan merawat kesehatan, seperti halnya mereka dari lulusan Akademi Keperawatan untuk membantu tugas perawat kesehatan. Agar pelayanan kesehatan tidak terhenti saat petugas tidak sedang di tempat.

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, pemerintah mulai memperhatikan batas ambang minimal pembangunan daerah. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem pemerintah dalam pemerataan

pembangunan, agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan. Salah satu bentuk *Good Governance* atau penyelenggaraan pemerintah yang baik, yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengajak semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Tegaknya supremasi hukum, hukum harus adil dan diberlakukan kepada siapapun tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Kesetaraan: semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Efektifitas dan efisiensi: proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Akuntabilitas para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

Kemudian yang menjadi standar pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* dengan memenuhi 4 syarat minimal. Yaitu bidang pelayanan kewarganegaraan sebagai contoh yaitu pelayanan pemerintahan dan pencatatan sipil oleh pamong desa, pelayanan kesehatan seperti fasilitas penunjang kesehatan dan tenaga medis yang disediakan, pelayanan pendidikan yang berkaitan dengan tenaga pendidik dan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang ada, dan bidang kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan bidang ekonomi dan angka harapan hidup. Di Pulau Gili Ketapang, tidak semua syarat tersebut dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah. Hal tersebut menjadikan pulau Gili Ketapang tertinggal dengan daerah lain.

Sebagai contoh adalah sarana dan prasarana fasilitas pendidikan seperti ruang kelas yang masih terbatas sehingga menyebabkan para anak didik berdesak-desakan di dalam kelas. Selain sarana fisik juga sarana non fisik, seperti tenaga pendidik yang sangat minim. Mereka berasal dari Kota dan Kabupaten Probolinggo, sehingga harus pulang-pergi setiap hari. Kemudian dalam bidang kesehatan juga demikian, kekurangan tenaga medis, hal tersebut mengakibatkan pelayanan kesehatan tidak maksimal. Padahal pemerintah telah mensyaratkan 4 (empat) hal tersebut diatas untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan untuk mewujudkan *Good Governance*. Jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat dikatakan jika pulau Gili Ketapang mengalami ketimpangan pembangunan.

Pendidikan di Kabupaten Probolinggo mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah dicanangkan pemerintah beberapa tahun terakhir. Kurikulum ini mengacu pada pengembangan kurikulum yang diletakan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Pemberdayaan sekolah dan satuan pendidikan dengan

memberikan otonomi yang lebih besar, di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat juga merupakan sarana peningkatan kualitas, efisisen, dan pemerataan pendidikan. KTSP merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan masing-masing.

Otonomi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja guru dan staf sekolah, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan, khususnya kurikulum. Pada sistem KTSP, sekolah memiliki “full authority and responsibility” dalam menetapkan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan tersebut, sekolah dituntut untuk mengembangkan strategi, menentukan prioritas, megendalikan pemberdayaan berbagai potensi seklah dan lingkungan sekitar, serta mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat dan pemerintah. Namun, keadaan ini membuat satuan tingkat pendidikan di Pulau Gili Ketapang menjadi sangat longgar. Mereka harus menyesuaikan dengan jadwal pendidikan non formal yang berlaku di pulau Gili Ketapang (pondok pesantren). Sehingga pendidikan formal di sekolah seperti dianak tirikan.

Untuk lebih jelasnya mengenai bentuk ketimpangan kesehatan dan pendidikan yang terjadi pada pulau Gili Ketapang dengan daerah lain di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada table 9 berikut ini.

Tabel 9

Bentuk Ketimpangan Pembangunan di Pulau Gili Ketapang

No.	Bidang Pembangunan	Keterangan
1.	Kewarganegaraan	Pelayanan kewarganegaraan, yang berkaitan dengan pencatatan sipil, pemerintahan desa tidak terdapat masalah. Walaupun kantor desa tidak buka, tetapi pamong desa siap melayani masyarakat di rumah mereka dan juga pada saat tidak jam kantor.
2.	Pendidikan	Kurangnya fasilitas pendidikan, seperti ruang kelas yang tidak bisa menampung murid karena banyaknya peserta didik. Kurangnya tenaga pendidik, dan fasilitas penunjang pendidikan. Selain itu juga jadwal pendidikan formal dan non formal yang saling bertabrakan menyebabkan terhambatnya proses pendidikan.
3.	Kesehatan	Pelayanan kesehatan kurang maksimal, karena tenaga pelayan kesehatan yang sangat minim. Dan fasilitas penunjang kesehatan yang sangat terbatas. Sehingga menyebabkan terhambatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
4.	Kesejahteraan	Kondisi kesejahteraan masyarakat Pulau Gili Ketapang berada di tingkat menengah keatas. Kondisi ini bisa dilihat dari gaya hidup dan kondisi ekonomi mereka.

Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelayanan pada masyarakat, advokasi kesehatan dan pengawasan sosial dalam pembangunan kesehatan belum banyak berkembang. Sementara itu kemampuan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum banyak berkembang. Sementara itu kemampuan masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan memilih dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan juga masih terbatas. Potensi

masyarakat baik berupa organisasi, upaya, tenaga, dana, sarana, teknologi, maupun dalam mekanisme pengambilan keputusan belum secara optimal dimanfaatkan untuk percepatan pencapaian program kesehatan.

Upaya pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Dengan pemberian pelayanan kesehatan dasar secara cepat dan tepat, diharapkan sebagian besar masalah kesehatan masyarakat sudah dapat diatasi. Namun pelayanan kesehatannya yang ada belum memadai, hanya ada satu perawat kesehatan dan satu bidan desa. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat sangat tidak maksimal, karena mereka hanya melayani masyarakat senin sampai dengan hari Kamis saja. Selanjutnya tak ada pelayanan kesehatan bagi masyarakat Pulau Gili Ketapang. Karena mereka harus pulang untuk menjenguk keluarga mereka. Tidak ada pengganti tugas untuk melayani kesehatan masyarakat pulau Gili Ketapang selama mereka meninggalkan pulau tersebut. Perlu ditambah pelayanan kesehatan cadangan untuk melayani masyarakat pulau Gili Ketapang pada saat pelayanan kesehatan utama meninggalkan pulau. Sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak terganggu. Sehingga perlu dilakukan studi lanjutan dalam upaya pemberantasan ketimpangan pembangunan di pulau Gili Ketapang.

3. Analisis Dampak Hasil Pembangunan Di Pulau Gili Ketapang

a. Ketersediaan Infrastruktur

Infrastruktur yang ada bisa dikatakan cukup, walaupun masih jauh dari kata layak untuk standar daerah yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo pada umumnya. Pulau ini ukurannya sangat kecil dan letaknya juga lumayan jauh dari Pulau utama (Jawa) Kabupaten Probolinggo sehingga menyulitkan pengadaan infrastruktur yang sama seperti yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo pada umumnya. Selain itu juga biaya yang sangat besar dalam

pengadaan infrastruktur, karena itu masih banyak hal yang perlu ditambahkan di Pulau ini untuk menyeimbangkan pembangunan, agar tidak terjadi ketimpangan yang mencolok.

Kondisi ini dapat dimaklumi oleh sebagian besar masyarakat Pulau gili ketapang. Mereka sebagian sudah terbiasa dengan keadaan yang seperti demikian, seperti pelayanan PLTD yang hanya 6,5 jam per harinya dengan biaya yang bisa dikatakan mahal untuk ukuran listrik di Pulau Jawa pada umumnya. Kemudian juga pelayanan PDAM, yang harga per m³nya lebih mahal dibandingkan dengan harga air PDAM di wilayah daratan Kabupaten Probolinggo pada umumnya.

b. Pembangunan Pendidikan

Pendidikan sebagai salah satu lembaga sosial merupakan suatu pranata yang muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya kebutuhan pokok manusia akan pengajaran dan penerangan. Dalam kaitan ini, dikenal dua sistem pendidikan yaitu pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diatur menurut ketentuan-ketentuan resmi oleh pemerintah atau swasta dan memiliki tingkatan tertentu. Sedangkan pendidikan non formal adalah salah satu bentuk pendidikan yang diprogramkan oleh pemerintah atau swasta untuk tujuan tertentu.

Pandangan masyarakat desa tentang manfaat atau fungsi sekolah terdiri dari sekolah akan menghasilkan tenaga yang akan bekerja di sebagai seorang pegawai, kemudian sekolah semata-mata tempat mencari ilmu, sehingga orang yang tamat dari sekolah tertentu dianggap orang yang berilmu dan menjadi tempat bertanya, dan yang ketiga adalah sekolah merupakan wadah untuk mendapatkan ilmu dan agama. Di antara masyarakat ditemukan anggapan bahwa sekolah merupakan salah satu penghambat ataupun mengancam kepercayaan yang dianutnya. Dengan kata lain masyarakat kurang bersikap

positif terhadap pendidikan formal. Mereka lebih mementingkan pendidikan agama saja. Rata-rata penduduk Desa Gili Ketapang tingkat pendidikan formal hanya sampai pada sekolah dasar, walaupun ada yang sampai ke jenjang perguruan tinggi. Ancaman tersebut dapat dilihat dari keinginan dan dorongan orang tua untuk menyekolahkan anaknya keluar daerah, dan pikiran mereka yang berfikir jika anaknya bersekolah jauh akan mendapatkan pengaruh buruk dari luar. Sarana Pendidikan di desa Gili Ketapang dapat dikatakan kurang memadai. Jumlah local kelas tidak sesuai dengan jumlah murid yang ada.

Dampak pendidikan terhadap masyarakat desa Gili Ketapang juga nampak pada usia perkawinan para warga desa Gili ketapang. Dahulu banyak murid SD yang keluar sekolah dan kemudian dinikahkan orang tua mereka. Namun lambat laun hal ini mulai pudar seiring dengan perkembangan informasi yang makin gencar dan perkembangan jaman serta pemahaman orang tentang perkawinan. Anak-anak desa Gili Ketapang enggan untuk menikah muda karena mereka masih ingin menuntut ilmu, tapi ada juga yang ingin segera menikah setelah lulus sekolah. Usia perkawinan yang dahulu belasan tahun sekarang menjadi sedikit lebih meningkat menjadi awal 20an. Pendidikan juga berimbas pada pekerjaan yang digeluti masyarakat Pulau Gili Ketang. Mereka mulai ada yang bekerja di sekolah sebagai tenaga pendidik, bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit dan beberapa pekerjaan lainnya. Namun pekerjaan baru ini harus mereka lakukan di luar Pulau gili Ketapang.

c. Pembangunan PLTD

Sejak 10 tahun terakhir Pulau Gili ketapang mendapatkan penerangan dari pembangunan PLTD yang dikelola PLN. Hal ini membawa pengaruh sangat besar bagi kehidupan masyarakat Pulau ini. Pulau ini tidak gelap lagi di waktu malam hari, walaupun mereka hanya bisa menikmati listrik hanya 6,5 jam per harinya. Mulai dari jam 17.30 sampai dengan jam 24.00. PLTD membawa

banyak imbas bagi masyarakat, imbas baik dan juga imbas buruk. Diantaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang kelistrikan, sehingga sering terjadi konsleting listrik di rumah penduduk. Kondisi ini sering terjadi saat musim hujan tiba, air membuat instalasi kabel yang terbuka menjadi konslet. Mereka tidak mendapatkan pengetahuan tentang ini, sehingga jika terjadi konsleting listrik memanggil pegawai PLN.

Dengan mengalirnya listrik di rumah penduduk, mereka mulai membeli barang-barang elektronik seperti TV dan Radio, sehingga arus komunikasi semakin lancar. Semakin gencarnya arus globalisasi komunikasi dan informasi dewasa ini, merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan, sebab telah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sernua itu timbul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Keberadaan berbagai media komunikasi produk iptek seperti televisi dan radio menjadi dasar utama perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial budaya masyarakat, baik positif maupun negatif. Kehidupan masyarakat desa Gili Ketapang yang dahulu syarat dengan nilai-nilai tradisional secara turun-tenurun mengalami berbagai perubahan atau pergeseran yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung serta disadari maupun tidak disadari oleh masyarakat.

Dibidang ekonomi, keberadaan berbagai media komunikasi telah mempengaruhi pola kerja masyarakat, terutama menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari setiap keluarga. terdapat adanya perubahan dari sistem ekonomi tradisional ke arah sistem ekonomi yang lebih modern, dengan alokasi baik dalam produksi, distribusi dan konsumsi. Misalnya pola perdagangan. Perubahan tersebut diatas tidak luput dari akibat pengetahuan yang diperoleh masyarakat dari televisi dan radio yang mereka miliki dan tonton. Siaran dari televisi dan radio yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, telah ikut menambah pengetahuan dan informasi tentang ekonomi yang dapat

dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dalam usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya masyarakat yang berusaha di bidang ekonomi seperti, membuka warung atau kios. Walaupun demikian informasi di bidang ekonomi ini menumbuhkan pula persaingan dan sikap komersial dalam masyarakat.

Dalam hal pendidikan, semenjak adanya PLTD dan media televisi dan radio, telah mempengaruhi pandangan partisipasi masyarakat terhadap betapa pentingnya pendidikan khususnya bagi anak-anak. Kalau pada masa dahulu pendidikan tidak dianggap begitu perlu, maka sekarang sebaliknya pendidikan dianggap dapat menaikkan prestise keluarga secara ekonomi maupun sosial di tengah kehidupan masyarakat. Siaran radio dan televisi dapat menambah pengetahuan umum yang sebelumnya tidak diketahui dan menambah kesadaran orang tua menyekolahkan anaknya.

Perkembangan sistem pendidikan, juga mempengaruhi orientasi masyarakat terhadap pekerjaan yang diminati, pergaulan dan memilih jodoh bagi kaum muda. Disadari pendidikan sebagai alat sosialisasi anggota masyarakat, dengan sendirinya mempengaruhi pola kehidupan sosial budaya masyarakat desa Gili Ketapang. Terhadap keluarga, kehadiran berbagai media komunikasi dan informasi juga sangat dirasakan manfaatnya.

d. Pembangunan Dermaga

Pembangunan dermaga pada desa Pulau memang harus dilakukan untuk memperlancar arus distribusi barang, jasa dan manusia. Karena satu-satunya alat transportasi yang memungkinkan dioperasikan di daerah tersebut adalah perahu. Jika kondisi dermaga dalam keadaan baik, maka dapat dipastikan kehidupan social ekonomi masyarakat akan lancar. Dan jika dermaga dalam keadaan tidak baik maka juga dapat dipastikan juga akan mengganggu arus distribusi. Namun tidak hanya kondisi dermaga yang menentukan kelancaran

distribusi barang, jasa, maupun manusia. Namun juag kondisi musim, keadaan arus dan angin yang terjadi.

Kondisi dermaga yang ada di Pulau Gili ketapang bisa dikatakan dalam keadaan baik dan layak, hanya saja kurang perawatan. Letak dermaga yang ada di Pulau Gili Ketapang berada di Pulau bagian utara. Sehingga jika sedang musim angin, kapal tidak bisa berlabuh di demaga. Hal ini membuat arus transportasi menjadi terhambat, namun mereka tetap melakukan pendaratan tetapi tidak di dermaga. Pendaratan dilakukan di Pulau bagian barat, tempat ini dipilih karena dasar perairan yang berupa pasir dan gelombang yang tidak terlalu tinggi. Penempatan dermaga di utara Pulau pada awalnya karena tempat itu memiliki kelandaian yang cukup untuk berlabuh kapal, baik dalam kondisi pasag maupun dalam kondisi surut. Sehingga tidak perlu membangun dermaga yang terlalau panjang dari Pulau.

Selan pertimbangan tersebut juga karena masyarakat selalu melaut kearah utara, barat dan timur Pulau. Karena itu rata-rata rumah penduduk banyak yang dibangun disepanjang bibir pantai sebelah utara, sehingga Pulau bagian selatan relatif masih kosong. Untuk memperlancar arus disrtibusi dan transportasi, perlu kiranya dibangun demaga di selatan Pulau. Walau dengan biaya yang lebih mahal, karena pantai di Pulau sebelah selatan relative lebih landai. Sehingga nantinya pembanguan dermaga akan lebih panjang jika dibandingkan dengan dermaga yang berda di sebelah utara Pulau Gili Ketapang.

Pemanfaatan dermaga di Pulau Gili Ketapang tidak hanya sebagai tempat bersandarnya kapal, prasarana arus distribusi kan transportasi. Tetapi juga tempat mereka bersosialisasi antara penduduk yang satu dengan penduduk yang lainnya. Sehingga dermaga sangat jarang berada dalam kondisi sepi. Jika siang hari, dermaga ramai oleh orang yang datang dari Kota Probolinggo dan

juga pergi ke Kota Probolinggo. Dan jika malam hari ramai oleh anak-anak yang sekedar ngobrol di pinggir dermaga bersama teman-teman mereka.

e. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Gili Ketapang

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia, semua makhluk hidup memerlukan air untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Akan tetapi tidak semua air yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik, bahkan sebagian besar air yang ada di muka bumi ini tidak dapat dimanfaatkan langsung untuk keperluan air minum. Disamping itu air juga merupakan media yang efektif dalam menularkan penyakit infeksi, diantaranya adalah penyakit kolera, disentri, typhus, paratyphus dan penyakit-penyakit lainnya.

Sehubungan dengan pentingnya air dalam kehidupan, maka masalah air perlu mendapat perhatian yang serius baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Demikian pentingnya air untuk kehidupan, maka perlu mengelola sumber air dengan baik, karena ketersediaan air terutama air bersih saat ini telah dirasakan sangat kurang bagi pulau Gili Ketapang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pembangunan sarana air bersih yang memadai. Untuk mencukupi kebutuhan air minum, maka diperlukan ketersediaan sumber air minum baik berupa sumur, namun sayang karena Pulau Gili ketapang dikelilingi oleh laut, maka air sumur berasa payau.

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Gili Ketapang dirasa adalah langkah yang tepat untuk mengatasi krisis air bersih di Pulau ini. Karena air sumur yang dihasilkan berasa asin dan tidak dapat dikonsumsi untuk kebutuhan minum dan memasak. Sehingga masyarakat harus membeli air dari Kota Probolinggo. Pembangunan SPAM ini membawa beberapa dampak pada masyarakat. Salah satu diantaranya adalah mereka mengeluh dengan tingginya harga air yang ditawarkan PDAM. Yaitu sebesar Rp. 7.500/m³, yang jauh berbeda dengan harga air di Kota Probolinggo sebesar Rp. 1.500/m³. Pelanggan

di Pulau Gili Ketapang harus membayar minimum pemakaian 5m^3 per bulannya untuk menutupi biaya operasional PDAM. Jadi pelanggan minimum harus membayar Rp. 37.500 setiap bulannya, jika mereka memakai air lebih dari 5m^3 mereka membayar kelebihan meter yang dipakai dan jika mereka tidak memakai air sebanyak 5m^3 dalam satu bulan, maka mereka harus membayar sebanyak Rp. 37.500.

Rata-rata masyarakat Pulau Gili ketapang, memanfaatkan air dari PDAM hanya untuk keperluan memasak dan mandi saja. Untuk keperluan mencuci dan mandi, mereka memanfaatkan air hujan yang mereka tampung di tandon ataupun kolam yang mereka bangun di sekitar rumah mereka. Konsumsi air PDAM sangat mereka batasi, karena mahalnya harga air tersebut. Sehingga mereka masih bertahan dengan menggunakan air hujan. Walaupun air hujan memiliki tingkat keasaman yang tinggi, sehingga jika digunakan untuk mencuci tidak cepat menghilangkan busanya.

Pembangunan PDAM membawa banyak pengaruh, dampak positif maupun dampak negative di masyarakat. Dampak baiknya adalah mereka tidak perlu lagi repot membeli air untuk keperluan sehari-hari dari Kota Probolinggo dengan banyak jirigen. Mereka hanya perlu memutar kran, kemudian air akan mengalir. Namun dampak negatifnya adalah jumlah biaya per bulan yang akan mereka bayarkan dalam tiap bulannya. Mereka akan banyak terbebani dengan biaya yang mahal tersebut.

f. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

Tujuan utama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Visi PNPM Mandiri Pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya

kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi PNPM Mandiri Pedesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Pedesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Dari visi, misi, dan strategi maka PNPM Mandiri Pedesaan berupaya menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih yaitu menuntaskan tahapan pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.

Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan memang tidak semudah kelihatannya. Program ini melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal dan mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif bersama masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan. Tindakan nyata adalah musyawarah dalam penentuan pembangunan sekolah TK dan pembangunan rabat jalan dan telah selesai di bangun.

Selain pembangunan fisik, juga dilakukan pembangunan non fisik, yaitu masyarakat diharapkan desa Gili Ketapang diharapkan mampu melembagakan pengelolaan dana bergulir yang diturunkan pemerintah. Alur turunnya dana bergulir ini diawali dengan musyawarah antar kelompok usaha dengan pengelola PNPM Mandiri Pedesaan yang ada di desa kemudian diajukan dalam musyawarah antar desa yang ada di kecamatan. Kemudian dalam rapat itu ditentukan jumlah dana yang diturunkan. Model ini dipilih karena dirasa akan sangat membantu mengutarakan pendapat masyarakat dalam percepatan proses pembangunan yang merupakan salah satu tujuan dari program PNPM Mandiri pedesaan ini.

Dengan kata lain, saat ini masyarakat telah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Pembangunan tidak lagi dari atas kebawah (*top down*), dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah kemudian di instruksikan ke masyarakat. Yang terkadang pembangunan tersebut salah sasaran dan tidak termanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sebagai orang yang paling dekat dengan pembangunan tersebut. Tetapi sekarang pembangunan dilakukan dari dari bawah ke atas (*bottom up*), dimana masyarakat mengusulkan sendiri pembangunan apa yang dirasa sangat diperlukan di daerah mereka. Mereka juga dilatih untuk menjadi kritis dalam perumusan pembangunan. Sehingga nantinya pembangunan benar-benar tepat sasaran tidak terbuang sia-sia karena pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang diusulkan langsung oleh masyarakat.

g. Pembangunan Kesehatan

Merupakan suatu kenyataan besar jika daerah-daerah pedesaan yang terletak di daerah, sarana kesehatan merupakan permasalahan yang mendasar. Kondisi seperti itu mengakibatkan suatu kenyataan bahwa hampir sebagian besar penduduk yang menderita suatu penyakit mengalami kematian yang cukup

besar adalah berasal dari daerah pedesaan karena mereka tidak mendapatkan pertolongan perawatan kesehatan.

Permasalahan itu bukan saja berarti bahwa sarana-sarana kesehatan seperti Puskesmas-puskesmas atau sarana-sarana kesehatan lainnya belum terjangkau, akan tetapi yang paling penting disini adalah pemahaman masyarakat menyangkut masalah kesehatan masih sangat rendah. Rendahnya pemahaman masyarakat menyangkut masalah kesehatan, baik mengenai penyebab, pencegah penyakit maupun penyembuhan suatu penyakit adalah sangat erat kaitannya dengan masalah pendidikan dan kepercayaan masyarakat. Itulah sebabnya sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat pedesaan termasuk masyarakat di Desa Gili Ketapang.

Dengan semakin baiknya tingkat pendidikan masyarakat Pulau Gili Ketapang, semakin baik pula pandangan mereka dengan dunia kesehatan. Mereka telah beranggapan bahwa kesehatan sangatlah penting bagi kehidupan mereka. Masalah kesehatan telah menjadi masalah yang serius untuk diperhatikan. Perubahan pandangan itu dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat seperti melakukan pengobatan ke puskesmas pembantu. Namun sayang perhatian mereka terhadap lingkungan yang bersih dan sehat masih kurang. Mereka masih membuang sampah di laut dan kotoran ternak berserakan di jalan dan di halaman rumah mereka. Perubahan pandangan itu tidak lain disebabkan oleh adanya upaya pemerintah dalam melaksanakan pengembangan pendidikan yang merata disetiap pelosok desa serta perhatian Pemerintah di bidang kesehatan seperti penyediaan sarana-sarana kesehatan dapat dikatakan telah terjangkau. Pandangan anggota masyarakat di desa Gili ketapang terhadap kesehatan sejak dahulu hingga sekarang makin lama makin berkembang (maju).

Puskemas yang terdapat di desa Gili Ketapang melayani masyarakat desa ini selama 4 sampai dengan 5 hari. Selanjutnya mereka jika hendak memeriksakan kesehatannya harus pergi ke Rumah Sakit yang ada Kota Probolinggo atau Puskesmas Mayangan yang ada di Kota Probolinggo pula. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas pembantu Gili Ketapang ini dapat dibedakan atas pelayanan kesehatan warga masyarakat secara umum dan kesehatan ibu dan anak khususnya. Pelayanan kesehatan umum dilayani oleh seorang perawat dan untuk kesehatan ibu dan anak dilayani oleh seorang bidan. Penyakit yang diderita oleh warga masyarakat umumnya ialah batuk, panas, dan influenza.

Di lihat dari kesehatan ibu dan anak, di desa Gili Ketapang ini telah tampak perhatian ibu-ibu sejak janin mulai tumbuh dalam kandungan hingga melahirkan bayi, selalu menghubungi bidan desa untuk memeriksa kandungan ataupun bayi. Dengan demikian sudah kurang ditemukan penyakit demam berhari-hari sesudah bersalin.

h. Pembangunan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Bahari Makmur

Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Bahari Makmur ini didirikan atas usulan dari masyarakat dan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Probolinggo. Bahwa dalam upaya pemanfaatan potensi laut memerlukan adanya hubungan dan kerja sama yang erat dan serasi antara masyarakat dan instansi pemerintah. Untuk menjamin hubungan dan kerjasama yang erat dan serasi antara individu usaha dengan pihak pemerintah, lembaga maupun swasta perlu dibentuk wadah yaitu kelompok usaha bersama Mina Bahari Makmur yang bertugas meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir pantai Pulau Gili Ketapang. Mewujudkan dan memelihara hubungan yang erat dan serasi antara masyarakat dan pemerintah serta mendistribusikan program pemerintah kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.

Mengembangkan pemupukan penguatan permodalan pada masyarakat Pulau Gili Ketapang. Membantu kelancaran kegiatan usaha masyarakat dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat Pulau Gili Ketapang.

KUB ini menaungi beberapa unit usaha pengolahan dan penganeekaragaman hasil perikanan yang semuanya dikelola oleh para istri-istri nelayan. Usaha yang ada yaitu usaha pembuatan kerupuk ikan, pembuatan tepung ikan, pengeringan ikan dan pembuatan petis. Distribusi hasil produksi dilakukan oleh KUB dan pemilik usaha. Rencana pengembangan KUB ke depan adalah mengembangkan unit usaha dan pemberdayaan laki-laki nelayan. Karena selama ini program KUB hanya memberdayakan para istri nelayan saja. Rencana ke depan yang ingin dilakukan ketua KUB adalah ingin membuat unit usaha tabungan.

Campur tangan pemerintah desa, membuat KUB Mina Bahari Makmur ini mempunyai dua kebijakan yang berbeda. Sehingga membuat bingung anggotanya. Kebijakan pertama berasal dari ketua KUB dan kebijakan kedua berasal dari kepala desa. Kepala desa berniat mengembangkan unit usaha yang ada di dalam KUB tersebut. Namun kenyataannya tidak mampu menjalankan unit usaha yang telah terbentuk. Karena terjadi silang pendapat antara pemerintah desa dengan ketua KUB.

Dampak yang dapat dilihat dari adanya KUB ini adalah mulai terbentuknya kreatifitas masyarakat dalam pengolahan hasil perikanan. Mereka tidak hanya menjual hasil melaut dalam bentuk ikan segar, tetapi sudah mengalami proses pengolahan. Sehingga harga jualnya juga lebih tinggi dan lebih tahan lama. Tak hanya itu, KUB ini juga membuat lapangan kerja baru bagi para istri nelayan yang pada awalnya tidak mempunyai kesibukan, setelah adanya KUB ini menjadikan mereka mempunyai kesibukan yang produktif. Kesibukan mereka secara langsung telah mengurangi tingkat pengangguran

dalam rumah tangga dan juga menambah angka pemasukan keuangan keluarga. Berarti juga mampu menaikkan taraf hidup para anggota KUB secara langsung.

i. Akses Terhadap Pelayanan Publik

Akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada tidak terhambat. Semua dapat mengakses fasilitas umum yang ada di Pulau Gili Ketapang. Walaupun pelayanan tidak dapat maksimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumberdaya yang ada. Seperti pelayanan listrik, pelayanan air, dan pelayanan kesehatan. Sedangkan pelayanan pemerintahan tidak hanya dilakukan di kantor balai desa. Namun juga pada rumah kepala desa maupun sekdes dan tidak terbatas pada jam kerja pamong desa.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Pulau Gili Ketapang

Pembangunan Pulau Gili Ketapang dimasa lampau hampir tidak mendapat perhatian yang memadai. Padahal kawasan ini memiliki potensi pembangunan sumberdaya hayati dan jasa-jasa lingkungan kelautan yang cukup besar. Sementara itu, masyarakat Pulau Gili Ketapang yang pada umumnya masuk kedalam kriteria miskin atau sangat miskin. Rendahnya sentuhan pembangunan pada Pulau Gili Ketapang didasarkan pada beberapa alasan antara lain karena keterbatasan sumberdaya yang ada, keterbelakangan pemikiran masyarakat setempat tentang pemahaman pembangunan sehingga mereka menganggap pembangunan akan membawa pengaruh buruk. Dalam pembangunan Pulau Gili ketapangsedikitnya memiliki tiga arti penting yaitu, Pertama secara ekonomi potensi sumberdaya hayati dan non hayati begitu besar. Sehingga jika Pulau Gili Ketapang ini berhasil dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan, maka akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kedua, secara sosial pengembangan Pulau Gili Ketapang selain akan

meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tinggal di Pulau tersebut juga akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Ketiga, Secara ekologis pengembangan Pulau-Pulau kecil akan semakin meningkatkan pengawasan terhadap ancaman kerusakan ekosistem yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun manusia. Pulau-Pulau kecil juga memberikan jasa lingkungan karena keindahan yang dimilikinya dan sekaligus sebagai sumberdaya penggerak industri ekowisata seperti Bali, Lombok, Kepulauan Seribu, Pulau Nias, dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan kerja keras semua pihak terkait baik itu aparaturnya pusat maupun daerah dalam memberikan informasi tentang kawasan Pulau-Pulau kecil yang ada di Indonesia.

a. Faktor Pendukung

1. Internal

- Keinginan Masyarakat untuk merubah daerahnya

Masyarakat Pulau Gili Ketapang mulai terbuka pola pikir dan wawasannya untuk membangun daerahnya agar tidak tertinggal seperti keadaan yang telah lalu. Hal ini merupakan dampak dari makin meratanya pembangunan pendidikan dan makin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia masyarakat Pulau Gili Ketapang, walaupun hanya sebagian kecil saja dari mereka. Pembangunan dari rakyat ini memang sangat diharapkan, mengingat pembangunan *top down* yang dilakukan pemerintah selama ini dirasa sangat tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat Pulau Gili Ketapang. Pembangunan *bottom up* yang mulai dilakukan pemerintah sedikit banyak membawa dampak positif bagi keberlanjutan pembangunan bagi Pulau Gili Ketapang. Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan memang sangat dibutuhkan. Mengingat tujuan utama dari pembangunan tersebut adalah semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

- Mulai terbukanya pemikiran masyarakat tentang pentingnya pembangunan

Selama ini masyarakat mempunyai persepsi negative tentang dampak dari pembangunan khususnya masyarakat kecil karena mayoritas dari mereka tidak merasakan dari keberhasilan suatu pembangunan. Saat ini masyarakat mulai sadar akan pentingnya pembangunan khususnya masyarakat pesisir yang mulai berperan dalam pembangunan wilayah pesisir agar tercapai kesejahteraan masyarakat pesisir.

Peran serta Masyarakat dan Pelaku Pembangunan. Penataan ruang dapat dilihat sebagai kebijakan publik yang mengoptimalkan kepentingan antar pelaku pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam pemanfaatan ruang laut pesisir dan Pulau-Pulau kecil, sehingga di dalam proses perencanaan tata ruang yang demokratis dan akomodatif terhadap semua kepentingan pelaku pembangunan. Pengalaman-pengalaman masa lalu banyak menunjukkan bahwa perencanaan yang prosedural, normatif dan kurang mengakomodasikan kepentingan para pelaku pembangunan yang ada di dalam proses penyusunannya, menjadi kurang dapat diimplementasikan karena menghadapi berbagai kendala di lapangan. Rencana-rencana seperti itu selain kurang aspiratif juga cenderung tidak diakui, tidak diterima dan tidak ditaati didalam pelaksanaannya.

2. Eksternal

- Potensi wisata bahari yang sangat terbuka lebar, sehingga memungkinkan untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan pemasukan desa dan mengangkat perekonomian masyarakat.

Masih harus dilakukan banyak pembangunan untuk mengembangkan potensi yang ada di pesisir Pulau Gili Ketapang. Pengadaan infrastruktur umum,

seperti dermaga yang memadai, listrik dan air yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata yang memerlukan dana yang sangat besar dan merupakan tanggung jawab pemerintah. Sehingga dibutuhkan investor swasta untuk menunjang pembangunan yang membutuhkan banyak dana ini. Pemerintah juga harus mengawasi proses pembangunannya, agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan sehingga merusak ekosistemnya.

- Ketersediaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di Pulau Gili ketapang.

Ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam proses pembangunan suatu daerah. SDA yang masih terjaga akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, seperti hasil panangkapan ikan yang melimpah, biaya operasional yang tidak tinggi dalam proses penangkapan ikan. Ini juga akan menunjang kehidupan masyarakat yang lain. Produktivitas sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di setiap unit ruang di dalam Pulau Gili Ketapang dan yang terdapat di sekitar Pulau (seperti ekosistem terumbu karang dan perairan pesisir) saling terkait satu sama lain secara sangat erat, karena terumbu karang adalah tempat ikan beruaya. Mengingat lebih dari 75% masyarakat desa Gili Ketapang menggantungkan hidupnya di sektor perikanan.

b. Faktor Penghambat

1. Internal

- Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM)

Sumberdaya manusia yang berkualitas maupun penguasaan teknologi merupakan prasyarat dalam pengelolaan sumberdaya alam di Pulau Gili Ketapang. Hal tersebut karena, kapasitas sumberdaya manusia masyarakat di desa Gili Ketapang masih relatif rendah dan belum memahami tentang kebijakan

otonomi daerah. Pada level aparat pemerintahan daerah, pemahaman tentang otonomi daerah di desa Gili Ketapang juga masih relatif rendah. Jika persoalan-persoalan ini tidak dipersiapkan secara matang dan sistematis, maka kebijakan otonomi daerah hanya akan menciptakan konflik dari masyarakat desa Gili Ketapang dan pemerintah daerah. Agar problem semacam itu tidak muncul, maka perlu dilakukan program-program yang bertujuan mengantisipasi segala persoalan yang diperkirakan akan muncul dan tantangan yang akan dihadapi.

Perencanaan dan pengelolaan Pulau Gili Ketapang harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat lokal. Perencanaan dan pengelolaan berbasis masyarakat merupakan bagian kecil dari paradigma inklusi sosial. Paradigma inklusi sosial yaitu paradigma yang melibatkan masyarakat dalam semua proses pembangunan, dari mulai perencanaan sampai evaluasi dan pemantauan. Dalam paradigma ini masyarakatlah yang merupakan pelaku utama pembangunan, sehingga merekalah yang menentukan apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dibangun. Hal yang sangat penting adalah bahwa yang memperoleh manfaat sosial terbesar dari adanya pembangunan tersebut adalah masyarakat, kebocoran wilayah relatif kecil, sehingga manfaat ganda yang diterima masyarakat semakin besar.

Paradigma inklusi sosial ini muncul sebagai akibat kegagalan dari paradigma eksklusi sosial yang selama ini dijalankan, yang menyebabkan timbulnya masyarakat marginal yang miskin dan mempunyai posisi tawar yang lemah. Dalam kaitan dengan paradigma inklusi sosial, maka keterlibatan masyarakat bukan hanya pada tahap perencanaan tetapi seluruh tahap pembangunan. Perencanaan yang melibatkan masyarakat disebut sebagai orang yang langsung terlibat dalam pembangunan

- Budaya lokal masyarakat desa Gili Ketapang yang beberapa bertentangan dengan kegiatan pembangunan.

Kebudayaan masyarakat Pulau Gili Ketapang memang agak sedikit berbeda dengan kebudayaan masyarakat di daerah Kabupaten Probolinggo pada umumnya. Mereka merupakan masyarakat yang agamis, sehingga menganggap beberapa pembangunan akan membawa dampak buruk dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kondisi ini membuat masyarakat semakin terpuruk, dengan keadaan ini membuat mereka tetap berada dalam satu titik. Tidak bergerak, hanya stagnan, padahal diluar sudah banyak perubahan.

2. Eksterna

- Ketergantungan Ekonomi Pulau Gili Ketapang

Fokus program-program pembangunan di bidang ekonomi di Pulau Gili Ketapang diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi wilayah dan agar masyarakat secara bertahap dapat membangun secara lebih mandiri secara berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam merencanakan program-program pembangunan Pulau Gili Ketapang yang berkelanjutan, disamping tujuan efisiensi dan pertumbuhan, tujuan-tujuan program pembangunan ekonomi juga sekurang-kurangnya harus mencakup keterkaitan dengan dua dimensi pembangunan lainnya, yaitu tujuan ekonomi sosial, dan tujuan ekosistem. Dalam kaitannya dengan tujuan sosial, pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan upaya peningkatan kesempatan kerja dan upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan secara berkeadilan.

Kecenderungan yang terjadi adalah ketergantungan masyarakat terhadap keadaan ekonomi yang ada di kota Probolinggo. Dalam pembangunan ekonomi adalah tidak memperhitungkan nilai-nilai pemanfaatan sumberdaya yang tidak memiliki harga, seperti nilai-nilai sumberdaya alam. Tidak adanya penilaian terhadap sumberdaya ini selanjutnya menimbulkan beban sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat yaitu penurunan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang tentu saja dalam jangka panjang tidak menjamin pengelolaan sumberdaya

yang berkelanjutan (tujuan ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan tidak tercapai).

- Ukuran Pulau Gili ketapang yang kecil, menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana menjadi mahal.

Ukuran Pulau Gili Ketapang menjadi salah satu hambatan dalam pengadaan sarana dan sarana penunjang bagi masyarakat. Karena pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan akan menelan biaya yang sangat banyak. Dan hanya akan dinikmati oleh sedikit masyarakat gili Ketapang saja. Dan tidak dapat diadakan secara masal untuk menekan biaya produksi maupun perawatan. Akhirnya akan membuat tingginya harga yang harus dibayar masyarakat untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

- Keterbatasan transportasi yang mengakibatkan arus distribusi barang dan jasa menjadi terhambat.

Hal ini disebabkan karena cuaca yang terkadang tidak bersahabat yang terjadi pada musim barat. Angin dan arus menjadi sangat kencang, sehingga menyebabkan penyeberangan menjadi terganggu. Banyak kapal penyeberangan tidak berani menyeberang dengan kondisi laut yang seperti itu. Yang akibatnya akan menghambat semua proses, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan.

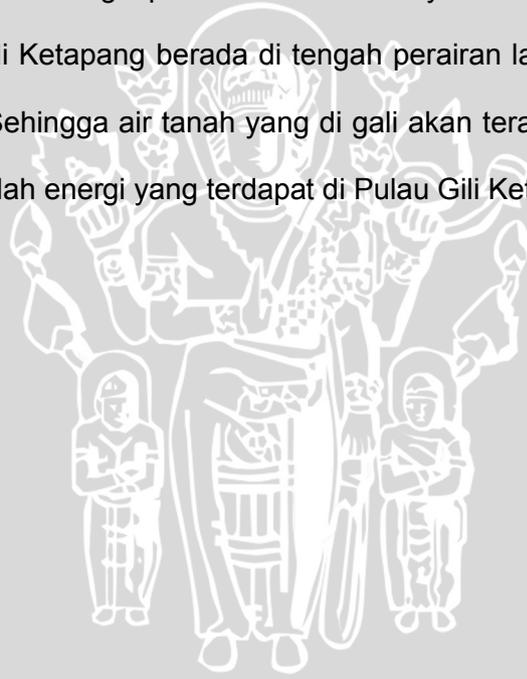
- Sumberdaya yang terbatas jumlahnya

Permasalahan yang berkaitan dengan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dicirikan oleh sifat dari proses kerusakan dan ketersediaan sumberdaya alam yang semakin terbatas. Pada umumnya proses tersebut berjalan relatif perlahan, namun dampaknya kebanyakan bersifat kumulatif, sehingga pada suatu saat menjadi sulit atau sangat mahal untuk dilakukan.

Dengan demikian pengelolaan sumberdaya alam yang efektif dan efisien adalah

sistem pengelolaan yang didukung dan melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Sistem pengelolaan sumberdaya alam berbasis pendekatan sektoral selama ini telah terbukti tidak efisien dan tidak efektif.

Terbatasnya lapangan kerja, hal ini sangat terkait dengan keterbatasan sumberdaya dan kegiatan ekonomi setempat. Lapangan pekerjaan yang tersedia di Pulau ini hanya sebagai nelayan, karena hamper tidak ada kegiatan produksi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Sangat tergantung pada jumlah ikan yang ditangkap, karena rata-rata penduduk desa Gili Ketapang adalah nelayan. Yang secara otomatis menggantungkan diri dari banyak sedikitnya jumlah ikan yang mereka tangkap di laut. Terbatasnya sumberdaya air tawar, karena letak Pulau Gili Ketapang berada di tengah perairan laut dan luas Pulau yang sangat sempit. Sehingga air tanah yang di gali akan terasa payau, bahkan asin. Terbatasnya jumlah energi yang terdapat di Pulau Gili Ketapang.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pulau Gili Ketapang seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Potensi yang dapat dikembangkan di Pulau Gili Ketapang adalah potensi pariwisata yang masih sangat terbuka. Potensi pariwisata bahari Pulau Gili Ketapang meliputi potensi wisata alam pantai dengan pemandangan dan ombak yang indah, walaupun *aksebilitas* (daya jangkau yang mudah ditempuh) menuju kawasan pantai tersebut fasilitasnya masih sangat terbatas. Potensi yang juga masih besar adalah pengolahan hasil perikanan, melihat produksi ikan nelayan masyarakat Pulau Gili Ketapang yang sangat besar.
2. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan aspek pembangunan di Pulau Gili Ketapang adalah masih rendahnya kapasitas perencanaan pembangunan daerah khususnya di bidang pesisir, laut, dan Pulau-Pulau kecil oleh pemerintah, penataan ruang wilayah pesisir, laut dan Pulau-Pulau Gili Ketapang yang belum maksimal, penataan ruang yang belum dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah, konflik penataan ruang antar sektor, antar daerah atau stakeholder terkait lainnya, belum terkelolanya secara maksimal potensi sumber daya di wilayah pesisir, laut dan Pulau Gili Ketapang sehingga mengakibatkan adanya kesenjangan yang tajam antar daerah, adanya kegiatan yang bersifat eksploitatif tanpa usaha mengeksplorasi yang mengakibatkan terganggunya lingkungan di wilayah pesisir, laut Pulau Gili Ketapang.

3. Kehidupan masyarakat Pulau Gili Ketapang dapat dilihat dari beberapa sisi, diantaranya dari sisi agama, ekonomi, sosial, dan budaya. Masyarakat Pulau Gili Ketapang merupakan masyarakat yang sangat agamis dan taat beribadah. Banyak dari mereka merupakan lulusan pondok pesantren. Rata-rata ekonomi masyarakat bisa dikatakan berada pada kondisi menengah keatas. Kehidupan sosial mereka sangat baik antara masyarakat satu dengan yang lainnya, solidaritas dan tenggang rasa mereka sangat tinggi.
4. Pembangunan yang telah dilakukan membawa pengaruh baik dan buruk terhadap kehidupan masyarakat. Dampak baik yang muncul yaitu mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah yang selama ini terjadi, sedangkan dampak negtifnya adalah mereka belum siap dengan konsekuensi pembangunan yang harus mereka hadapi. Hal ini dapat dilihat saat terjadi konsleting listrik dan mereka membebankan tanggung jawab pada pihak PLN.
5. Faktor penghambat pembangunan yang paling utama adalah kualitas sumber daya manusia yang bisa dikatakan sangat rendah. Sehingga menyulitkan dalam mempercepat proses pembangunan.

5.2. Saran

Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo:

1. Pembangunan pariwisata dalam bentuk apapun diharapkan tidak merusak lingkungan serta tetap memperhatikan mengenai dampak lingkungan yang akan timbul sehingga perlu dipikirkan dan dikaji lebih dalam untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan.
2. Pembangunan yang dilakukan di Pulau Gili Ketapang harus melihat berbagai aspek, seperti sektor ekonomi, masyarakat, sosial, budaya, dan pemerintah desa, daerah maupun pusat. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antara satu dengan yang lainnya. Untuk mewujudkan

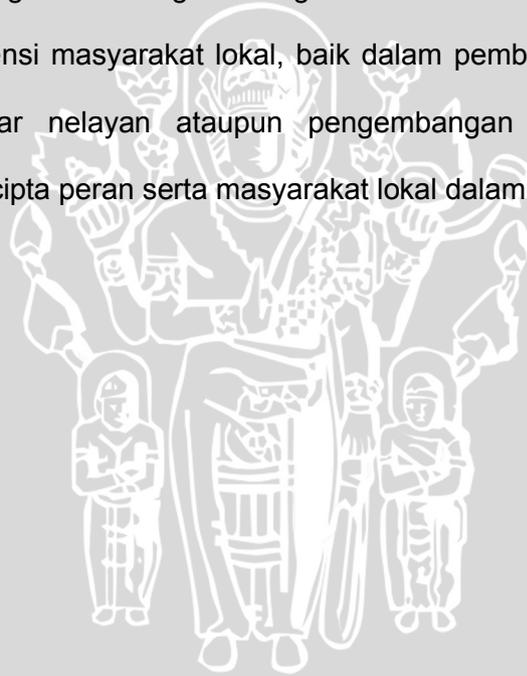


keterpaduan tersebut maka dalam perencanaan pembangunan harus mengintegrasikan semua semua kepentingan pada sektor-sektor yang terlibat. Maka dari itu perlu ada musyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam perencanaan pembangunan. Seperti kerjasama Bappedakab dan Departemen Kelautan dan Perikanan Kabupaten Probolinggo dalam perencanaan rencana strategis pengelolaan pulau dan pesisir.

3. Departemen Kelautan dan Perikanan Kabupaten Probolinggo selayaknya bekerjasama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo merancang rencana strategis terkait pengelolaan Pulau kecil dan daerah pesisir, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek. Sehingga jelas kebijakan yang mengatur dan mengelola pembangunan daerah pesisir dan Pulau-Pulau kecil.
4. Pulau Gili Ketapang dikelola bukan hanya sebagai suatu tempat tinggal masyarakat nelayan saja, tetapi juga berpotensi besar untuk pengembangan budidaya laut, bila tidak dikelola secara arif dan bijaksana dan kekeliruan peruntukannya, akan sangat besar kemungkinan terjadinya kerusakan dan degradasi sumberdaya pesisir dan lautan yang dimilikinya. Untuk itu upaya-upaya tindakan pencegahan harus segera dilakukan dengan mencari dan menentukan alternatif pemanfaatan dan pengelolaan dalam kerangka pemanfaatan yang berkelanjutan.
5. Pembangunan sumber daya manusia perlu mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan, karena manusia merupakan faktor utama dalam mempercepat proses pembangunan. Dalam hal ini adalah perbaikan dalam bidang pelayanan pendidikan baik sarana fisik seperti penyediaan ruang yang mumpuni dan tenaga pendidiknya.

Masyarakat Pulau Gili Ketapang:

1. Setiap pemanfaatan (eksploitasi) sumberdaya alam harus dilakukan dengan metode yang tepat tanpa melupakan pelestarian sumberdaya alam yang ada. Proses eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam, harus ada keseimbangan antara kelestarian dan kebutuhan ekonomi. Dimana kegiatan pemanfaatan tersebut harus mempertimbangkan kemampuan atau daya dukung lingkungannya, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan kegiatan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sehingga ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya alam akan tetap terjaga.
2. Perlu lebih ditingkatkan kegiatan-kegiatan dalam upaya menumbuhkan kembangkan potensi masyarakat lokal, baik dalam pembentukan kelompok musyawarah antar nelayan ataupun pengembangan kelompok usaha bersama agar tercipta peran serta masyarakat lokal dalam pembangunan.



Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2008. **Pengembangan Wilayah: konsep dan teori**. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Agustino, Leo. 2006. **Dasar-Dasar Kebijakan Publik**. CV Alfabeta. Bandung
- Anonymous. 2010. **Pengurangan Ketimpangan Pembangunan**. www.bappenas.go.id.
- _____, **Sistem informasi dan aplikasi kerentanan pulau-pulau kecil**, DKP. www.dkp.go.id
- _____, **Indikator Pembangunan Daerah**. www.ovalhanif.wordpress.com
- Arikunto, Suharsimi. 2006. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)**. Rineka Cipta. Jakarta.
- Dahuri, Rohman dkk. 1996. **Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu**. Pradnya Paramitha. Jakarta
- Daniel, moehardi. 2002. **Metode Penelitian Sosial Ekonomi**. Bumi Aksara. Jakarta
- Pitono, Djoko. 2010. **Indikator Kemajuna Pembangunan Berkelanjutan**. www.lipi.com
- Dewan Kelautan Indonesia. 2008. **Sosialisasi Nilai-Nilai Kelautan**. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2007. **Analisis Kebijakan Publik**. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- E.D. Djafar, 2004. **Kekohesifan Masyarakat Sebagai Penggerak Pembangunan**. Makalah Program Pasca Sarjana IPB, Bogor
- Edy, Lukman. 2009. **Pencapaian Pembangunan Daerah Tertinggal Lima Tahun Terakhir**. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. www.setneg.go.id
- Fauzi, akhmad. 2005, **Kebijakan Perikanan Dan Kelautan Isu Sintesis Dan Gagasan**. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Fermana, Surya. 2009. **Kebijakan Publik (Sebuah Tinjauan Filosofis)**. Ar-Ruzz Media. Jogjakarta.
- Ginting, sapta putra. 2009. **Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (Happi)**. Organisasi dan Pengembangan SDM HAPPI
- Indriantoro, N dan Supomo, B., 1999. **Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen**, BPFE, Yogyakarta

- Jaya, Askar. 2004. **Konsep Pembangunan Bekelanjutan**. Jurnal Penelitian IPB
- Jones, Charles O., 1991. **Pengantar Kebijakan Publik**. CV Rajawali, Jakarta
- Jp, dickenson, cg, clarke, wts, gould, rm, prothero, dj, siddle, ct, Smith, em, Thomas hope, 1986, **Geografi Negara Berkembang (terjemahan)**, Ikip Semarang Press, Semarang
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000. 2000. **Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Yang Berkelanjutan Dan Berbasis Masyarakat**. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta
- Koentjaraningrat. 1985. **Metode-Metode Penelitian Masyarakat**. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Kuncoro, mudrajat. 1997. **Ekonomi Pembangunan Teori, Masala, Dan Kebijakan**. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta
- Makalah pada Rapat Koordinasi Nasional Departemen Kelautan dan Perikanan dengan menteri pemukiman tahun 2002. 2002. **Kebijakan Kimpraswil Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kelautan Dan Perikanan**. Jakarta
- Mantra, ida bagoes. 2004. **Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial**. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Marzali, amri. 2005. **Antropologi Dan Pembangunan Indonesia**. Prenada Media, Jakarta
- Marzuki. 1989. **Metodologi Riset**. Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael. 1992. **Analisis Data Kualitatif (buku sumber tentang metode-metode baru)**. UI Press. Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2004, **Metodologi Penelitian Kualitatif**. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Munandar, Harris dan Todaro, Michael. 2000. **Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga**. Erlangga. Jakarta.
- Narbuko, cholid dan Achmadi, abu. 1997. **Metodologi Penelitian**. Bumi Aksara. Jakarta
- Rencana Strategis DEPSOS. 2004. **Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2004-2009BI**. Departemen Sosial R.I
- Santana k, septiawan. 2007. **Menulis Ilmiah (Metode Penelitian Kualitatif)**. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Satria, Arif. 2009. **Pesisir dan Laut Unutk Rakyat**. IPB Press. Bogor

- Singarimbun, Masri dan Effendi, sofian. 1989. **Metode Penelitian Survey**. LP3ES, Jakarta.
- Siregar, N. Chairil. 2008. **Analisis Potensi Daerah Pulau-Pulau Terpencil Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan, Keamanan Nasional, Dan Keutuhan Wilayah Nkri Di Nunukan–Kalimantan Timur**. Jurnal sosioteknologi edisi 13 tahun ke-7.
- Suharto, Edi. 2008, **Analisa kebijakan Publik, panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan social (edisi revisi)**. CV. Alfabeta, Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul, 2008, **Analisa Kebijaksanaan, dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara**. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Solihin, Ahmad dkk. 2005. **Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia (Bunga Rampai)**. Humaniora. Bandung
- Sugihen, Bahreint T. 1995. **Sosiologi Pedesaan (suatu pengantar)**. Rajawali Press. Jakarta
- Sugito, Yogi. 1995. **Metodologi Penelitian: metode percobaan dan penulisan karya ilmiah**. Lembaga Penerbit Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Malang.
- Sugiyono. 2007. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. Alfabeta. Bandung.
- Suryono, Agus. 2004, **Pengantar Teori Pembangunan**, Universitas Negeri Malang Press, Malang
- Vredenburg, Jacob. 1978. **Metode teknik penelitian Masyarakat**. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Lampiran

Dokumentasi hasil pembangunan Gili Ketapang

Gambar 1

Gapura selamat datang di pulau Gili Ketapang



Gapura selamat datang ini berada di bibir pulau sebelah utara, dan menyatu dengan dermaga. Dermaga merupakan urat nadi transportasi masyarakat pulau Gili Ketapang. Sehingga setiap harinya tempat ini sangat ramai.

Gambar 2

Dermaga pulau Gili Ketapang



Dermaga ini digunakan masyarakat pulau Gili Ketapang sebagai sarana berlabuh kapal penyeberangan dari dan ke Kota Probolinggo. Selain itu juga sebagai tempat mendaratkan hasil melaut para nelayan.

Gambar 3

Pantai di Pulau Gili Ketapang



Pantai di pulau Gili Ketapang sangat indah, namun belum diberdayakan sebagai tempat wisata. Sehingga masih terlihat sangat perawan dan asri.

Gambar 4

Goa Kucing



Goa kucing ini merupakan tempat yang dikeramatkan di pulau Gili Ketapang. Mereka percaya jika tempat ini merupakan tempat singgahnya syeh Maulana Iskhak pada saat menyebarkan agama islam dahulu.

Gambar 5

PAUD pulau Gili Ketapang



PAUD gili Ketapang ini merupakan hasil swadaya masyarakat. Mereka mulai sadar tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.

Gambar 6

SDN 1 Gili Ketapang



SDN 3 Gili Ketapang ini merupakan sekolah yang paling maju kualitas pendidikannya di pulau Gili Ketapang. Dan dari sekolah ini merupakan cikal bakal dari SMP satu arap Gili Ketapang.

Gambar 7

SMP satu atap Gili Ketapang



SMP satu atap ini merupakan satu-satunya sekolah lanjutan setelah sekolah dasar. Sekolah satu atap ini merupakan gagasan dari Kepala sekolah SDN 3 Gili Ketapang dan beberapa tokoh masyarakat setempat.

Gambar 8

MI Mambaul Ulum Gili Ketapang



MI ini merupakan satu-satunya sekolah tingkat dasar swasta di pulau Gili Ketapang. Sekolah ini merupakan yayasan keluarga milik salah satu warga di pulau Gili Ketapang.

Gambar 9

Pondok Pesantren di Gili Ketapang



Pondok Pesantren ini merupakan lembaga pendidikan non formal yang banyak terdapat di pulau Gili Ketapang. Karena masyarakat setempat merupakan masyarakat yang sangat agamis.

Gambar 10

TK Gili Ketapang



TK Gili Ketapang ini dibangun dari dana hasil PNPM Mandiri Pedesaan.

Gambar 11

Hasil Program PNPM Mandiri Pedesaan



Selain TK Gili Ketapang, juga telah di bangun jalan dengan semen untk memperlancar mobilitas warga.

Gambar 11

KUB Mina Bahari Makmur



KUB Mina Bahari Makmur ini dibentuk oleh masyarakat setempat dengan bantuan dana dari DKP Kabupaten Probolinggo. Dengan membentuk beberapa unit usaha pengolahan ikan sebagai upaya difersifikasi produk perikanan.



Gambar 11

Krupuk Ikan



Krupuk ikan ini merupakan hasil dari salah satu unit usaha pengolahan di KUB Mina Bahari Makmur.

Gambar 12

Ikan Kering



Ikan kering ini juga merupakan hasil dari salah satu unit usaha di KUB Mina Bahari makmur. Hal ini dilakukan saat musim ikan melimpah sehingga hasilnya melimpah. Mereka berupaka mengeringkan ikan dan munjulanya kemudian.

Gambar 13
Pengolahan Tepung Ikan



Pengolahan tepung ikan dilakukan jika hasil ikan telah rusak, sehingga tidak layak konsumsi. Pengolahan tepung ikan ini juga tergabung dalam KUB Mina Bahari makmur.

Gambar 14
PLTD Gili ketapang



PLTD Gili Ketapang ini ada sejak 10 tahun yang lalu. Melayani masyarakat pulau Gili Ketapang dari pukul 17.30-24.00 WIB.

Gambar 15
SPAM Gili Ketapang



Saluran Pengadaan Air Minum Ini diambil dari matai air yang berada di Kabupaten Probolinggo dan dialirkan melalui pipa bawah laut.

Gambar 16

Tandon Air



Tandon air ini dibangun dengan tujuan untuk menyediakan kebutuhan air tawar bagi warga masyarakat yang berada di tengah selat Madura. Namun belum beroperasi.

Gambar 17
Puskesmas Pembantu



Puskesmas pembantu Gili Ketapang ini dilayani oleh 2 orang pelayan kesehatan. Perawat kesehatan dan Bidan yang tinggal dan praktek di tempat yang sama.

